



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan RPJPD sebagai berikut:

- (1) Tahapan Pertama Tahun 2025-2029;
- (2) Tahapan Kedua Tahun 2030-2034;
- (3) Tahapan Ketiga Tahun 2035-2039; dan
- (4) Tahapan Keempat Tahun 2040-2045.

Pasal 4

RPJPD bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJPN.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9, Seri E Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 November 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI SURYANTO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd


AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (3/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Dalam Upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 227





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR /GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya.....	3
1.4. Maksud dan Tujuan.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	7
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	7
2.1.1. Geografi.....	7
A. Kondisi Geografis Daerah.....	7
1. Letak Posisi Geografi dan Batas Wilayah Administratif.....	7
2. Topografi.....	8
3. Geologi.....	8
4. Hidrologi.....	9
5. Klimatologi.....	9
B. Peran Strategis Daerah.....	10
C. Potensi Sumber Daya Alam.....	11
1. Potensi Ekonomi Wilayah.....	11
2. Potensi Rencana Tata Ruang.....	12
a. Struktur Ruang.....	12
b. Pola Ruang.....	17
c. Potensi Energi Terbarukan..	18
D. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	19
1. Penggunaan Lahan.....	19
2. Kualitas Lingkungan Hidup.....	20
3. Kualitas Air Permukaan.....	21
4. Kualitas Udara Ambien.....	23
5. Kondisi Persampahan.....	23
6. Ketahanan Pangan.....	24
7. Daya Dukung Air.....	24
E. Kebencanaan dan Perubahan Iklim.....	26
2.1.2. Demografi.....	31
A. Jumlah Penduduk.....	31
B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	32
C. Kepadatan Penduduk.....	33
D. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	33
E. Jumlah Angkatan Kerja.....	34
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	35
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	35



	A.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	35
	B.	Laju Inflasi.....	36
	C.	Tingkat Kemiskinan.....	37
	D.	Indeks Gini.....	38
	E.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	39
	F.	Indeks Pembangunan Manusia.....	39
2.2.2.		Kesejahteraan Sosial Budaya.....	40
	A.	Indeks Pembangunan Gender.....	40
	B.	Kota Layak Anak.....	40
	C.	Usia Harapan Hidup.....	42
	D.	Kebudayaan.....	42
	E.	Kepemudaan dan Olahraga.....	42
2.3.		Aspek Daya Saing Daerah.....	43
2.3.1.		Daya Saing Ekonomi Daerah.....	43
	A.	PDRB.....	43
	B.	PDRB Per Kapita.....	43
	C.	Keunggulan Sektor-Sektor Ekonomi... ..	44
2.3.2.		Daya Saing Sumber Daya Manusia	46
	A.	Indeks Pendidikan.....	46
	B.	Rata-Rata Lama Sekolah.....	46
	C.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	47
	D.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	47
	E.	Rasio Ketergantungan.....	47
2.3.3.		Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	48
2.3.4.		Daya Saing Iklim Investasi.....	48
	A.	Angka Konflik.....	48
	B.	Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	48
	C.	Indeks Daya Saing Daerah.....	49
	D.	Angka Kriminalitas yang Diselesaikan.....	49
2.4.		Aspek Pelayanan Umum.....	50
	A.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).....	50
	B.	Indeks Reformasi Birokrasi.....	51
	C.	Indeks Pelayanan Publik.....	51
	D.	Indeks Inovasi Daerah.....	52
	E.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).....	52
	F.	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	53
2.5.		Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	54
2.5.1.		Evaluasi Misi I.....	54
2.5.2.		Evaluasi Misi II.....	57
2.5.3.		Evaluasi Misi III.....	59
2.5.4.		Evaluasi Misi IV.....	63
2.5.5.		Evaluasi Misi V.....	66
2.6.		Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	69
2.6.1.		Tren Demografi.....	69
2.6.2.		Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar.....	73
	A.	Rumah/Tempat Tinggal Permukiman... ..	73
	B.	Air Minum.....	75
	C.	Energi/Listrik.....	82



	D. Persampahan.....	86
	E. Telekomunikasi.....	88
	F. Limbah.....	92
	G. Drainase.....	96
	H. Infrastruktur Kesehatan.....	98
	I. Infrastruktur Pendidikan.....	103
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	108
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	118
3.1.	Permasalahan.....	118
3.2.	Isu Strategis.....	143
3.2.1.	Isu Internasional.....	143
	A. Demografi Global.....	143
	B. Geopolitik dan Geoekonomi.....	144
	C. Perkembangan Teknologi.....	145
	D. Urbanisasi Dunia.....	145
	E. Konstelasi Perdagangan Global.....	145
	F. Tata Kelola Keuangan Global.....	146
	G. Pertumbuhan Kelas Menengah.....	146
	H. Persaingan Memperebutkan Sumber Daya Alam.....	146
	I. Perubahan iklim.....	146
	J. Pemanfaatan luar angkasa.....	147
3.2.2.	Isu Nasional.....	147
	A. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.....	147
	B. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).....	148
	C. Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai.....	148
	D. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.....	149
	E. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.....	150
	F. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.....	150
	G. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal.....	150
3.2.3.	Isu Strategis Kota Pontianak.....	150
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	173
4.1.	Visi Kota Pontianak.....	173
4.2.	Misi Kota Pontianak.....	174
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	181
5.1.	Arah Kebijakan Daerah.....	181
5.2.	Sasaran Pokok.....	189



BAB VI	PENUTUP.....	202
	6.1. Kaidah Pelaksanaan.....	202
	6.2. Kerangka Pengendalian.....	203
	6.2.1. Managemen Resiko.....	203
	6.2.2. Mekanisme Perubahan.....	204
	6.2.3. Pembiayaan Pembangunan.....	205



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1.1.	Megatren Tantangan Global Indonesia 2025-2045.....	1
Gambar 1.2.	Keterkaitan RPJPD Kota Pontianak dalam Hirarki Rencana Pembangunan Provinsi dan Nasional.....	4
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Pontianak.....	8
Gambar 2.2.	Peta Risiko Bencana Banjir Kota Pontianak.....	27
Gambar 2.3.	Peta Risiko Bencana Kekeringan Kota Pontianak.....	28
Gambar 2.4.	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Pontianak.....	29
Gambar 2.5.	Peta Risiko Bencana Karhutla Kota Pontianak.....	30
Gambar 3.1.	Isu Strategis Nasional.....	143
Gambar 3.2.	Rata-Rata Total Factor Productivity Index.....	147
Gambar 4.1.	Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045.....	175
Grafik 2.1.	Perubahan Rata-Rata Suhu Kota Pontianak Tahun 2003-2023.....	9
Grafik 2.2.	Perubahan Rata-Rata Curah Hujan Kota Pontianak Tahun 2003-2023.....	10
Grafik 2.3.	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kota Pontianak....	12
Grafik 2.4.	Rekapitulasi Nilai Indeks Pencemar Berdasarkan Hasil Pengukuran.....	23
Grafik 2.5.	Konsentrasi Seluruh Parameter Rata-rata Tahunan Kota Pontianak Tahun 2022.....	23
Grafik 2.6.	Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023.....	33
Grafik 2.7.	Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2025.....	72
Grafik 2.8.	Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2030.....	72
Grafik 2.9.	Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2035.....	72
Grafik 2.10.	Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2040.....	72
Grafik 2.11.	Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2045.....	81
Grafik 3.1.	Total Factor Productivity Index 2010-2019.....	148
Grafik 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia (1985-2024)...	148
Grafik 3.3.	Kontribusi Manufaktur terhadap PDB.....	149
Grafik 3.4.	Produktivitas Pertanian.....	149



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kota Pontianak Tahun 2023.....	7
Tabel 2.2.	Sebaran Gambut Kota Pontianak.....	9
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Luas Rencana Pola Ruang Kota Pontianak 2024-2044.....	17
Tabel 2.4.	Penggunaan Lahan Kota Pontianak.....	20
Tabel 2.5.	Capaian IKLH Kota Pontianak Tahun 2019-2023.....	21
Tabel 2.6.	Indeks Pencemar Sungai Landak.....	21
Tabel 2.7.	Indeks Pencemar Sungai Kapuas Kecil.....	22
Tabel 2.8.	Indeks Pencemar Sungai Kapuas Besar.....	22
Tabel 2.9.	Capaian Indikator Persampahan Tahun 2019-2023.....	24
Tabel 2.10.	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Pontianak Tahun 2019-2023.....	24
Tabel 2.11.	Ketersediaan Air Kota Pontianak Tahun 2022.....	25
Tabel 2.12.	Kebutuhan Domestik Air Kota Pontianak Tahun 2022.....	25
Tabel 2.13.	Kebutuhan Non Domestik Air Kota Pontianak Tahun 2022.....	25
Tabel 2.14.	Perhitungan Status Daya Dukung Air Kota Pontianak Tahun 2022.....	25
Tabel 2.15.	Luas Risiko Bencana Kota Pontianak.....	26
Tabel 2.16.	Tingkat Risiko Bencana Kota Pontianak.....	26
Tabel 2.17.	Potensi Luas Risiko Bahaya Banjir di Kota Pontianak.....	27
Tabel 2.18.	Potensi Luas Risiko Bahaya Kekeringan di Kota Pontianak.....	28
Tabel 2.19.	Potensi Risiko Bahaya Cuaca Ekstrem di Kota Pontianak.....	29
Tabel 2.20.	Potensi Luas Risiko Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak.....	30
Tabel 2.21.	Capaian IRB dan IKD Kota Pontianak Tahun 2019-2023.....	33
Tabel 2.22.	Persebaran Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023.....	32
Tabel 2.23.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Pontianak Tahun 2023.....	32
Tabel 2.24.	Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023.....	33
Tabel 2.25.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2014-2023.....	34
Tabel 2.26.	Angkatan Kerja Kota Pontianak Tahun 2023.....	34
Tabel 2.27.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak.....	35
Tabel 2.28.	Laju inflasi di Kota Pontianak.....	36
Tabel 2.29.	Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran.....	37
Tabel 2.30.	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pontianak.....	37
Tabel 2.31.	Indeks Gini Rasio Kota Pontianak.....	38
Tabel 2.32.	Angka Ketenagakerjaan Kota Pontianak.....	39
Tabel 2.33.	Perkembangan Indeks Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak.....	40
Tabel 2.34.	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	40
Tabel 2.35.	Capaian Kota Layak Anak.....	41
Tabel 2.36.	Angka Usia Harapan Hidup.....	42
Tabel 2.37.	Aspek Kebudayaan di Kota Pontianak.....	42
Tabel 2.38.	Aspek Kepemudaan dan Olahraga Kota Pontianak.....	43
Tabel 2.39.	PDRB Kota Pontianak.....	43



Tabel 2.40.	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	44
Tabel 2.41.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2014-2018.....	44
Tabel 2.42.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023.....	45
Tabel 2.43.	Capaian Indeks Pendidikan Kota Pontianak.....	46
Tabel 2.44.	Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.....	46
Tabel 2.45.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pontianak.....	47
Tabel 2.46.	Rasio Ketergantungan Kota Pontianak.....	48
Tabel 2.47.	Capaian Indeks Infrastruktur Kota Pontianak.....	48
Tabel 2.48.	Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Pontianak.....	49
Tabel 2.49.	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2019-2023.....	50
Tabel 2.50.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) Kota Pontianak.....	50
Tabel 2.51.	Capaian SPM Urusan Sosial.....	51
Tabel 2.52.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi.....	51
Tabel 2.53.	Capaian Indeks Pelayanan Publik.....	52
Tabel 2.54.	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 2.55.	Capaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pontianak Tahun 2019-2023.....	53
Tabel 2.56.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pontianak.....	53
Tabel 2.57.	Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 1.....	55
Tabel 2.58.	Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 2.....	58
Tabel 2.59.	Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 3.....	60
Tabel 2.60.	Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 4.....	64
Tabel 2.61.	Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 5.....	67
Tabel 2.62.	Hasil Proyeksi Penduduk Kota Pontianak Tahun 2025-2045.....	70
Tabel 2.63.	Proyeksi Komposisi Penduduk Per-Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2025-2045.....	70
Tabel 2.64.	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2025-2045.....	71
Tabel 2.65.	Proyeksi Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045.....	71
Tabel 2.66.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045.....	72
Tabel 2.67.	Proyeksi Kebutuhan Unit Rumah Tahun 2025-2045.....	74
Tabel 2.68.	Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman Tahun 2025-2045.....	74
Tabel 2.69.	Standar Kebutuhan Domestik.....	75
Tabel 2.70.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kota Pontianak.....	77
Tabel 2.71.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Selatan.....	77
Tabel 2.72.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	78
Tabel 2.73.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Timur.....	78



Tabel 2.74.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Barat.....	79
Tabel 2.75.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Kota.....	79
Tabel 2.76.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Utara.....	80
Tabel 2.77.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Pontianak.....	81
Tabel 2.78.	Jarak Minimum antara Penghantar dengan Tanah dan Benda Lain.....	82
Tabel 2.79.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Pontianak.....	83
Tabel 2.80.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Selatan.....	83
Tabel 2.81.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	83
Tabel 2.82.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Timur.....	83
Tabel 2.83.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Barat.....	84
Tabel 2.84.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Kota..	84
Tabel 2.85.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Utara.....	84
Tabel 2.86.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Pontianak.....	85
Tabel 2.87.	Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan.....	86
Tabel 2.88.	Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan TPS di Kota Pontianak.....	87
Tabel 2.89.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kota Pontianak.....	89
Tabel 2.90.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Selatan.....	89
Tabel 2.91.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Tenggara	90
Tabel 2.92.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Timur.....	90
Tabel 2.93.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Barat.....	90
Tabel 2.94.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Kota.....	90
Tabel 2.95.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Utara Berdasarkan Standar.....	91
Tabel 2.96.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kota Pontianak.....	91
Tabel 2.97.	Tingkat Pemakaian Air Minum Rumah Tangga Berdasar Kategori Kota.....	92
Tabel 2.98.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kota Pontianak.....	93
Tabel 2.99.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Selatan.....	93
Tabel 2.100.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	93
Tabel 2.101.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Timur.....	94
Tabel 2.102.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Barat.....	94
Tabel 2.103.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Kota.....	94



Tabel 2.104.	Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Utara.....	94
Tabel 2.105.	Proyeksi Total Buangan Limbah Kota Pontianak.....	95
Tabel 2.106.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kota Pontianak.....	96
Tabel 2.107.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan.....	96
Tabel 2.108.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	97
Tabel 2.109.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Timur.....	97
Tabel 2.110.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Barat.....	97
Tabel 2.111.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Kota.....	97
Tabel 2.112.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Utara.....	97
Tabel 2.113.	Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kota Pontianak.....	98
Tabel 2.114.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas di Kota Pontianak.....	101
Tabel 2.115.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit di Kota Pontianak.....	102
Tabel 2.116.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kota Pontianak.....	102
Tabel 2.117.	Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran.....	103
Tabel 2.118.	Standar Pembakuan Tipe dan Rombongan Belajar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA.....	104
Tabel 2.119.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Selatan.....	104
Tabel 2.120.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	105
Tabel 2.121.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Timur.....	105
Tabel 2.122.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Barat.....	106
Tabel 2.123.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Kota.....	106
Tabel 2.124.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Utara.....	107
Tabel 2.125.	Program Strategis Pusat Perkembangan Wilayah.....	110
Tabel 3.1	Permasalahan di Kota Pontianak.....	119
Tabel 3.2	Perumusan Isu Strategis RPJPD Kota Pontianak.....	151
Tabel 4.1	Sasaran Visi RPJPD Kota Pontianak.....	174
Tabel 4.2	Hubungan Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dengan Nasional.....	177
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Kota Pontianak 2025-2045.....	182
Tabel 5.2	Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJPD dengan KLHS.....	184
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Daerah.....	190
Tabel 5.4	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2025-2045.....	197



DAFTAR SINGKATAN

AHH	: Angka Harapan Hidup
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AQMS	: <i>Air Quality Monitoring System</i>
BaU	: <i>Business as Usual</i>
BOD	: Biochemical Oxygen Demand
BPS	: Badan Pusat Statistik
CBDC	: <i>Central Bank Digital Currency</i>
CDI	: <i>City Development Index</i>
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DLT	: <i>Distributed Ledger Technology</i>
EBT	: Energi Baru Terbarukan
GPN	: <i>Global Production Network</i>
GVC	: <i>Global Value Chain</i>
HC	: <i>Hidro Carbon</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IID	: Indeks Inovasi Daerah
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKD	: Indeks Ketahanan Daerah
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IoT	: <i>Internet of Things</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPEF	: <i>Indo-Pacific Economic Framework</i>
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPTEKIN	: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Luhan
KHA	: Konvensi Hak Anak
KLA	: Kota Layak Anak
NAPZA	: Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PKN	: Pusat Kegiatan Nasiona
PLTSa	: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPK	: Pusat Pelayanan Kota
PV	: Photovoltaic
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>



RCP	: <i>Representative Concentration Pathway</i>
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPA	: <i>Robotic Process Automation</i>
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SLOC	: Sea Lines of Communication
SO ₂	: Sulfur Dioksida
SPBE	: Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
SUTM	: Saluran Udara Tegangan Menengah
SUTR	: Saluran Udara Tegangan Rendah
TDS	: <i>Total Dissolved Solid</i>
TFP	: <i>Total Factor Productivity</i>
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TSS	: <i>Total Suspended Solids</i>
UKM	: Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	: Upaya Kesehatan Perseorangan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



DAFTAR ISTILAH

<i>Affirmative action</i>	: Kebijakan yang memberi peluang yang setara atau keistimewaan bagi kelompok tertentu, seperti perempuan, dalam bidang politik.
Air baku	: Sumber air yang digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan lainnya.
Aksesibilitas	: Kemampuan seseorang untuk mengakses dan menggunakan suatu fasilitas, layanan, atau informasi tanpa adanya hambatan fisik maupun non-fisik.
Alih fungsi lahan atau konversi lahan	: Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
Ambang Batas	: Tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.
<i>Anaerobic Disgestion</i>	: Proses biologis dimana bahan organik terurai oleh mikroorganisme dalam ketiadaan oksigen (kondisi anaerob).
Angka melek huruf	: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
Angkatan Kerja	: Penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja atau sedang mencari kerja.
Baku mutu	: Batas atau kadar tertentu dari suatu zat yang dipersyaratkan oleh suatu institusi.
<i>Baseline</i>	: Titik awal atau referensi yang digunakan sebagai dasar perbandingan atau evaluasi.
Bencana hidrometeorologi	: Suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi) yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan social dan ekonomi.
Biogas	: Gas yang dihasilkan oleh aktifitas anaerobik dari bahan-bahan organik seperti sampah, limbah domestik dan kotoran.
<i>Blockchain</i>	: Teknologi penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi dan terdesentralisasi.
Bonus Demografi	: Keuntungan ekonomi yang didapat karena bertambahnya usia produktif sebagai akibat penurunan fertilitas jangka panjang.
Birokrasi	: Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Cascading	: Proses penjabaran dan penyelarasan target-target kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis.
<i>Cryptocurrency</i>	: Mata uang digital yang menggunakan kriptografi dan blockchain untuk transaksi terdesentralisasi dan aman.
<i>Cyber security</i>	: Perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet dari berbagai ancaman dunia maya.
Daya beli	: Kemampuan seseorang atau bisnis dalam membeli suatu barang ataupun jasa.
Daya dukung daya tampung lingkungan hidup	: Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.



Daya listrik	: Besaran suplai tenaga listrik yang mengalir dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Debit	: Volume air yang mengalir dari suatu saluran melalui penampang lintang tertentu dalam satuan waktu.
Deforestasi	: Proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan menjadi fungsi non-hutan.
Demografi	: Studi ilmiah tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas.
<i>Dependency ratio</i> atau angka ketergantungan	: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi.
Dinamika	: Tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok.
Diplomasi	: Metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku dalam hubungan internasional melalui dialog atau negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan suatu negara.
Disharmoni	: Ketidakselarasan.
Disrupsi	: Perubahan mendasar yang terjadi secara besar-besaran dengan tujuan untuk mengubah pola hidup yang lama menjadi baru.
Diversifikasi	: Penganekaragaman.
Domestik	: Rumah tangga.
Drainase	: Sistem atau proses pengelolaan air yang bertujuan untuk mengatur aliran air dari suatu area atau permukaan tertentu.
<i>Dutch disease</i>	: Istilah yang menggambarkan fenomena ekonomi ketika eksploitasi sumber daya alam memicu kelemahan di sektor lain, terutama manufaktur.
Efektivitas	: Kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh.
Efisiensi	: Cara untuk mencapai tujuan yang optimal dengan meminimalkan sumber daya, seperti tenaga, uang, dan waktu.
Ekologi	: Studi tentang hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya, serta struktur dan fungsi ekosistem.
Ekonomi Digital	: kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital, seperti internet dan kecerdasan buatan (AI).
Ekonomi Hijau	: Ekonomi hijau merupakan sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.
Eksodus	: Perbuatan meninggalkan tempat asal oleh penduduk secara besar-besaran.
Embung	: Bangunan berbentuk cekung yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada saat terjadi hujan.
<i>Emerging economies</i>	: Ekonomi negara berkembang yang mulai terlibat dengan pasar global seiring perkembangannya.
Emisi	: Pelepasan zat atau substansi ke lingkungan yang dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia.
Epidemiologi	: Ilmu yang mengkaji cara penyakit menyebar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam populasi.
Episentrum	: Titik atau pusat.
Eselon	: Suatu hirarki jabatan struktural dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil.
Fluktuasi	: Suatu perubahan yang berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam waktu tertentu.



Friksi	: Pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat atau perpecahan.
Geoekonomi	: Kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya.
Geopolitik	: Metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi.
Hibah	: Pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup.
Hilirisasi	: Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas yang dimiliki sebuah negara.
<i>Hinterland</i>	: Wilayah sekitar kota yang fungsinya memasok kebutuhan harian kota tersebut.
Imersif	: Teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara alami di metaverse simulasi seakan nyata.
Infertilitas	: Kondisi medis yang menggambarkan ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk hamil setelah berusaha mencapai kehamilan.
Inflasi	: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Inklusi sosial	: Peningkatan persyaratan di mana individu bisa mengambil bagian dalam masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan, kesempatan, juga martabat mereka.
Inklusi	: Pendekatan yang membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.
Insentif	: Tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.
Intangible	: Aset yang tidak berwujud dan sulit untuk diukur secara konkret, seperti hak paten, merek dagang, kekayaan intelektual, dan <i>goodwill</i> .
Jabatan fungsional	: Jabatan yang diberikan kepada pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dengan keterampilan atau keahlian tertentu.
Jasa ekosistem	: Keseluruhan manfaat yang diberikan oleh ekosistem kepada kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kapasitas bencana	: Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.
Kawasan budidaya	: Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kawasan lindung	: Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Kerentanan bencana	: Sebuah kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan seseorang atau masyarakat dalam menghadapi bencana atau ancaman bencana.
Keterpaparan	: Kondisi terbukanya orang atau masyarakat yang berada dalam pengaruh atau interaksi dengan unsur penyebab penyakit.
Komprehensif	: Sifat yang berarti menjelaskan informasi secara lengkap, luas, dan lebih rinci.
Kondusivitas	: Keadaan yang tenang atau tidak ada konflik.



Konektivitas (digital)	: Kemampuan untuk terhubung dan berinteraksi dengan perangkat atau jaringan lain.
Konektivitas (transportasi)	: Terhubungnya wilayah dalam suatu negara dengan berbagai transportasi dan infrastruktur.
Kontinuitas	: Kesenambungan, kelangsungan, kelanjutan, atau keadaan kontinu.
Kredibel	: Dapat dipercaya.
<i>Leading sector</i>	: Leading sektor yaitu sektor potensial yang dapat berperan sebagai penggerak bagi sektor-sektor lainnya.
Logistik	: Pengadaan, perawatan, distribusi dan penyediaan (untuk mengganti) perlengkapan, perbekalan dan ketenagaan.
Madya	: Bagian tengah.
Mahadata	: Pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertumbuhannya dan memiliki data yang beragam sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data besar yang heterogen dan mengetahui bagaimana cara memahami semua data tersebut.
Makro ekonomi	: cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, yang meliputi pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah.
Manajemen risiko	: Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi.
Margin	: Tepi/batas.
Megatren	: Kecenderungan besar pada gaya atau model mutakhir.
Metropolitan area	: Sebuah wilayah yang terdiri dari aglomerasi perkotaan padat penduduk, kawasan industri, kawasan komersial, jaringan transportasi, infrastruktur, dan area perumahan.
Mitigasi	: Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan, akibat dari suatu peristiwa, yang umumnya adalah bencana.
Migrasi	: Aktivitas perpindahan.
Mortalitas	: Salah satu dari 3 (tiga) komponen demografi selain kelahiran (fertilitas) dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Motorisasi	: Pengubahan (penggantian) sesuatu yang tidak menggunakan motor menjadi bermotor; pemakaian motor sebagai tenaga penggerak.
<i>Multiplier effect</i>	: Pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dimana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi.
Nanoteknologi	: Satu ilmu atau teknologi yang mempelajari obyek yang ukurannya sangat kecil.
Neonatal	: Masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran.
Nindya	: Predikat kedua pada penghargaan Kota Layak Anak.
<i>Oleochemicals</i>	: Bahan kimia apapun yang berasal dari lemak.
Ombudsman	: Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Oksidator	: Spesies kimia yang menghilangkan elektron dari spesies lainnya.



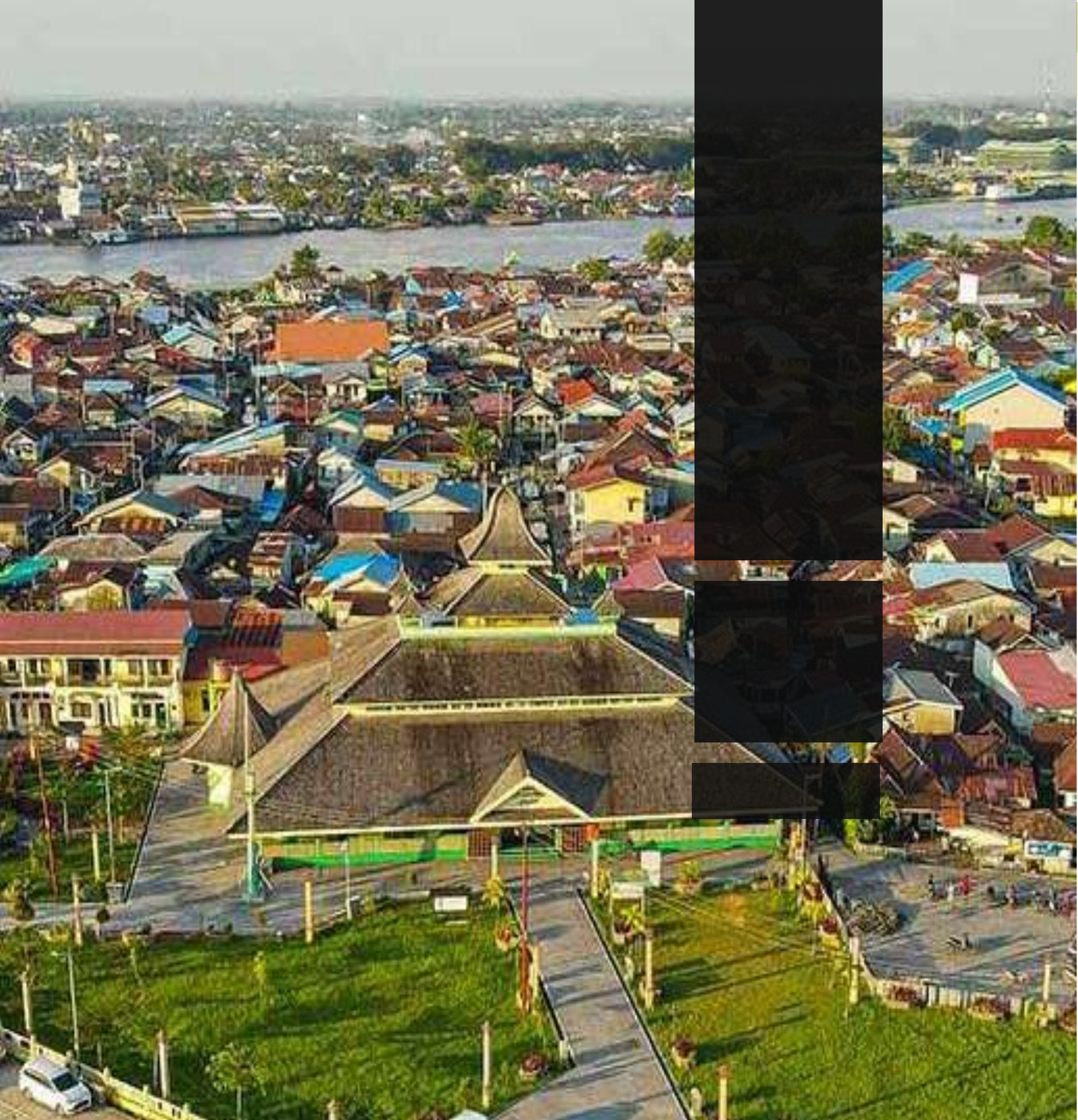
Organik volatil	: Zat berbasis karbon yang mudah menguap pada tekanan udara sekitar dan merupakan kontributor penting terhadap polusi udara.
Otomasi	: Penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa.
<i>Outer ring</i>	: Jaringan Lingkar Luar.
Output ekonomi	: Jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali
Pagu anggaran indikatif	: Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga.
Paradigma	: Kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan ataupun mendefinisikan batas-batas.
Partisipatif	: Menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Pasar kerja	: Pasar tempat para pengusaha mencari karyawan dan karyawan mencari pekerjaan.
Paten	: Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Patogen	: Istilah medis dari kuman, yaitu organisme kecil penyebab infeksi.
Patriotik	: Sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.
<i>Peak hour</i>	: Jam sibuk, biasanya saat penduduk berangkat dan pulang bekerja.
Pedestrian	: Pejalan kaki
Pemanfaatan lahan	: Modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.
Penatausahaan	: Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peneplain	: Dataran dengan relief rendah yang terbentuk akibat erosi yang berkepanjangan.
Penetrasi pasar	: Cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut.
Peraturan zonasi	: Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
Perlindungan sosial	: Upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan.
<i>Petrochemicals</i>	: Bahan kimia yang berasal dari minyak bumi atau gas alam.
Plagiarisme	: Aktivitas pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri atau karangan sendiri.
Pola ruang	: Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya



<i>Population aging</i>	: Penuaan penduduk yakni kondisi dimana jumlah penduduk yang lansia semakin bertambah.
Prasarana	: Fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.
Pratama	: Yang pertama atau yang utama.
Prevalensi	: Proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam periode waktu tertentu.
Produktivitas	: Ukuran efisiensi produktif. Suatu pembandingan antara hasil keluaran dan masukan.
Promotif-preventif	: Upaya atau tingkatan pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan.
Prostitusi	: Kejahatan terhadap kesusilaan atau moral.
Pusat kegiatan nasional	: Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
Pusat pelayanan kota	: Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
Reformasi	: perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Representasi	: Perwakilan.
<i>Replacement level</i>	: Tingkat kesuburan di mana suatu populasi secara tepat mengganti dirinya sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Risiko bencana	: Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Rekayasa	: Penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan (seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien).
Retensi/retensi pekerja	: Sebuah kemampuan atau upaya sebuah perusahaan untuk mempertahankan karyawan di tempat kerja.
Sanitasi	: Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan.
<i>Scientific temper</i>	: Perangai bertualang guna menggali kebenaran dan pengetahuan baru yang melibatkan sikap keterbukaan seseorang untuk berani mengubah pendapat lamanya berdasar bukti baru, menolak menerima gagasan tanpa pembuktian, berpijak pada fakta yang dapat teramati, dan memiliki kedisiplinan menggunakan akal.
Sektor informal	: sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar.
Sempadan	: Batas/tanda batas.
Sensitivitas	: Kepekaan.
Sensus	: cara untuk mendapatkan data deskriptif mengenai jumlah populasi.
<i>Sport-science</i>	: Cabang keilmuan yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan hasil olahraga.
Stagnan	: Tetap atau tidak berubah.
<i>Stakeholder</i>	: Pemangku kepentingan.
<i>Start-up</i>	: Perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi.



Struktur ruang	: Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi.
Stunting	: Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
Supremasi	: Kekuasaan tertinggi.
Surplus	: Kelebihan.
Taraf hidup	: Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang.
Tata ruang	: Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Teknokratik	: Menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya.
Topografi	: Kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah.
Transformasi	: Proses Perubahan berkelanjutan dan menyeluruh.
Turap	: Struktur konstruksi batu kali yang berbentuk dinding dan berguna untuk menahan tekanan dan pergerakan tanah yang kurang stabil.
Udara ambien	: Udara di sekitar kita, di luar bangunan atau ruangan tertutup.
<i>Underemployment</i>	: Ukuran jumlah orang dalam suatu perekonomian yang bekerja pada pekerjaan bergaji rendah atau paruh waktu.
Urbanisasi	: Perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Utilitas	: Secara umum dalam KBBI artinya faedah, kegunaan, manfaat. Sementara dalam infrastruktur yaitu kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
Vektor penyakit	: organisme hidup yang dapat menularkan patogen menular antarmanusia, atau dari hewan ke manusia.
<i>Virtual-metaverse</i>	: istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia virtual yang terhubung dan berkesinambungan, di mana pengguna dapat berinteraksi, bermain, bekerja, dan berkreasi dengan menggunakan avatar digital.
Vokasional	: Bentuk pendidikan yang mengajarkan siswa untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu.



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kota Pontianak di era persaingan global memerlukan pemikiran strategis sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan kota di segala bidang. Kota Pontianak di tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan dengan meningkatnya jumlah penduduk, dinamika masyarakat yang semakin beraneka ragam, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperkuat pengaruh sosial-budaya masyarakat. Isu-isu megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan mempengaruhi perubahan paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital yang mana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045) sebagai berikut.



Gambar 1.1 Megatren Tantangan Global Indonesia 2025-2045

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Menyikapi tantangan dan isu global tersebut, Kota Pontianak memiliki modal dasar pembangunan yang menjadi kekuatan penting untuk menjadi landasan dalam pembangunan kota ke depan antara lain: jumlah penduduk yang cukup besar dengan tersedianya tenaga kerja produktif, kualitas sumberdaya manusia memadai, keberagaman budaya dan asas gotong royong, infrastruktur dasar yang baik serta konektivitas digital yang memadai. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045.

Upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah di dalam sistem pembangunan nasional, memiliki konsekuensi bahwa seluruh pemerintah daerah baik provinsi serta kabupaten/kota berkewajiban untuk menyusun dokumen



perencanaan pembangunan daerah, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan dokumen perencanaan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana pembangunan jangka panjang diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk menghasilkan suatu pondasi pembangunan yang berkelanjutan, dan memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan yang efektif, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang menimbulkan dampak yang signifikan bagi kualitas kehidupan masyarakat Kota Pontianak dalam jangka panjang.

RPJPD Kota Pontianak 2025-2045 disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, terutama untuk mengidentifikasi variabel-variabel dan/atau faktor-faktor yang menjadi tantangan ke depan dan modal dasar, dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kota Pontianak untuk menentukan dan menetapkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka panjang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat (partisipatif). Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan mengakomodasi rumusan pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJPD dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

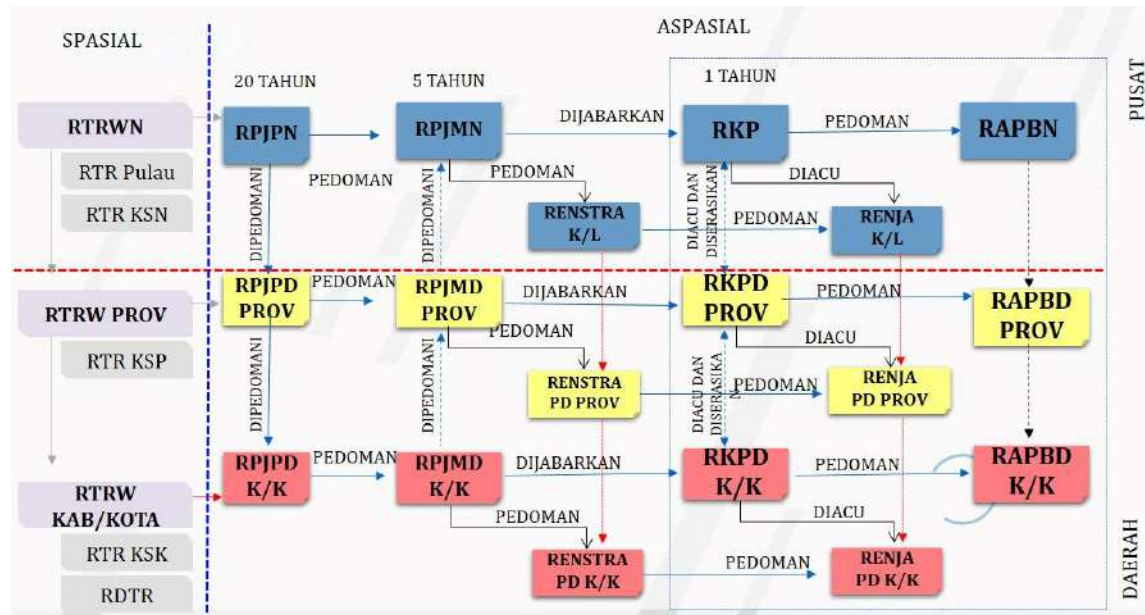
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); dan
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya

Penyusunan rencana pembangunan Kota Pontianak tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak berpedoman dan mengacu serta memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Di tingkat kabupaten/kota, RPJPD berpedoman Kota Pontianak mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Tata Ruang Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya.



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD Kota Pontianak dalam Hirarki Rencana Pembangunan Provinsi dan Nasional

Sumber: Kemendagri, 2023

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dokumen RPJPD Kota Pontianak yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2025-2045 merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan pembangunan di Kota Pontianak dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, RPJPD Kota Pontianak berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi seluruh pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat) dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya RPJPD harus dijabarkan lebih operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pentahapan RPJMD disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat yang memuat strategi pembangunan, kebijakan umum program program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Setelah menyusun RPJMD, setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun, dan bertujuan untuk tercapainya pembangunan daerah sesuai dengan RPJPD Kota Pontianak.



1.5. Sistematika Penulisan

Tata urutan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Isu Strategis

Bab IV Visi dan Misi Daerah

- 4.1. Visi Kota Pontianak
- 4.2. Misi Kota Pontianak

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

- 5.1. Arah Kebijakan
- 5.2. Sasaran Pokok

Bab VI Penutup

- 6.1. Kaidah Pelaksanaan
- 6.2. Kerangka Pengendalian



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

A. Kondisi Geografis Daerah

1. Letak Posisi Geografi dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat secara astronomis terletak di antara 0°02'19,868" Lintang Utara dan 0°05'53,292" Lintang Selatan dan antara 109°16'22,758" Bujur Timur sampai dengan 109°23'9,618" Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula. Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Luas wilayah Kota Pontianak adalah 118,209 km² dengan rincian luas setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Pontianak Tahun 2023

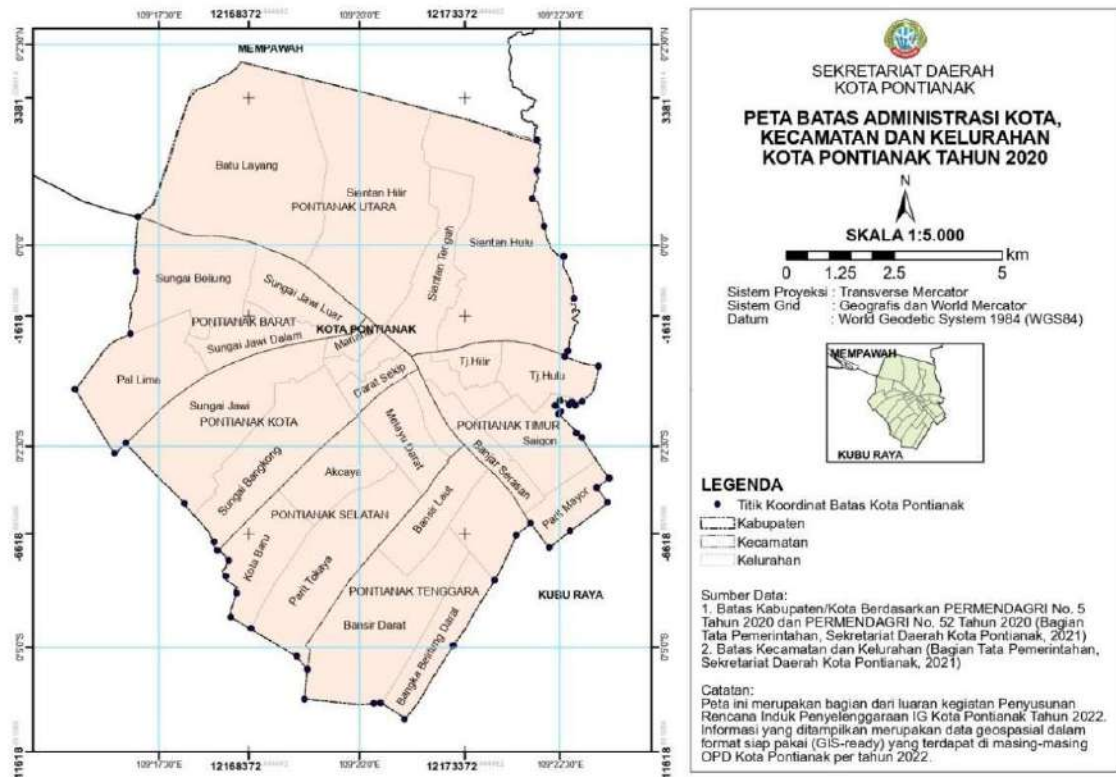
Kecamatan	Luas (km ²)
Pontianak Barat	16,383
Pontianak Kota	16,016
Pontianak Selatan	16,524
Pontianak Tenggara	16,127
Pontianak Timur	12,061
Pontianak Utara	41,097
Kota Pontianak	118,209

Sumber: Kota Pontianak dalam Angka 2024, BPS Kota Pontianak

Adapun batas wilayah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- Bagian Selatan : Desa Pal IX dan Desa Punggur kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.
- Bagian Timur : Desa Mega Timur dan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan Desa Kapur dan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Barat : Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.
- Bagian Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Berikut ini merupakan peta dasar dan peta administrasi Kota Pontianak:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pontianak
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak , 2022

2. Topografi

Topografi adalah kenampakan alami maupun kultural di permukaan bumi. Wilayah Kota Pontianak seluruhnya terletak pada ketinggian 0,8 – 1,5 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lahan berkisar 0 – 2 persen. Dengan ketinggian permukaan wilayah tersebut maka Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai sehingga mudah tergenang. Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman air antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter.

3. Geologi

Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi (bawah permukaan) maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Kondisi Geologi di Kota Pontianak adalah berjenis Talus Deposit. Talus berarti pergeseran tanah atau semacam rayapan tanah dari atas ke bawah yang terjadi akibat gaya gravitasi, sedangkan deposit berarti merupakan akumulasi atau kumpulan yang terjadi akibat penumpukan atau sedimentasi, sehingga dapat disimpulkan apabila talus deposit merupakan kumpulan tanah yang terbentuk akibat dari aktivitas sedimentasi. Endapan/sedimentasi disinyalir terjadi karena Kota Pontianak merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibagi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Selain itu, Kota Pontianak memiliki wilayah gambut dengan klasifikasi gambut berkanal (Zona Budidaya), kubah gabut berkanal (Zona Lindung), dan kubah gambut tidak berkanal (zona lindung). Berikut ini merupakan sebaran gambut di kota pontianak.

Tabel 2.2 Sebaran Gambut Kota Pontianak

Klasifikasi	Kecamatan	Luas (Ha)
Gambut Berkanal (Zona Budidaya)	Pontianak Kota	90,83
	Pontianak Selatan	1,58
	Pontianak Tenggara	5,14
	Pontianak Timur	344,14
	Pontianak Utara	1.337,81
Kubah Gambut Berkanal (Zona Lindung)	Pontianak Selatan	0,13
	Pontianak Tenggara	652,24
Kubah Gambut Tidak Berkana	Pontianak Tenggara	22,2
Total		2454,08

Sumber: Revisi RTRW Kota Pontianak Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, kecamatan yang memiliki luasan lahan gambut terbesar adalah di Kecamatan Pontianak Utara dengan luas 1.337,81 Ha. Luasan terbesar selanjutnya adalah di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Dengan demikian pengembangan di kawasan ini harus memperhatikan kemampuan lahannya.

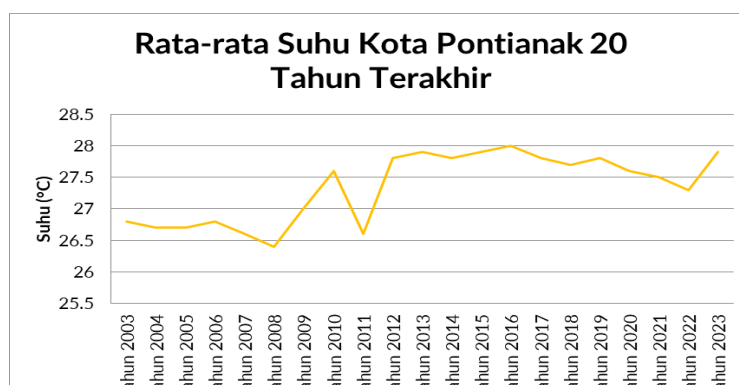
4. Hidrologi

Hidrologi secara Umum adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air.

Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh sistem jaringan drainase regional yang terbentuk oleh 3 sungai besar yakni Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Jumlah sungai dan parit di wilayah Kota Pontianak adalah sebanyak 61 sungai/parit yang sebagian masih dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Adapun dalam sistem drainase regional terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka di bagian selatan yang dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Beliuang, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

5. Klimatologi

Klimatologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang iklim, cara kerja sistem iklim, variasi dan penyimpangannya, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia.



Grafik 2.1 Perubahan Rata-Rata Suhu Kota Pontianak Tahun 2003-2023

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2004-2024

Kota Pontianak mempunyai temperatur rata-rata berkisar 27,9°C dengan temperatur minimum rata-rata 23,4°C dan temperatur maksimum rata-rata 34,6°C. Rata-rata kelembaban udara 82% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 87% dan kelembaban udara paling rendah 79% pada bulan Juli hingga September. Di sisi

lain, jumlah hari hujan terbanyak adalah pada bulan Maret yakni sebanyak 24 hari dengan curah hujan sebanyak 153 mm, dan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember yaitu 351 mm.

Sementara itu, kondisi klimatologi dalam dua puluh tahun terakhir telah mengalami perubahan. Kota Pontianak telah mengalami peningkatan suhu $\pm 1^{\circ}\text{C}$ dalam 20 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan suhu rata-rata di tahun 2003 sampai tahun 2008 berada di angka $26,4^{\circ}\text{C} - 26,8^{\circ}\text{C}$, sedangkan temperatur rata-rata di tahun 2019 -2023 berada di angka $27,3^{\circ}\text{C} - 27,9^{\circ}\text{C}$. Berbeda dengan suhu yang cenderung meningkat, rata-rata curah hujan di Kota Pontianak cenderung stabil dalam 20 tahun terakhir, yaitu di angka 212 - 322 mm. Sebagaimana grafik yang menggambarkan suhu dan curah hujan Kota Pontianak dalam 20 tahun terakhir diatas.

B. Peran Strategis Daerah

Peran strategis Kota Pontianak dalam konteks regional Provinsi Kalimantan Barat



Grafik 2.2 Perubahan Rata-Rata Curah Hujan Kota Pontianak Tahun 2003-2023

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2004-2024

secara umum digariskan dalam kebijakan perwilayahan yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan akan banyak mengubah konstelasi wilayah Kota Pontianak.

Fungsi dan peran Kota Pontianak sebagai berikut:

a. Kota Pontianak sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)

Kota Pontianak sebagai PKN dengan fungsi dan peran sebagai berikut:

- Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
- Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
- Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
- Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
- Sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
- Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
- Fungsi dan peran kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke wilayah provinsi Kalimantan Barat.

b. Kota Pusat Kegiatan Ekonomi

Sebagai pusat kegiatan ekonomi kota Pontianak berperan sebagai berikut:

- Kota Pontianak sebagai pendorong daerah sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan ruang untuk memberikan jasa



pelayanan untuk memwadahi kegiatan terkait dengan sektor unggulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sektor unggulan maupun industri pengolahan tanaman pangan/perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).

- Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat, dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dari Pontianak tersebut terdiri dari Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang.

c. Kota Pusat Pemerintahan

Kota Pontianak berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pemerintah provinsi, ini ditandai dengan kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan landmark Kantor Gubernur sehingga Kota Pontianak disebut sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai Wilayah Administrasi Kota yang terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan, maka terdapat perkantoran pemerintah kota, perkantoran pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi pusat pelayanan administrasi di kecamatan dan Kelurahan di wilayah administrasi Kota Pontianak.

d. Kota Pusat Kegiatan Sosial Budaya

- Pusat Pendidikan
- Pusat kegiatan Kebudayaan
- Pusat Fasilitas Masyarakat

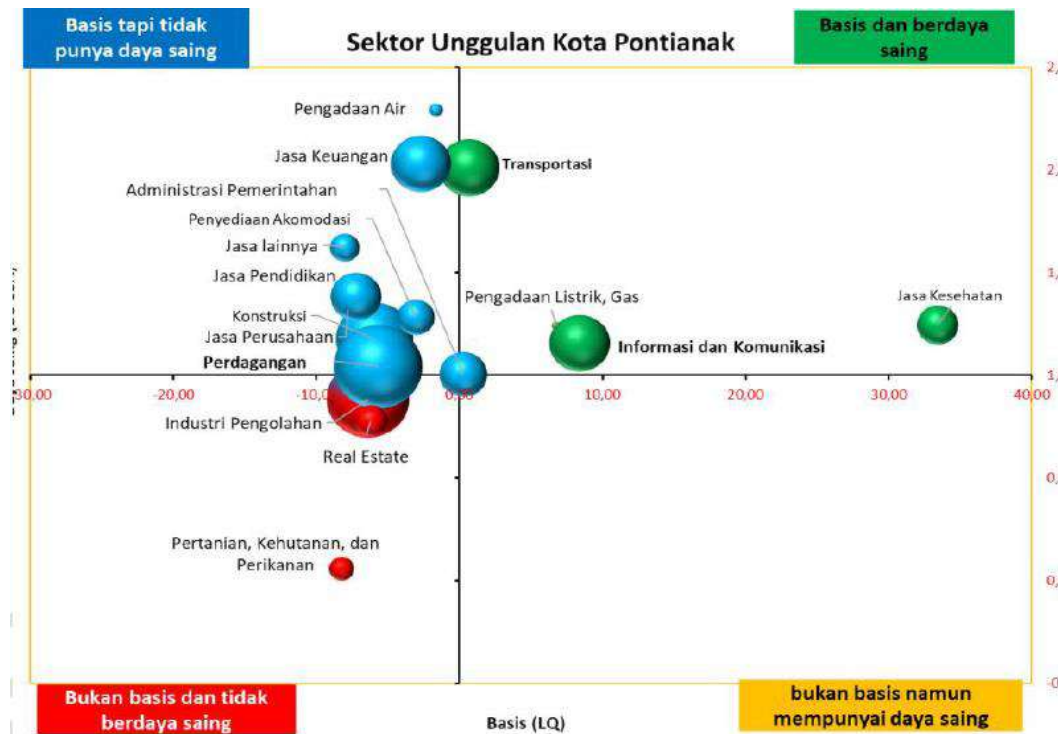
e. Kota Pusat Permukiman

C. Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Ekonomi Wilayah

Dalam pengembangan wilayah Kalimantan Barat Kota Pontianak masuk didalam kluster 1 bersama dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah karena memiliki posisi geografis yang berdekatan, dan memiliki potensi ekonomi strategis. Kawasan prioritas pada kluster satu terdiri dari: Kawasan Metropolitan Pontianak, Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kubu Raya, KHK Fungsi Lindung, KPPN Sandaniang dan KPPN Rasau, dimana pusat kluster satu berada di Kota Pontianak.

Kota Pontianak memiliki sektor keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai basis dan berdaya saing berupa sektor jasa kesehatan, transportasi, informasi dan komunikasi, selain dari sektor jasa (keuangan, pendidikan, perusahaan, jasa lainnya) dan perdagangan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan administrasi pemerintahan yang menjadi sektor basis sehingga berpotensi sebagai pendorong ekonomi daerah. Sebagaimana pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.3 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kota Pontianak
Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Kluster 1 diarahkan menjadi pusat industri dan jasa regional berdaya saing yang menghubungkan wilayah Indonesia Barat dan ASEAN, dengan *highlights* kebijakan wilayah terdiri dari:

1. Pengembangan pelayanan kesehatan modern.
2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditas kelapa sawit, karet, hasil hutan, bahan tambang, perikanan yang berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.
3. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti kosmetik, protein nabati, dan mangrove.
4. Pengembangan smart government serta pengutan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah.
5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah.
6. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya.
7. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi Kalimantan Barat.
8. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finance.

2. Potensi Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2023 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pontianak, potensi berdasarkan struktur ruang dan pola ruang adalah sebagai berikut:

a. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.



Sistem pusat pelayanan Kota Pontianak direncanakan terdiri atas 1 (satu) pusat pelayanan kota dan 10 (sepuluh) sub pusat pelayanan kota. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Pusat Kota Eksisting saat ini berada pada kawasan perdagangan dan jasa Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota. Apabila ditarik radius pelayanan sejauh 3 km dari Rencana Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Pontianak, maka seluruh Kecamatan di Kota Pontianak terjangkau.

Pusat Pelayanan Kota (PPK) ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah Utara agar perkembangan kota antara bagian Selatan dan Utara dapat lebih merata. Pengembangan Kawasan Primer atau kawasan pusat pelayanan kota (PPK) juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap satu bagian kawasan PPK. Pengembangan sub-sub pusat pelayanan kota (SPK) pada setiap Wilayah Pengembangan berfungsi sebagai penyangga PPK, dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota. Penyebaran sub-sub pusat pelayanan kota (SPPK) juga dimaksudkan untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarbagian wilayah kota.

Secara geografis pusat primer baru pada wilayah utara Kota Pontianak namun tetap bersinergi/berkaitan dengan pusat dan sub pusat yang telah ada. Pusat baru ini berperan menunjang eksistensi kota yang telah ada/berkembang, karena itu harus didukung oleh sistem transportasi yang andal untuk mobilitas ulang-alik antara pusat baru dengan pusat lama.

Sistem pusat kegiatan yang akan dikembangkan sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dengan wilayah Pelayanan Seluruh Kota atau ditambah beberapa kabupaten atau seluruh Provinsi.

Kebijakan dasar pengembangannya adalah modifikasi antara urban renewal dan urban development. Pusat Pelayanan Kota diarahkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perdagangan dan jasa
- b. Perkantoran
- c. Pariwisata skala regional
- d. Simpul transportasi regional
- e. Perumahan kepadatan tinggi

Adapun Kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Pusat Pelayanan Kota meliputi:

- a. Kawasan jalan Kom. Yos Sudarso – Pelabuhan TPI Kota dan jalan Hasanudin–jalan H. Rais. A Rachman dan sekitarnya meliputi Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan Sungai Jawi Luar dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa skala kota, perumahan berkepadatan tinggi, serta simpul transportasi regional.
- b. Kawasan mulai jalan Pak Kasih, jalan Rahadi Usman, jalan Tanjung Pura dan jalan gajahmada dan sekitarnya meliputi Kelurahan Mariana, Tengah, Darat Sekip, sebagian Kelurahan Benua Melayu Darat dan Benua Melayu Laut dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan grosir, pusat perdagangan dan jasa komersial skala kota, simpul transportasi regional, pusat wisata kota serta pusat pemerintahan kota;
- c. Sebagian Koridor A. Yani yang meliputi sebagian Kelurahan Akcaya, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kelurahan Benua Melayu Darat, sebagian Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, sebagian Kelurahan Bansir Laut,



Kecamatan Pontianak Tenggara dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan eceran skala kota, dan pusat pendidikan tinggi.

- d. Sebagian koridor jalan Sultan Hamid – jalan Sultan Hamid II yang meliputi Kelurahan Dalam Bugis, Kelurahan Tambelan Sampit, Kelurahan Tanjung Hulu, sebagian Kelurahan Banjar Serasan, sebagian Kelurahan Saigon, dan sebagian Kelurahan Tanjung Hulu sebagai Pariwisata Skala Regional, dan Perumahan Kepadatan Tinggi.
- e. Kawasan Pasar Siantan di Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah dan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara pusat perdagangan dan jasa skala kota dan perindustrian.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)

Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sebagian wilayah kota atau beberapa kecamatan. Kebijakan dasar pengembangannya adalah modifikasi antara urban renewal dan urban development.

Sub Pusat Pelayanan Kota diarahkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pasar skala bagian wilayah kota, seperti Pasar Tradisional, Pertokoan dan supermarket dan atau
- Pemerintahan dan perkantoran skala kota atau bagian wilayah kota dan atau
- Jasa umum dan atau
- Fasilitas peribadan dan olahraga skala kota
- Dilengkapi dengan Lahan Parkir umum dan taman yang memadai.

Adapun Kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Sub PPK I di Kelurahan Benua Melayu Darat dan Benua Melayu Laut (Koridor Imam Bonjol) Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
 - 1) Pusat perdagangan skala kota,
 - 2) Pusat pemerintahan kecamatan
 - 3) Simpul transportasi regional
 - 4) Pendidikan menengah – tinggi
 - 5) Budaya dan olah raga
 - 6) Pelayanan kesehatan
 - 7) Permukiman kepadatan padat – sedang
- b. Sub PPK II di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Akcaya, Kelurahan Kota Baru (Koridor Sutan Syahrir) dan sebagian kecil Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, memiliki fungsi fungsi yang meliputi;
 - 1) Pusat perdagangan skala kota
 - 2) Perkantoran
 - 3) Budaya dan olah raga
 - 4) Pendidikan menengah dan tinggi
 - 5) Pelayanan kesehatan
 - 6) Permukiman kepadatan sedang-tinggi
- c. Sub PPK III di Kelurahan Sungai Jawi, Kelurahan Tengah, Kelurahan Mariana, Kelurahan Darat Sekip dan sebagian Kelurahan Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat (Koridor H. Rais Abdur Rahman, Kom. Yos Sudarso, Khw. Hasyim dan sekitarnya), memiliki fungsi-fungsi yang meliputi:



- 1) Perdagangan dan jasa skala perkotaan
 - 2) Pendidikan
 - 3) Pelayanan kesehatan
 - 4) Permukiman kepadatan sedang-tinggi
 - 5) Perkantoran
- d. Sub PPK IV di di kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat(Kawasan Pasar Teratai) memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
- 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pendidikan menengah dan tinggi
 - 3) Pelayanan kesehatan
 - 4) Permukiman kepadatan rendah – sedang
 - 5) Perkantoran
- e. Sub PPK V di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara (Koridor Jalan 28 Oktober) memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
- 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pendidikan menengah dan tinggi
 - 3) Pelayanan kesehatan
 - 4) Permukiman kepadatan rendah – sedang
 - 5) Perkantoran
- f. Sub PPK VI di Kelurahan Siantan Hilir dan sebagian Kelurahan Batulayang (Kawasan bagian utara) Kecamatan Pontianak Utara memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
- 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Simpul transportasi regional
 - 4) Pelayanan kesehatan dan pendidikan
 - 5) Permukiman kepadatan rendah – sedang
 - 6) Perkantoran
- g. Sub PPK VII Kelurahan Dalam Bugis dan kelurahan Saigon (Koridor Jalan Panglima Aim) Kecamatan Pontianak Timur memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
- 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Pelayanan kesehatan dan pendidikan
 - 4) Permukiman kepadatan rendah – sedang
 - 5) Perkantoran
- h. Sub PPK VIII Kelurahan Bangka Belitung Laut (Koridor Jalan Dr. Soedarso) Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
- 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pelayanan kesehatan regional
 - 3) Pelayanan pendidikan tinggi
 - 4) Permukiman kepadatan rendah – sedang
 - 5) Perkantoran
- i. Sub PPK IX Kelurahan Sungai Jawi (Jalan Ampera, sekitar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kota Pontianak) Kecamatan Pontianak Kota memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
- 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pelayanan pendidikan menengah-tinggi
 - 3) Permukiman kepadatan rendah – sedang
 - 4) Perkantoran



- j. Sub PPK X Kelurahan Pal Lima (jalan Tabrani Ahmad – jalan Karet) Kecamatan Pontianak Barat memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
 - 1) Perdagangan dan jasa kelurahan/kecamatan
 - 2) Pelayanan kesehatan dan pendidikan
 - 3) Permukiman kepadatan sedang-tinggi
 - 4) Perkantoran

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan terdekat dari kelompok permukiman, dapat berupa simpul perdagangan, pendidikan, pelayan umum dan lain-lain. Pusat Pelayanan Lingkungan melayani satu kecamatan atau beberapa kelurahan. Pusat Pelayanan Lingkungan diarahkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan perdagangan dan jasa umum skala kecamatan dan atau kelurahan dan atau
- Kegiatan pelayanan umum skala kecamatan dan atau
- Fasilitas peribadan, olahraga, dan rekreasi skala kecamatan
- Dilengkapi dengan Lahan Parkir umum dan taman yang memadai

Adapun Kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan sekitar jalan Sungai Raya Dalam Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara;
- b. Kawasan Sekitar Kantor Camat Pontianak Tenggara sampai Sungai Raya Dalam Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara;
- c. Kawasan Perdana di Sekitar Komplek Bali Agung Dua terletak di Kelurahan Parit Tokaya dan Bansir Laut;
- d. Kawasan Sekitar jalan Purnama Antara Jalan Karya Tani dan Jalan Wonobaru yang terletak dikelurahan Akcaya dan Kelurahan Parit Tokaya;
- e. Kawasan Sekitar Jalan Ahmad Yani dan Jalan. MT Haryono yang terletak anyata Kelurahan Benua Melayu Darat dan Kelurahan Akcaya;
- f. Kawasan Sekitar jalan Prof. M Yamin dan jalan Ampera terletak diantara Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Sungai Bangkong;
- g. Kawasan simpang empat antara jalan Dr. Wahidin, jalan Danau Sentarum, jalan Dr. Sutomo, dan jalan Pangeran Nata Kusuma Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
- h. Kawasan Sekitar Jalan Aliyang-Gusti Hamzah Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- i. Kawasan Sekitar jalan Dr. Wahidin dan jalan Ujung Panjang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
- j. Kawasan Sekitar jalan Berdikari dan jalan Bukit Batu di Kelurahan Pal Lima;
- k. Kawasan sekitar Jalan RE. Martadinata dan jalan Jeranding Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- l. Kawasan perbatasan antara Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat di Jalan Nipah Kuning Dalam;
- m. Kawasan Sekitar Terminal Nipah Kuning Kelurahan Sungai Beliung Barat;
- n. Kawasan Sekitar Perguruan Tinggi Universitas Panca Bakhti di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat;
- o. Kawasan sekitar jalan Ahmad Yani–Jalan Khatulistiwa Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara;
- p. Kawasan Sekitar Jalan Panca Bakti di Kelurahan Batu Layang;
- q. Kawasan sekitar jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Hilir;
- r. Kawasan sekitar jalan Parwasal dan Parit Tepekong terletak diantara Kelurahan Siantan Tengah dan Siantan Hilir;

- s. Koridor jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- t. Kawasan sekitar jalan Selat Panjang – jalan Raya Mega Timur Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- u. Kawasan Sekitar Jalan Sultan Hamid II kawasan dekat Jembatan Landak, diantara Kelurahan Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur;
- v. Kawasan Sekitar Jalan Tanjung Raya I, sekitar SMPN 4 Pontianak, Kelurahan Dalam Bugis dan Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur
- w. Kawasan Sekitar Jalan Tanjung Raya II – jalan Panglima Aim terletak diantara Kelurahan Tambelan Sampit, Kelurahan Saigon, Kelurahan Banjar Serasan dan Kelurahan Dalambugis;
- x. Kawasan Sekitar jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur.

b. Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun Rekapitulasi dari luasan tiap zona pada Rencana Pola Ruang Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Luas Rencana Pola Ruang Kota Pontianak 2024–2044

Zona/Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Perdagangan dan Jasa	1706,63
Kawasan Campuran	96,08
Kawasan Perkantoran	146,47
Kawasan Peruntukan Industri	166,56
Kawasan Perumahan	6305,09
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	495,31
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	17,98
Kawasan Pariwisata	45,94
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	5,60
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	8,05
Kawasan Transportasi	19,02
Badan Jalan	508,71
Kawasan Hortikultura	662,15
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	1,40
Kawasan Lindung Gambut	242,12
Kawasan Perlindungan Setempat	84,08
Kawasan Cagar Budaya	2,16
Badan Air	701,30
Pemukaman	96,68
Taman Kecamatan	9,57
Taman Kelurahan	16,04
Taman Kota	477,17
Taman RT	4,26
Total	11.820,9

Sumber: Revisi RTRW Kota Pontianak Tahun 2023

Waterfront Development

Waterfront Development merupakan konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “*waterfront*” dalam Bahasa Indonesia secara harfiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan. Sedangkan, *urban waterfront* mempunyai arti suatu lingkungan perkotaan yang berada di tepi atau dekat wilayah perairan, misalnya lokasi di area pelabuhan besar di kota metropolitan (Wrenn dalam Bappeda, 2020). *Waterfront development* bisa diarahkan ke tujuh pengembangan yaitu sebagai



kawasan komersial; kawasan budaya, pendidikan dan lingkungan hidup; kawasan peninggalan bersejarah; kawasan pariwisata/rekreasi; kawasan pemukiman; kawasan pelabuhan dan transportasi; serta kawasan pertahanan dan keamanan.

Sebagai wilayah yang memiliki sungai besar seperti Sungai Kapuas, Kota Pontianak memiliki kekuatan dan peluang untuk mengeksplorasi keunikan tersebut. Area *waterfront* membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terutama jika memanfaatkan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Untuk mencapai pelayanan yang lebih baik, pendapatan pariwisata dapat dialokasikan untuk pengembangan kemampuan masyarakat pengelola dengan meningkatkan jenis usaha atau atraksi budaya yang ditampilkan. Selain itu, kegiatan penanaman nilai-nilai kelestarian lingkungan perlu digalakkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Potensi Energi Terbarukan

Energi terbarukan dianggap sebagai energi hijau atau energi bersih karena menghasilkan sedikit zat buang atau bahkan tidak menghasilkan zat buang. Energi baru dan terbarukan tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangannya, yaitu dalam aspek skala dan jangka waktu. Saat ini energi terbarukan sebagai energi alternatif berhasil ditunjukkan pada skala kecil dan waktu tertentu atau *intermittent*.

Berdasarkan hasil Kajian Potensi PAD dari Pemanfaatan Energi Terbarukan di Kota Pontianak tahun 2023, terdapat tiga energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan yaitu tenaga surya, sampah, dan biogas.

a. Tenaga Surya

Energi listrik dapat dibangkitkan dengan mengubah sinar matahari melalui sebuah proses yang dinamakan *photovoltaic (PV)*. *Photovoltaic cell* dibuat dari material semikonduktor terutama silikon yang dilapisi oleh bahan tambahan khusus. Jika cahaya matahari mencapai cell maka elektron akan terlepas dari atom silikon dan mengalir membentuk sirkuit listrik sehingga energi listrik dapat dibangkitkan. Sel surya didesain untuk mengubah cahaya menjadi energi listrik sebanyak banyaknya dan dapat digabung secara seri atau paralel untuk menghasilkan tegangan dan arus yang diinginkan. Kondisi iklim (misal awan dan kabut) mempunyai efek yang signifikan terhadap jumlah energi matahari yang diterima sel sehingga akan mempengaruhi kinerjanya.

Meskipun begitu, terdapat kekurangan dari pemanfaatan energi surya, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk panel surya mahal. Semakin luas panel surya yang dipasang, maka semakin besar pula energi panas yang berhasil diserap dan diubah menjadi listrik. Hal ini dikarenakan setiap panel surya memiliki keterbatasan penyerapan energi panas sesuai luas penampang yang dimiliki. Selain itu, panas matahari hanya ada di musim tertentu, yaitu musim kemarau, sehingga pemanfaatan energi surya tidak optimal di musim hujan.

b. Sampah

Salah satu teknologi yang bisa diterapkan di Kota Pontianak untuk mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT) adalah gasifikasi plasma. Hasil perhitungan didapat untuk 1 ton sampah menghasilkan energi listrik sebesar 787,5371 kWh. Dengan jumlah sampah yang dapat mencapai 683,82 ton/hari pada tahun 2023 di Kota Pontianak maka dapat dibangkitkan daya sebesar 21,85 MW, dan energi listrik yang dihasilkan sebesar 196.564,77 MWh/tahun.

Dari hasil perhitungan selama 6 (enam) tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.378.269,2 ton sampah Kota Pontianak dapat menghasilkan energi listrik sebesar 1.085.438,10 MWh. Sehingga estimasi



penjualan energi listrik akan mencapai Rp. 1.622.729.961.326,79. Potensi ini sangat besar mengingat kondisi saat ini sampah tidak mempunyai nilai ekonomis dan membutuhkan biaya yang besar dalam pengelolaannya.

c. Biogas

Dari hasil kajian teknis dan ekonomis PLT Biogas dengan memanfaatkan limbah kotoran manusia di Kota Pontianak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 berjumlah 618.388 jiwa, dapat menghasilkan biogas dengan volume 3.091,94 m³/hari, produksi gas metan sebesar 2.164,36 m³/hari, potensi energi listrik sebesar 24.157,88 kWh/hari, dan daya listrik sebesar 1.007,33 kW.
- PLT Biogas dengan menggunakan microturbine generator 250 kW, efisiensi 30%, dan power factor 0,8 menghasilkan energi listrik sebesar 5.797,9 kWh/hari atau dengan daya 241,6 kW.
- Untuk pembangunan PLT Biogas ini diperlukan biaya investasi sebesar Rp. 41.536.395.000, biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) per tahun sebesar Rp. 1.459.806.500, dengan biaya pemasukan hasil penjualan listrik dan *sludge*/pupuk organik per tahun sebesar Rp. 9.863.005.493.

Melalui proses fermentasi anaerobik, sampah organik rumah makan dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku produksi biogas. Biogas tersebut dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif pengganti LPG untuk memasak. Dari hasil analisis di atas, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai pemanfaatan sampah organik rumah makan di Kota Pontianak antara lain:

- Dengan rata-rata produksi sampah organik rumah makan sebesar 43,56 kg/hari menghasilkan biogas sebesar 7,41 m³/hari.
- Dalam analisis ekonomi pemanfaatan sampah organik rumah makan di Kota Pontianak menjadi biogas sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG sangat menguntungkan dan layak untuk didirikan, dimana *profit on sales* sebesar 37,82%, *return on investment* sebesar 76,40%, *pay out time* selama 14 bulan, dan *break event point* sebesar 28,23%.

D. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Penggunaan Lahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah menyebutkan bahwa "Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil".

Sehubungan dengan penggunaan tanah dan pemanfaatannya di wilayah Kota Pontianak di bagi menjadi 3 kelas kemampuan lahan, yakni:

1. Kelas Kemampuan Lahan B atau Kelas Kemampuan Lahan Rendah (0,06% lahan Kota Pontianak).
2. Kelas Kemampuan Lahan C atau Kelas Kemampuan Lahan Sedang (66,22% lahan Kota Pontianak).
3. Kelas Kemampuan Lahan D atau Kelas Kemampuan Lahan Agak Tinggi (33,72% lahan Kota Pontianak).

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kota Pontianak

No	Jenis Penggunaan Lahan	2017 (ha)	Jenis Penggunaan Lahan	2023 (ha)
1.	Permukiman	3.975,15	Permukiman	3.970,41
2.	Perdagangan dan Jasa	696,08	Perdagangan dan Jasa	667,49
3.	Perkantoran Pemerintah dan Pelayanan Umum	113,26	Fasilitas Pemerintahan	123,19
4.	Militer	17,04	Hankam	28,66
5.	Industri dan Pergudangan	266,1	Industri dan Pergudangan	301,98
6.	Pariwisata, Rekreasi, dan Seni Budaya	72,06	Fasilitas Kebudayaan dan Pariwisata	13,45
7.	Pertanian Peternakan	926,21	Pertanian	3,32
8.	Fasilitas Kesehatan	35,27	Peternakan	4,49
9.	Fasilitas Pendidikan	295,41	Perikanan	0,71
10.	Fasilitas Peribadatan	27,23	Fasilitas Kesehatan	31,8
11.	Fasilitas Sosial	3,73	Fasilitas Pendidikan	299,56
12.	Lapangan Olahraga	69,25	Fasilitas Peribadatan	59,24
13.	Pemakaman Umum	57,52	Fasilitas Sosial	3,73
14.	Taman	390,68	Lapangan Olahraga	81,09
15.	SPBU	358,09	Pemakaman	64,69
16.	Pembangkit Listrik	6,05	Taman	8,97
17.	Prasarana Transportasi/Terminal	5,93	Taman Kota	5,1
18.	Pelabuhan	46,55	Terminal	6,48
19.	Tempat Pengolahan Akhir Sampah	16,91	Pelabuhan	21,3
20.	Semak	2.758	Persampahan	1,04
21.	Sungai	645	TPA Sampah	15,3
22.			Kawasan Pelestarian Alam	2.457,07
23.			Sungai	631,88
24.			Kawasan Sentral Agribisnis	1.376,20
25.			Lahan Kosong	1.577,22
26.			Ladang	58,42
27.			Perkebunan	8,12
Jumlah		10.781,5		11.820,9

Sumber: Revisi RTRW Kota Pontianak tahun 2023

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan lahan yang dapat dikembangkan adalah lahan kosong, ladang, perkebunan, dengan luas sebesar 13,91% terhadap luas wilayah.

2. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup digambarkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Berhubung Kota Pontianak tidak berbatasan dengan laut, maka tidak ada penghitungan Indeks Kualitas Air Laut.

Berikut ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak diterbitkan:

Tabel 2.5 Capaian IKLH Kota Pontianak Tahun 2019–2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50,00	55,56	56,05	59,84	51,40
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,82	79,91	85,75	85,68	81,76
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,62	33,55	29,52	27,64	37,75
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,094	60,60	62,27	63,25	60,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada 60,71 dengan kategori sedang (nilai antara 50–70, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Penurunan capaian IKLH Tahun 2023 disebabkan oleh penurunan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

3. Kualitas Air Permukaan

Titik pemantauan terhadap kualitas air permukaan dilakukan pada 3 titik yaitu Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Parameter yang dikaji pada buku ini adalah parameter kunci yang terdiri dari TDS, TSS, BOD, COD, DO dan Total Phospat. Untuk mengetahui tingkat pencemaran berdasarkan hasil uji tersebut dapat diperhitungan nilai indeks pencemar air.

Tabel 2.6 Indeks Pencemar Sungai Landak

No	Parameter	Kode	Satuan	Li	Ci	Ci/Li	Ci/Li baru
				BM Kls 1			
1	Zat Padat terlarut	TDS	mg/L	1000	64.55	0.065	0.065
2	Zat padat tersuspensi	TSS	mg/L	40	49.33	1.233	1.455
3	Phosfat	PO ₄	mg/L	1	0.26	0.260	-1.925
4	Oksigen Terlarut	DO	mg/L	6	4.11 1.86	0.685	0.310
5	Oksigen Kimia	COD	mg/L	10	29.18	2.678	3.139
6	Oksigen Biokimia	BOD	mg/L	2	39.19	0.480	-0.594
(Ci/Li)R					0.408		
(Ci/Li)M					3.139		
IP					2.238		
KATEGORI					Tercemar Ringan		

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025–2045

Tabel 2.7 Indeks Pencemar Sungai Kapuas Kecil

No	Parameter	Kode	Satuan	Li	Ci	Ci/Li	Ci/Li baru
				BM Kls 1			
1	Zat Padat terlarut	TDS	mg/L	1000	36.22	0.036	0.036
2	Zat padat tersuspensi	TSS	mg/L	40	26.33	0.658	0.092
3	Phosfat	PO4	mg/L	1	0.08	0.082	-4.431
4	Oksigen Terlarut	DO	mg/L	6	5.33	1.30	0.888
5	Oksigen Kimia	COD	mg/L	10	20.88	2.088	2.599
6	Oksigen Biokimia	BOD	mg/L	2	0.62	0.312	-1.533
(Ci/Li)R					-0.503		
(Ci/Li)M					2.599		
IP					1.872		
KATEGORI					Tercemar Ringan		

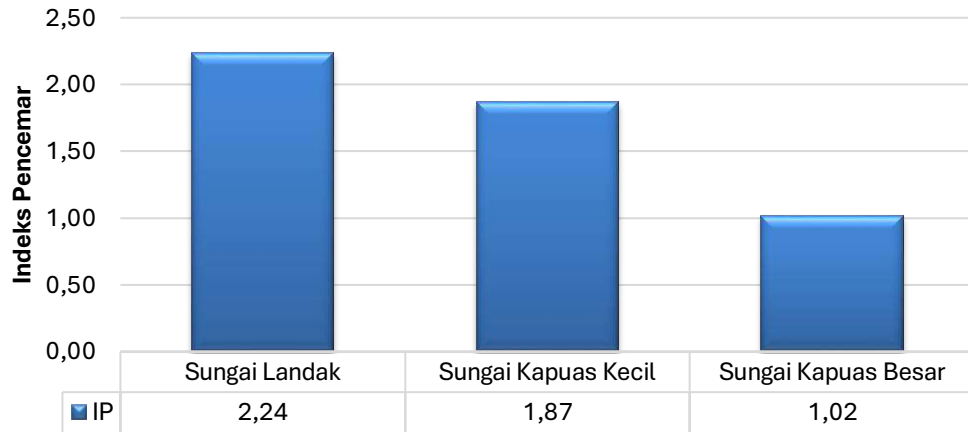
Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Tabel 2.8 Indeks Pencemar Sungai Kapuas Besar

No	Parameter	Kode	Satuan	Li	Ci	Ci/Li	Ci/Li baru
				BM Kls 1			
1	Zat Padat terlarut	TDS	mg/L	1000	47.20	0.047	0.047
2	Zat padat tersuspensi	TSS	mg/L	40	21.89	0.547	-0.309
3	Phosfat	PO4	mg/L	1	0.12	0.120	-3.604
4	Oksigen Terlarut	DO	mg/L	6	2.78	2.46	0.463
5	Oksigen Kimia	COD	mg/L	10	12.00	1.200	1.396
6	Oksigen Biokimia	BOD	mg/L	2	1.23	0.615	-0.056
(Ci/Li)R					-0.353		
(Ci/Li)M					1.396		
IP					1.018		
KATEGORI					Tercemar Ringan		

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Berikut adalah rekapitulasi perhitungan indeks pencemar kualitas air di 3 lokasi berdasarkan hasil pengamatan tersebut:

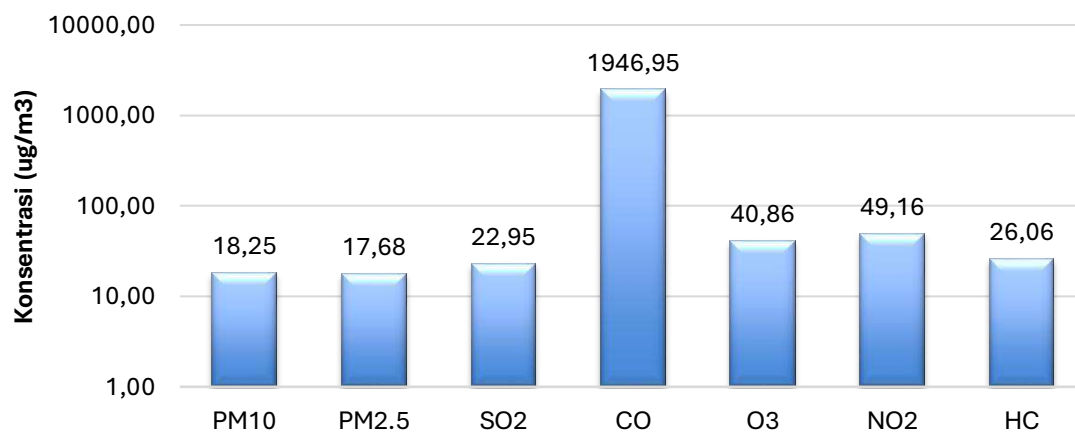


Grafik 2.4 Rekapitulasi Nilai Indeks Pencemar Berdasarkan Hasil Pengukuran
Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pencemaran sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar pada kategori tercemar ringan (IP 1-5, berdasarkan Kepmen LH No.115 Tahun 2007).

4. Kualitas Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara di Kota Pontianak dilakukan dengan menggunakan alat Air Quality Monitoring System (AQMS). Parameter yang diukur oleh AQMS ini adalah PM10, PM2.5, SO2, CO, O3, NO2, HC. Hasil pengukuran masing-masing dari konsentrasi tersebut:



Grafik 2.5 Konsentrasi Seluruh Parameter Rata-rata Tahunan Kota Pontianak Tahun 2022

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Konsentrasi udara rata-rata tahunan di Kota Pontianak pada parameter PM 10, PM 2.5 dan O3 berada di atas baku mutu udara ambien berdasarkan lampiran 7 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Sumber pencemar untuk 3 konsentrasi ini adalah transportasi serta aktivitas industri yang menghasilkan emisi.

5. Kondisi Persampahan

Dalam upaya pengelolaan persampahan di Kota Pontianak, terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu persentase penanganan sampah, persentase pengurangan sampah dari sumbernya, dan persentase sampah yang dikelola. Berikut ini adalah capaian indikator mengenai persampahan di Kota Pontianak.

Tabel 2.9 Capaian Indikator Persampahan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penanganan Sampah	%	92,11	77,92	75,94	73,47	75,62
2	Persentase Pengurangan Sampah dari Sumbernya	%	5,51	8,30	22,66	23,51	24,35
3	Persentase Sampah yang Dikelola	%	97,62	86,22	98,61	96,98	99,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian persentase sampah yang ditangani di Kota Pontianak menurun karena seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat pada pengurangan sampah dari sumbernya. Sehingga, pengelolaan sampah yang merupakan gabungan dari kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengurangan sampah dari sumbernya yang dilakukan oleh masyarakat semakin membaik.

6. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan gambaran indeks ketahanan pangan Kota Pontianak dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.10 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Pontianak Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	65,83	63,08	66,57	64,81	71,15

Sumber : Dinas Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Pontianak, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui kondisi ketahanan pangan Kota Pontianak pada tahun 2023 sebesar 71,18 dengan kategori baik. Kota Pontianak dalam pemenuhan kebutuhan pangannya dilakukan dengan mendatangkan dari daerah sekitar yang merupakan penghasil pangan, sehingga tidak dipengaruhi oleh iklim. Faktor pendorong peningkatan ketahanan pangan adalah koordinasi intensif dengan Bulog dan swasta untuk menjaga stok pangan sekaligus menjaga stabilitas harga melalui Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi.

7. Daya Dukung Air

Status daya dukung air Kota Pontianak dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan debit andalan Sungai Kapuas. Debit andalan (Q80) merupakan debit yang tersedia di setiap musim. Perhitungan status daya dukung air dilakukan dengan menggunakan data andalan Sungai Kapuas debit (Q80) sebesar 4.804,05 m³/detik (Base Data Ketersediaan Air Kalimantan (Q80) (Puslitbang Sumberdaya Air, Kemen PU), 2016. Debit andalan tersebut kemudian didistribusikan ke dalam sistem grid pada peta. Berikut adalah ketersediaan air di wilayah Kota Pontianak:

Tabel 2.11 Ketersediaan Air Kota Pontianak Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
1	Pontianak Barat	149.232	18.012.922.463,22
2	Pontianak Kota	123.586	20.577.778.460,53
3	Pontianak Selatan	91.138	22.785.421.233,59
4	Pontianak Tenggara	49.159	24.337.996.994,39
5	Pontianak Timur	109.170	15.956.574.176,56
6	Pontianak Utara	147.510	49.830.004.640,03

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ketersediaan air jika debit andalan didistribusi di seluruh kecamatan Kota Pontianak dan diperoleh ketersediaan air dalam 1 tahun di Kota Pontianak adalah 151.500.697.968,32 m³/tahun. Perhitungan kebutuhan air domestik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Kebutuhan Domestik Air Kota Pontianak Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)
1	Pontianak Barat	149.232	12.893.644,82
2	Pontianak Kota	123.586	10.677.830,39
3	Pontianak Selatan	91.138	7.874.323,20
4	Pontianak Tenggara	49.159	4.247.337,59
5	Pontianak Timur	109.170	9.432.288,02
6	Pontianak Utara	147.510	12.744.864,01

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Berdasarkan perhitungan tersebut kebutuhan air domestik Kota Pontianak mencapai 57.870.288,03 m³/tahun. Jika dilihat dari ketersediaan air baku maka dapat dipastikan ketersediaan air di Kota Pontianak cukup untuk mencukupi kebutuhan air tersebut. Berikut adalah kebutuhan Air Non Domestik Kota Pontianak:

Tabel 2.13 Kebutuhan Non Domestik Air Kota Pontianak Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Non Domestik (m ³ /tahun)
1	Pontianak Barat	149.232	4.096.696,97
2	Pontianak Kota	123.586	1.421.650,47
3	Pontianak Selatan	91.138	2.766.787,71
4	Pontianak Tenggara	49.159	4.703.886,57
5	Pontianak Timur	109.170	1.752.363,10
6	Pontianak Utara	147.510	22.569.281,42

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisis tersebut kebutuhan air non domestik Kota Pontianak mencapai 37,310,666.25 m³/tahun. Berikut adalah perhitungan dari status daya dukung air Kota Pontianak Tahun 2022:

Tabel 2.14 Perhitungan Status Daya Dukung Air Kota Pontianak Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Domestik (m ³ /tahun)
1	Pontianak Barat	149.232	18.012.922.463,22	12.893.644,82
2	Pontianak Kota	123.586	20.577.778.460,53	10.677.830,39
3	Pontianak Selatan	91.138	22.785.421.233,59	7.874.323,20
4	Pontianak Tenggara	49.159	24.337.996.994,39	4.247.337,59
5	Pontianak Timur	109.170	15.956.574.176,56	9.432.288,02



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Domestik (m ³ /tahun)
6	Pontianak Utara	147.510,00	49.830.004.640,03	12.744.864,01
Total		669.795	151.500.697.968,32	57.870.288.03

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Analisis Perhitungan Status Daya Dukung Air Kota Pontianak:

Lahan (m ³ /tahun)	Total (m ³ /tahun)	Ambang batas (m ³ /tahun)
4.096.696,97	16.990.341,79	22.644.147,15
1.421.650,47	12.099.480,86	25.830.684,72
2.766.787,71	10.641.110,91	28.559.613,15
4.703.886,57	8.951.224,16	30.460.466,21
1.752.363,10	11.184.651,12	20.040.906,91
22.569.281,42	35.314.145,43	62.390.873,12
37.310.666,25	95.180.954,28	189.926.691,27

Sumber : KLHS RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh bahwa kebutuhan air di Kota Pontianak mencapai 95.180.954,28 m³/tahun. Dengan ketersediaan air di Kota Pontianak maka dapat ditentukan bahwa status daya dukung air Kota Pontianak dalam status belum terlampaui artinya kesediaan air baku masih mencukupi untuk kebutuhan setiap tahunnya.

E. Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Bencana yang berpotensi di Kota Pontianak adalah kekeringan, cuaca ekstrem, banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk ancaman gempa bumi memiliki potensi bahaya rendah dan kecenderungan kejadiannya kecil, maka jenis bahaya tersebut tidak dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Tabel 2.15 Luas Risiko Bencana Kota Pontianak

No	Jenis Bencana	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjir	2.124,47	1.671,69	5.375,86	9.172,02	Sedang
2	Kekeringan	2.516,03	2.296,85	7.008,02	11.820,9	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	2.501,27	63,99	9.255,64	11.820,9	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.410,24	139,25	1.223,5	2.772,98	Sedang

Sumber : KRB Kota Pontianak, 2023-2028

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bencana kekeringan mempunyai kelas resiko tinggi, sedangkan bencana lainnya memiliki kelas resiko sedang.

Tingkat risiko bencana pada Kajian Risiko Bencana Kota Pontianak tahun 2024-2028 didapatkan berdasarkan perolehan bahaya, kerentanan, dan kapasitasnya. Hasil dari penggabungan ketiga komponen tersebut sebagai dasar menentukan tingkat risiko bencana, sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

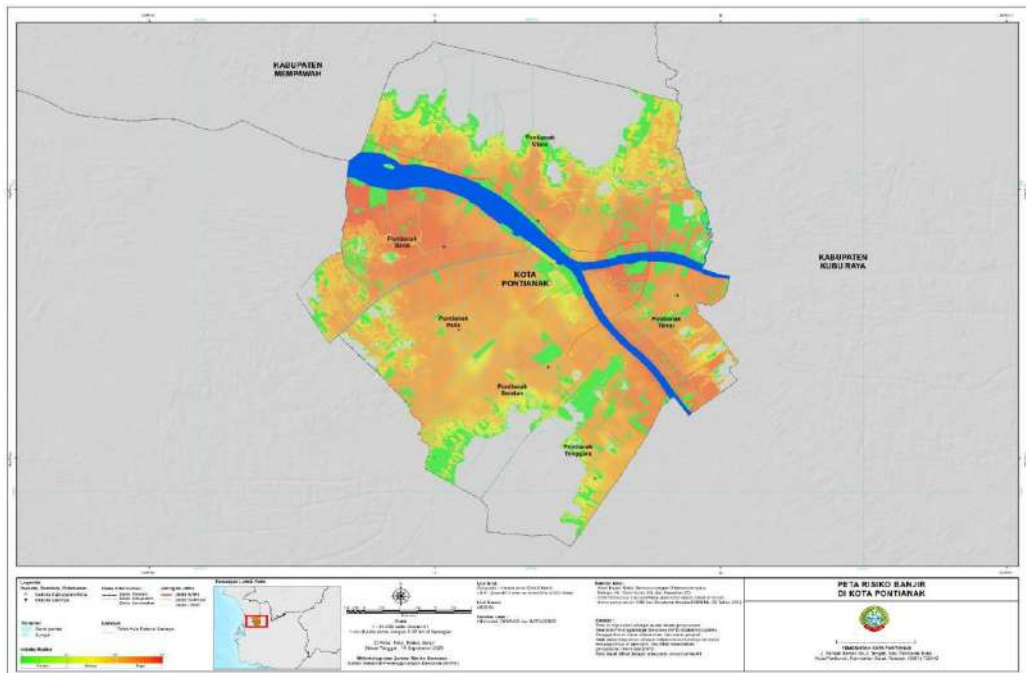
Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana Kota Pontianak

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

Dari data tabel 2.16 dapat disimpulkan bahwa Kota Pontianak memiliki tingkat risiko tinggi untuk semua jenis bencana. Dengan dominasi tingkat risiko tinggi pada setiap bencana, maka dibutuhkan perencanaan matang dari pemerintah daerah,

pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat untuk menjalankan upaya pengurangan risiko bencana. Berikut peta spasial resiko bencana di Kota Pontianak:

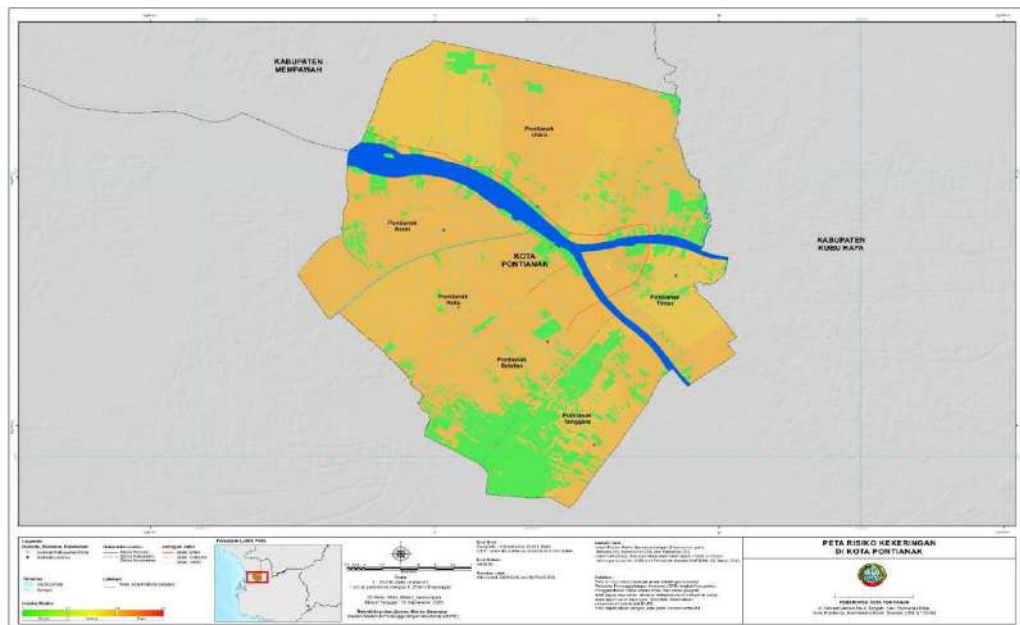


Gambar 2.2 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Pontianak
Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

Tabel 2.17 Potensi Luas Risiko Bahaya Banjir di Kota Pontianak

KECAMATAN	RISIKO				KELAS
	LUAS (HA)			TOTAL	
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Pontianak Barat	360,73	150,16	1.067,51	1.578,40	TINGGI
Pontianak Kota	178,13	229,23	1.144,70	1.552,05	TINGGI
Pontianak Selatan	256,88	387,66	714,79	1.359,32	TINGGI
Pontianak Tenggara	274,07	158,32	455,34	887,72	TINGGI
Pontianak Timur	231,02	65,70	852,98	1.149,70	TINGGI
Pontianak Utara	823,65	680,63	1.140,55	2.644,82	TINGGI
Jumlah	2.124,47	1.671,69	5.375,86	9.172,02	TINGGI

Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

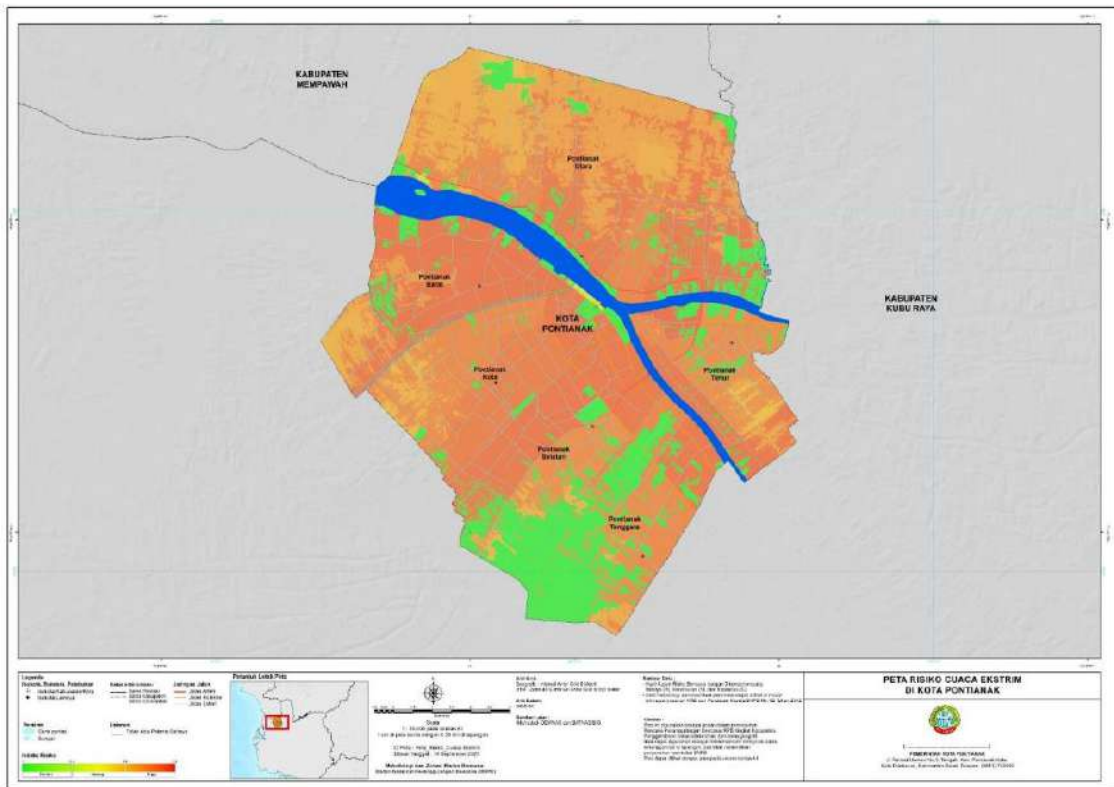


Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kota Pontianak
Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

Tabel 2.18 Potensi Luas Risiko Bahaya Kekeringan di Kota Pontianak

KECAMATAN	RISIKO				KELAS
	LUAS (HA)			TOTAL	
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Pontianak Barat	321,84	-	1.299,86	1.621,70	TINGGI
Pontianak Kota	124,33	-	1.477,47	1.601,80	TINGGI
Pontianak Selatan	407,38	-	1.236,02	1.643,40	TINGGI
Pontianak Tenggara	796,91	390,26	438,33	1.625,50	TINGGI
Pontianak Timur	217,16	493,00	489,04	1.199,20	TINGGI
Pontianak Utara	648,41	1.413,59	2.067,31	4.129,30	TINGGI
Jumlah	2.516,03	2.296,85	7.008,02	11.820,90	TINGGI

Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

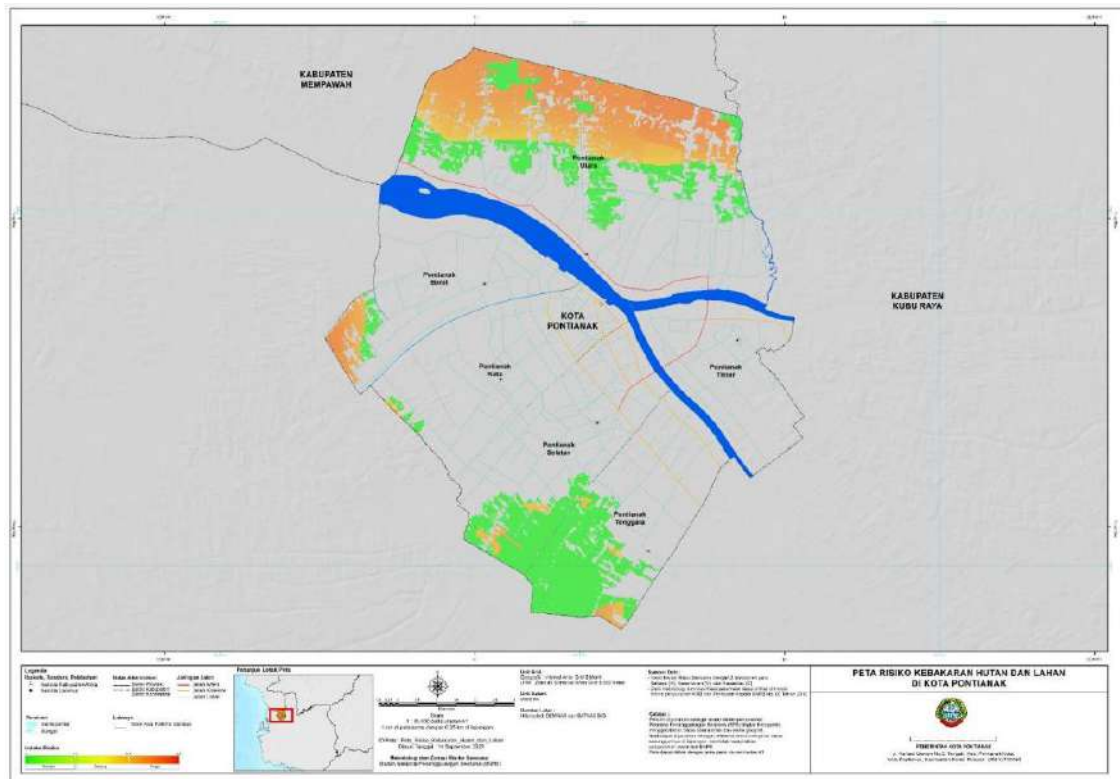


Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Pontianak
Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

Tabel 2.19 Potensi Risiko Bahaya Cuaca Ekstrem di Kota Pontianak

KECAMATAN	RISIKO				KELAS
	LUAS (HA)			TOTAL	
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Pontianak Barat	321,84	-	1.299,86	1.621,70	TINGGI
Pontianak Kota	110,21	17,09	1.474,50	1.601,80	TINGGI
Pontianak Selatan	407,38	2,43	1.233,59	1.643,40	TINGGI
Pontianak Tenggara	796,91	-	828,59	1.625,50	TINGGI
Pontianak Timur	216,53	14,94	967,73	1.199,20	TINGGI
Pontianak Utara	648,41	29,52	3.451,37	4.129,30	TINGGI
Jumlah	2.501,27	63,99	9.255,64	11.820,90	TINGGI

Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023



Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Karhutla Kota Pontianak
Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

Tabel 2.20 Potensi Luas Risiko Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak

KECAMATAN	RISIKO				KELAS
	LUAS (HA)				
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
Pontianak Barat	36,19	-	102,36	138,55	TINGGI
Pontianak Kota	16,82	5,94	-	22,76	RENDAH
Pontianak Selatan	292,90	10,45	24,14	327,49	RENDAH
Pontianak Tenggara	526,62	8,64	27,72	562,98	RENDAH
Pontianak Utara	537,70	114,22	1.069,28	1.721,20	TINGGI
Jumlah	1.410,24	139,25	1.223,50	2.772,98	TINGGI

Sumber: KRB Kota Pontianak, 2023

Untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan apabila terjadi ancaman bencana disuatu daerah maka dapat dilihat dari indeks resiko bencana (IRB). Sedangkan untuk mengukur kapasitas daerah untuk menghadapi bencana maka akan dilihat Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Capaian IRB dan IKD Kota Pontianak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	85,66	85,66	85,66	90,63	96,20
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,47	0,47	0,45	0,45	0,43

Sumber : BPBD Kota Pontianak, 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indeks resiko bencana Kota Pontianak sebesar 96,20 masuk kategori sedang, dan indeks kapasitas daerah sebesar 0,43 masuk kategori sedang (0,41-0,80). Yang mempengaruhi nilai indeks risiko bencana adalah nilai indeks ketahanan daerah yang menjadi faktor pengali terhadap nilai bahaya dibagi kerentanan, sedangkan indeks ketahanan daerah sendiri diperoleh dari keterisian 71 indikator terkait.

Perubahan iklim merupakan isu yang belakangan sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat perkotaan. Pada daerah perkotaan Indonesia, bahaya potensial akibat perubahan iklim yaitu pemanasan lokal, meluasnya distribusi populasi vektor pembawa penyakit, kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air dan banjir akibat meningkatnya iklim ekstrem, longsor, kejadian iklim/cuaca ekstrem seperti badai, angin kencang, dan hujan lebat (Bappenas 2014). Kota Pontianak juga mengalami perubahan iklim yang serupa dengan kondisi nasional. Namun, kondisi lokal akan berpengaruh pada tingkat perubahan iklim di Kota Pontianak. Proyeksi perubahan iklim dibandingkan dengan periode *baseline* tahun 1981–2005.

Secara umum, suhu udara Kota Pontianak diproyeksikan akan meningkat dibandingkan dengan kondisi *baseline*. Dengan skenario menengah (RCP4.5), suhu udara diproyeksikan akan meningkat hingga 2,36°C, sedangkan dengan skenario tinggi (RCP8.5) suhu udara diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga 4,40°C pada tahun 2099. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi nasional yang mencapai 4.09°C. Suhu udara maksimum akan mengalami peningkatan signifikan, sedangkan suhu minimum cenderung meningkat lebih rendah. Akibatnya, perbedaan suhu antara siang dan malam menjadi lebih tinggi di masa mendatang. Tren peningkatan suhu maksimum mencapai 0,51°C per 10 tahun, sedangkan tren suhu minimum 0,46 °C per 10 tahun.

Curah hujan di Kota Pontianak diproyeksikan mengalami penurunan signifikan hingga 30% pada periode 2075–2099. Perubahan ini sejalan dengan kondisi nasional yang secara umum mengalami penurunan curah hujan hingga 30% pada periode yang sama. Penurunan curah hujan yang besar di masa mendatang akan mengakibatkan kekeringan saat musim kemarau. Tren anomali curah hujan juga menunjukkan adanya penurunan yang signifikan di masa mendatang. Meskipun demikian, pada tahun tertentu, terdapat peningkatan anomali curah hujan seperti pada tahun 2064 dan 2075, sehingga masih terdapat potensi banjir terutama pada musim penghujan.

2.1.2. Demografi

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan wilayah administrasi, terdapat enam kecamatan di Kota Pontianak. Kecamatan dengan penduduk paling banyak di tahun 2023 adalah Kecamatan Pontianak Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 150.517 jiwa atau 22,28% dari total populasi yang ada di Kota Pontianak dan yang terkecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara, dengan jumlah penduduk sebanyak 49.176 jiwa atau 7,28% dari keseluruhan penduduk di Kota Pontianak. Berikut ini merupakan tabel persebaran penduduk Kota Pontianak berdasarkan wilayah administrasi.

Tabel 2.22 Persebaran Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Persentase penduduk
Pontianak Selatan	91.290	13.52%
Pontianak Tenggara	49.176	7.28%
Pontianak Timur	110.904	16.42%
Pontianak Barat	150.517	22.28%
Pontianak Kota	123.867	18.34%
Pontianak Utara	149.714	22.16%
Total Kota Pontianak	675.468	100.00%

Sumber: BPS, 2024

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

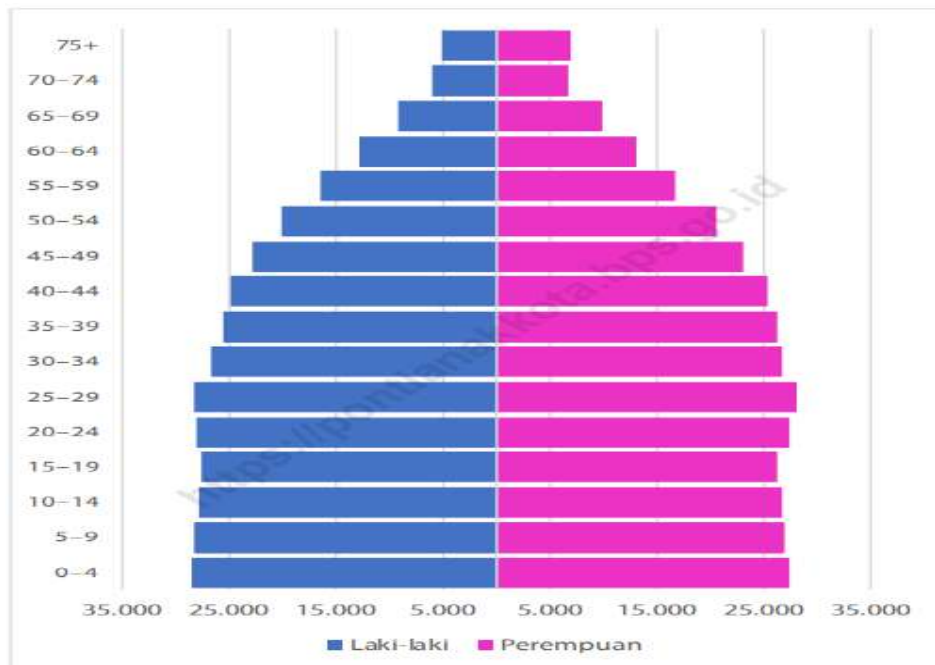
Dari segi kelompok umur, kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 25-29 tahun yaitu sebanyak 56.225 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur di atas 75 tahun, yaitu sebanyak 11.881 jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu dengan rasio jenis kelamin 1.00 secara keseluruhan. Di Kota Pontianak semakin muda kelompok umurnya (kelompok umur dibawah 30 tahun), jumlah laki-laknya lebih banyak dibandingkan perempuan. Demikian juga dengan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, semakin bertambahnya kelompok umur (diatas 30 tahun), rasio jenis kelamin semakin menurun. Berikut ini merupakan tabel dan piramida penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Pontianak Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	28.568	27.415	55.983	1,04
5-9	28.245	26.980	55.135	1,05
10-14	27.789	26.588	54.377	1,05
15-19	27.663	26.247	53.910	1,05
20-24	27.951	27.280	55.231	1,02
25-29	28.196	28.029	56.225	1,01
30-34	26.583	26.720	53.303	0,99
35-39	25.437	26.340	51.777	0,97
40-44	24.795	25.402	50.197	0,98
45-49	22.886	23.015	45.901	0,99
50-54	20.167	20.441	40.608	0,99
55-59	16.525	16.726	33.251	0,99
60-64	12.889	13.065	25.954	0,99
65-69	9.169	9.774	18.943	0,94
70-74	5.983	6.809	12.792	0,88
75+	5.010	6.871	11.881	0,73
Total Kota Pontianak	337.856	337.612	675.468	1,00

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024



Grafik 2.6 Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2023 adalah 5.709 jiwa per km². Dilihat dari kepadatan menurut kecamatan, Kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya (9.268 jiwa tiap km²) dan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah (3041 jiwa tiap Km²), sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk per (km ²)
Pontianak Selatan	91.290	16,383	5526
Pontianak Tenggara	49.176	16,016	3041
Pontianak Timur	110.904	16,524	9242
Pontianak Barat	150.517	16,127	9268
Pontianak Kota	123.867	12,061	7732
Pontianak Utara	149.714	41,097	3620
Total Kota Pontianak	675.468	118,209	5709

Sumber: Hasil Analisis, 2024

D. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk didapatkan dengan rumus berikut ini:

$$P_t = P_0(1+r)^t$$

P_t : Jumlah penduduk

P₀ : Jumlah penduduk pada tahun dasar

t : Jangka waktu (tahun)

r : Laju pertumbuhan penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai tahun 2023 berada pada angka 1,412%. Sejak tahun

2021-2023 laju pertumbuhan penduduk dibawah 1% karena berdasarkan long form Sensus Penduduk 2020 terlihat bahwa banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan semasa hidupnya (*Total Fertility Rate*) Kota Pontianak sudah mengalami penurunan.

Tabel 2.25 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2014	598.097	1,861
2015	607.438	1,562
2016	618.388	1,803
2017	627.021	1,396
2018	637.723	1,707
2019	646.661	1,402
2020	658.685	1,859
2021	663.713	0,763
2022	669.795	0,916
2023	675.468	0,847
Rata-rata 10 tahun terakhir		1.412

Sumber: BPS, 2024

Rendahnya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan kawin serta lebih banyaknya penduduk yang keluar dari kota pontianak dibandingkan yang masuk.

E. Jumlah Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau produktif (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Sementara itu, penganggur terbuka, adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia kerja Kota Pontianak Tahun 2023 adalah 511.107, dengan angkatan kerja sebanyak 324.416 atau 63,47% dari penduduk usia kerja, dan jumlah penduduk bukan angkatan kerja ada sebanyak 186.691 jiwa, atau 36,53% dari penduduk usia kerja.

Tabel 2.26 Angkatan Kerja Kota Pontianak Tahun 2023

Kegiatan utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan kerja	206.367	118.409	324.416
1. Bekerja	183.557	111.919	295.476
2. Pengangguran terbuka	22.810	6.130	28.940
Bukan angkatan kerja	47.440	139.251	186.691
1. Sekolah	21.953	27.032	48.985
2. Mengurus rumah tangga	11.288	102.151	113.439
3. Lainnya	14.199	10.068	24.267
Jumlah Total Kota Pontianak	253.807	257.300	511.107

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka sebanyak 28.940 jiwa atau 8,92% dari angkatan kerja. Mengingat bahwa Kota Pontianak adalah kota dengan Perguruan Tinggi terbanyak di Kalimantan Barat yang menghasilkan Sarjana, sehingga kebutuhan akan lapangan pekerjaan lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lainnya. Disamping itu Kota Pontianak masih mengalami bonus demografi yang berarti penduduk usia produktif lebih banyak dari penduduk tidak produktif, sehingga *supply* tenaga kerja menjadi tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat yang akan dijelaskan pada bagian ini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga Kota Pontianak.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Berikut ini merupakan dinamika kondisi dan kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Pontianak menggunakan beberapa indikator utama ekonomi.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi perubahan persentase dalam *output* ekonomi suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam periode tahunan. Ini mengacu pada peningkatan total produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu kota. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya dianggap sebagai tanda positif, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk digunakan dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Laju pertumbuhan ekonomi didapatkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang dibandingkan dengan PDRB sebelumnya. Berikut ini adalah laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak dalam 10 tahun terakhir.

Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2014	5,94%
2015	4,84%
2016	5,08%
2017	4,96%
2018	4,22%
2019	4,02%
2020	-3,96%
2021	4,60%
2022	4,98%
2023	4,76%

Sumber: BPS Kota Pontianak

Tantangan yang harus menjadi perhatian pada tahun-tahun mendatang adalah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan. Tabel

2.27 menampilkan "Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak" dari tahun 2014 hingga 2023. Berikut adalah analisis dari data tersebut:

Tren Pertumbuhan Positif (2014-2019):

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak secara umum mengalami fluktuasi dalam periode ini tetapi tetap positif. Tahun 2014 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,94%. Setelah itu, terdapat penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 4,02%.

Penurunan Drastis Tahun 2020:

Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -3,96%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi secara global.

Pemulihan Ekonomi (2021-2023):

Pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 4,60%. Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 4,98%. Tahun 2023 mencatat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 4,76%, namun masih menunjukkan tren pemulihan yang stabil.

Kesimpulan: Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Pandemi menunjukkan Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak cenderung fluktuatif namun tetap positif sebelum tahun 2020. Dampak Pandemi COVID-19: Tahun 2020 menunjukkan penurunan drastis akibat pandemi. Pemulihan Pasca Pandemi: Ada tanda-tanda pemulihan yang jelas mulai dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun laju pertumbuhan belum sepenuhnya kembali ke tingkat pra-pandemi.

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi, yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Laju inflasi di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Laju inflasi di Kota Pontianak

Tahun	Laju Inflasi (%)
2014	9,38
2015	6,17
2016	3,88
2017	3,86
2018	3,99
2019	2,64
2020	2,11
2021	1,16
2022	6,35
2023	2,09

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Dari tabel diatas, inflasi Kota Pontianak sejak tahun 2014 sampai 2023 sudah sangat baik karena telah mencapai target nasional 3±1, meskipun di tahun 2022 terjadi lonjakan yang tinggi disebabkan kondisi global yang tidak baik pengaruh perang Rusia dan Ukraina, juga disebabkan dinamika aktifitas ekonomi.

Tabel 2.18 Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kesehatan	0,39	5,26	0,48	0,75	0,28
2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,99	5,17	0,79	5,43	3,19
3	Pakaian dan Alas Kaki	0,20	-0,22	0,09	0,49	4,19
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	0,11	0,67	0,71	5,73	0,89
5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,08	0,50	1,99	6,73	1,33
6	Transportasi	0,16	-1,30	1,68	18,89	2,76
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,04	-0,65	0,05	0,17	0,35
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,82	2,87	2,64	4,04
9	Pendidikan	0,14	0,92	0,53	1,16	0,31
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,16	2,93	1,85	3,82	0,94
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,22	1,98	4,07	9,09	1,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024

Apabila dilihat dari inflasi tahunan per kelompok pengeluaran, hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 hanya kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami penurunan yaitu 0,28. Kelompok pengeluaran yang mengalami lonjakan tertinggi adalah kelompok pakaian alas kaki, dari 0,49% di tahun 2022 menjadi 4,19% di tahun 2023. Sedangkan kelompok pengeluaran kesehatan mengalami penurunan dari 0,75% pada tahun 2022 menjadi 0,28% di tahun 2023.

C. Tingkat Kemiskinan

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut ditandai dengan kerentanan pada tingkat ekonomi, ketidakberdayaan dalam berusaha, serta keterisolasian dan ketidakmampuan mengemukakan aspirasi untuk mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan taraf hidup. Selain itu kemiskinan juga ditandai dengan adanya kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk, dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Secara umum, penyebab kemiskinan terjadi di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha
2. Keterbatasan akses terhadap faktor produksi
3. Rendahnya kepemilikan aset/kepemilikan terhadap aset tertentu
4. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan
5. Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi
6. Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial

Tabel 2.30 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pontianak

Tahun	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2014	94,85	5,15	30,93
2015	94,78	5,22	31,56
2016	94,45	5,55	34,11



Tahun	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2017	94,69	5,31	33,18
2018	95,00	5,0	31,76
2019	95,12	4,88	31,46
2020	95,30	4,7	30,70
2021	95,42	4,58	30,11
2022	95,54	4,46	29,61
2023	95,55	4,45	29,92
2024	95,80	4,20	28,56

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Pendataan penduduk miskin di Kota Pontianak mengacu kepada hasil pendataan Survey Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS Kota Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Pontianak lebih baik dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berada di angka 7-8%, sedangkan kemiskinan di Kota Pontianak pada tahun 2024 adalah 4,20%, turun 0,25 poin dari Tahun 2023.

Komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan telah diupayakan selama ini. Selain itu, dengan adanya komitmen TPB dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, upaya untuk mengatasi permasalahan inipun menjadi lebih kuat.

D. Indeks Gini

Indeks gini atau koefisien gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi ketika distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Semakin besar nilai indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar.

Pada tabel 2.31 dapat disimpulkan bahwa indeks gini Kota Pontianak cukup stabil di 0,3 yang menunjukkan ketimpangan tersebut berada pada ketimpangan sedang (0,3-0,5) pada setiap tahunnya. Menurunkan indeks gini dapat dilakukan dengan kebijakan lebih banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tabel 2.31 Indeks Gini Rasio Kota Pontianak

Tahun	Gini Rasio
2014	0,328
2015	0,315
2016	0,329
2017	0,344
2018	0,370
2019	0,340
2020	0,327
2021	0,337
2022	0,363
2023	0,347

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Peranan tenaga kerja dalam pembangunan, memiliki dua sisi yaitu sebagai objek yang perlu dibangun dan disejahterakan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan itu sendiri. Kesejahteraan seluruh masyarakat pada dasarnya adalah kesejahteraan para pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Berikut angka ketenagakerjaan di Kota Pontianak:

Tabel 2.32 Angka Ketenagakerjaan Kota Pontianak

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Rasio Penduduk yang Bekerja
2014	59,47	7,05	92,95
2015	61,89	9,44	90,56
2016	NA	NA	NA
2017	63,66	9,36	90,64
2018	61,19	10,37	89,63
2019	61,62	9,13	90,87
2020	60,05	12,36	87,64
2021	61,94	12,38	87,62
2022	64,82	9,92	90,08
2023	63,47	8,92	91,08

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Dari tabel 2.32 dapat disimpulkan bahwa angka ketenagakerjaan di Kota Pontianak cukup fluktuatif. Meski begitu, angka TPT per tahun 2023 menjadi angka TPT Kota Pontianak terendah kedua dalam 10 tahun belakangan, namun belum dapat mencapai TPT Tahun 2014 yang mencapai 7,05. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam usaha menanggulangi masalah pengangguran. Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan dan keahlian para pencari kerja.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan pembangunan kualitas manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan objek dan subjek pembangunan yang kesejahteraannya perlu diperhatikan, karena berkaitan langsung dengan kemajuan daerah. Maka dari itu, pembangunan kualitas manusia harus mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Capaian kinerja pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan sosial, dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi pengukuran dimensi dari pembangunan manusia dapat dilakukan dengan menilai status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Kemampuan dasar tersebut yaitu:

1. Umur panjang dan sehat, diukur melalui usia harapan hidup waktu lahir;
2. Berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah;
3. Kemampuan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi.

Melalui tabel 2.33, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2014-2023 IPM Kota Pontianak secara positif terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa

usaha-usaha pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya, yang tercermin dari kenaikan angka IPM selama 10 tahun belakangan. Kebijakan yang dapat dilakukan kedepan adalah dengan mendorong atau memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan ketrampilan dan keahlian para pekerja dan pencari kerja.

Tabel 2.33 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak 2014-2023

Tahun	IPM
2014	76,63
2015	77,52
2016	77,63
2017	77,93
2018	78,56
2019	79,35
2020	79,44
2021	79,93
2022	80,48
2023	81,63

Sumber: BPS Kota Pontianak

Keterangan: Tahun 2013 - 2019 berdasarkan SP 2010

Tahun 2020 - 2023 berdasarkan SP 2020LF

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Pembangunan Gender

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak meski fluktuatif, namun memiliki tren yang positif hingga mencapai 94,65% pada Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.23, dimana secara umum terus menunjukkan peningkatan.

Peningkatan IPG yang terus terjadi karena keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pontianak sudah sangat baik dan tidak ada budaya diskriminasi terhadap perempuan, dan kondisi ini perlu dipertahankan.

Tabel 2.34 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tahun	IPG
2014	93,03
2015	93,08
2016	-
2017	93,60
2018	93,32
2019	93,81
2020	93,73
2021	94,01
2022	94,10
2023	94,65

Sumber: BPS Kota Pontianak 2024

Keterangan: Berdasarkan SP 2010

B. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan konsep yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.



Kota Layak Anak menempatkan anak-anak sebagai subjek utama dalam perencanaan dan pembangunan kota, sehingga kebutuhan dan hak-hak mereka dipertimbangkan secara serius. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang ramah anak, termasuk taman bermain, jalur pejalan kaki yang aman, sekolah yang berkualitas, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang baik.

Tujuan utama dari konsep Kota Layak Anak adalah menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam memenuhi potensi mereka dan memberikan mereka kesempatan yang adil untuk berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Dengan demikian, kota yang layak anak juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini adalah capaian Kota Layak Anak untuk Kota Pontianak.

Tabel 2.35 Capaian Kota Layak Anak

Tahun	Tingkat Capaian Kota Layak Anak
2016	Madya
2017	Madya
2018	Madya
2019	Madya
2020	Pratama
2021	Pratama
2022	Madya
2023	Nindya

Sumber: DP2KBP3A Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak 2024

Capaian indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2023 telah menjadi nindya. Capaian tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada tingkat madya. Di tahun 2016 capaian KLA Kota Pontianak juga berada di tingkat madya, namun sayang capaian tersebut mengalami penurunan hingga berada di tingkat pratama pada tahun 2020 dan 2021 karena tidak ada penilaian saat pandemi covid-19 sesuai kebijakan secara nasional kepada seluruh Pemerintah Daerah.

Capaian KLA Kota Pontianak di tahun 2023 telah sesuai dengan target RPJMD Perubahan 2020-2024.

Capaian ini disebabkan oleh belum terlaksananya Konvensi Hak Anak (KHA); sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral; masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan; belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta belum maksimalnya peran sektor swasta dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian Pontianak sebagai Kota Layak Anak. Untuk memperbaiki capaian ini Kota Pontianak perlu melakukan:

1. Memaksimalkan peran swasta dan dunia usaha dengan membentuk wadah melaksanakan program dan rencana aksi konkret untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus anak;
2. Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak sebagai Kota Layak Anak;
3. Menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah; dan
4. Menyediakan data yang akurat dari Perangkat Daerah terkait.
5. Meninjau kembali kebijakan iklan rokok yang mengurangi penilaian.
6. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Anak.
7. Pembangunan serta pengembangan fasilitas umum (sekolah/satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah dan ruang tempat bermain) yang ramah anak.

C. Usia Harapan Hidup

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang menjadi indikator ukuran kesejahteraan masyarakat. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berikut angka usia harapan hidup di Kota Pontianak:

Dari tabel 2.36 dapat dilihat bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Pontianak semakin meningkat setiap tahunnya artinya kesempatan hidup masyarakat semakin panjang. Peningkatan UHH dapat dilakukan dengan upaya perbaikan gizi ibu hamil.

Tabel 2.36 Usia Harapan Hidup

Tahun	Usia Harapan Hidup
2014	72,01
2015	72,11
2016	72,14
2017	72,17
2018	72,41
2019	72,80
2020	74,30
2021	74,44
2022	74,72
2023	75,07

Sumber: Dinas Kesehatan & BPS Kota Pontianak
Keterangan:

Tahun 2014 – 2019 berdasarkan SP 2010

Tahun 2020 – 2023 berdasarkan SP 2020LF

D. Kebudayaan

Seni dan budaya merupakan harta tak ternilai bagi suatu daerah. Keunikan budaya dan karya seni lokal memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di era pemerintahan modern, peran seni dan budaya dalam pengembangan pariwisata menjadi semakin penting dalam menciptakan identitas daerah yang kuat.

Berikut adalah data aspek kebudayaan di Kota Pontianak:

Tabel 2.37 Aspek Kebudayaan di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Kelompok Seni Budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Dokumentasi Budaya	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival
2016	169	2	1	11	12
2017	136	2	0	11	12
2018	137	2	1	13	12
2019	137	2	2	16	33
2020	137	2	3	3	18
2021	137	0	10	5	10
2022	195	11	14	6	20
2023	194	22	16	16	35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

E. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya adalah sebagai akselerator pembangunan, media produktif kesehatan, dan pencegah kenakalan remaja dan narkoba. Selain itu, pengembangan pemuda dan olahraga dapat menjadi upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Pontianak. Berikut merupakan aspek kepemudaan dan olahraga di Kota Pontianak:

Tabel 2.38 Aspek Kepemudaan dan Olahraga Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Olahraga	Jumlah Atlet	Jumlah Gedung Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga
2016	165	35	NA	NA	118
2017	170	37	665	36	118
2018	175	37	710	36	118
2019	72	72	637	26	253
2020	81	72	968	26	253
2021	88	72	968	26	305
2022	134	72	817	26	305
2023	92	76	719	30	256

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata Kota Pontianak

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari beberapa Aspek yaitu:

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. PDRB

Kondisi perekonomian Kota Pontianak dari tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami *trend* peningkatan yang relatif baik. Meskipun begitu, jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, Kota Pontianak mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan, sehingga dapat dikatakan jika laju pertumbuhan PDRB di Kota Pontianak cukup stabil.

Tabel 2. 39 PDRB Kota Pontianak (dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB ADHK	PDRB ADHB
2014	19.847.669,30	25.069.682,22
2015	20.747.494,76	27.920.136,59
2016	21.801.443,39	30.474.535,15
2017	22.903.162,60	33.416.835,37
2018	23.846.673,62	36.075.298,95
2019	24.804.699,29	38.708.215,95
2020	23.822.514,30	37.648.509,69
2021	24.920.917,01	40.202.359,04
2022	26.159.522,05	44.320.310,50
2023	27.404.859,85	47.885.235,55

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

B. PDRB Per Kapita

Perkembangan per kapita PDRB Kota Pontianak secara umum mengalami kenaikan yang signifikan, seperti yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah)	Pertumbuhan
2014	41.915.746,48	
2015	45.963.763,53	9,66
2016	49.280.605,62	7,22
2017	53.294.603,16	8,15
2018	56.568.916,21	6,14
2019	59.858.590,44	5,82
2020	57.157.077,64	-4,51
2021	60.571.902,38	5,97
2022	66.169.963,20	9,24
2023	70.891.937,96	7,14
Rata-rata		6,09

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kota Pontianak adalah sebesar Rp.57.157.077,64 mengalami penurunan sebesar 2.701.512,79 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp.59.858.590,44. Kondisi ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang pertama kali melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai *physical distancing* dan karantina mandiri sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia juga menyebabkan kondisi ekonomi global relatif melambat, sehingga berdampak pula pada pertumbuhan PDRB di Kota Pontianak. Tapi perekonomian berangsur-angsur membaik mulai tahun 2021 dengan peningkatan PDRB Perkapita kembali sebesar Rp. 60.571.902,38 dan terus meningkat hingga Tahun 2023 mencapai Rp. 70.891.937,96.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB Perkapita pada tabel 2.40 di atas dapat dihitung rata-rata pertumbuhan selama 10 tahun terakhir adalah sebesar 6,09%.

C. Keunggulan Sektor-Sektor Ekonomi

Keunggulan nilai tambah pembangunan di Kota Pontianak terletak pada sektor industri, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan nilai tambah setiap sektor ekonomi di Kota Pontianak yang sama baiknya dengan nilai tambah sektor ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Keunggulan relatif sektor-sektor tersebut merupakan modal dasar pembangunan Kota Pontianak saat ini.

Tabel 2.41 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,44	1,40	1,37	1,33	1,29
B. Pertambangan dan Pengalihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	17,10	16,29	16,49	16,62	16,92
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
F. Konstruksi	16,09	17,14	16,53	17,09	16,83



Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,70	18,84	18,62	18,12	17,56
H. Transportasi dan Pergudangan	8,88	8,78	8,77	8,46	8,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,33	3,37	3,42	3,30	3,40
J. Informasi dan Komunikasi	3,81	3,84	4,00	4,46	4,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,91	8,59	8,82	8,94	9,33
L. Real Estat	2,67	2,62	2,55	2,48	2,45
M,N. Jasa Perusahaan	0,62	0,64	0,66	0,65	0,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,42	7,73	8,17	8,35	8,69
P. Jasa Pendidikan	7,02	6,81	6,73	6,41	6,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	1,68	1,66	1,61	1,59
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,90	1,85	1,79	1,76	1,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.42 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,27	1,40	1,35	1,24	1,13
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	17,35	17,98	18,16	17,22	15,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,17	0,17	0,17	0,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,34	0,34	0,32	0,31
F. Konstruksi	16,11	16,12	16,42	16,10	16,23
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,61	15,71	15,66	17,03	17,92
H. Transportasi dan Pergudangan	8,61	7,92	7,30	8,33	8,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,49	2,93	3,01	3,10	3,17
J. Informasi dan Komunikasi	4,74	5,72	5,74	5,68	5,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,45	8,85	9,11	9,04	8,68
L. Real Estat	2,44	2,51	2,37	2,23	2,26
M,N. Jasa Perusahaan	0,68	0,67	0,63	0,66	0,67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,05	9,83	9,28	8,52	8,34
P. Jasa Pendidikan	6,22	5,68	5,69	5,53	5,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,68	2,62	3,40	1,41	3,88
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,87	1,54	1,37	1,42	1,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa sektor unggulan kota pontianak hingga tahun 2023 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata 17,58%), Konstruksi (rata-rata 16,47%), Industri Pengolahan (rata-rata 16,98%), Transportasi dan Pergudangan (rata-rata 8,43%),

Jasa Keuangan dan Asuransi (rata-rata 8,87%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (rata-rata 8,54%), Informasi dan Komunikasi (rata-rata 4,83%), dan Jasa Pendidikan (rata-rata 6,17%),serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (rata-rata 2,12%).

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan yang terus meningkat dipengaruhi oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang juga meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pendidikan Kota Pontianak semakin baik setiap tahunnya.

Tabel 2.43 Capaian Indeks Pendidikan Kota Pontianak

Tahun	Indeks Pendidikan
2014	0,705
2015	0,728
2016	0,729
2017	0,735
2018	0,741
2019	0,754
2020	0,756
2021	0,764
2022	0,765
2023	0,766

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Keterangan:

Tahun 2014 – 2019 berdasarkan SP 2010

Tahun 2020 – 2023 berdasarkan SP 2020

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut merupakan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kota Pontianak

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kota Pontianak semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.44 Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah
2014	9,62	13,84
2015	9,77	14,48
2016	9,78	14,49
2017	9,79	14,72
2018	9,90	14,81
2019	10,14	14,99
2020	10,17	15,00
2021	10,43	15,01
2022	10,44	15,02
2023	10,45	15,04

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah evaluasi terhadap inisiatif yang diterapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memajukan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang masa.

Data capaian indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Pontianak tersedia mulai Tahun 2022 sebesar 51,82 dan Tahun 2023 sebesar 75,39. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari tahun 2022 ke 2023. Saran Penyediaan Data Perlu dipastikan bahwa data literasi dicatat secara konsisten setiap tahun untuk memudahkan analisis tren jangka panjang. Analisis Lebih Lanjut Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari tahun 2022 ke 2023 agar strategi pembangunan literasi yang efektif dapat diidentifikasi dan diterapkan secara berkelanjutan.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pontianak

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2014	59,47
2015	61,89
2016	NA
2017	63,66
2018	61,19
2019	61,75
2020	60,05
2021	61,94
2022	64,82
2023	63,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024

Data Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di Pontianak dalam beberapa tahun belakangan bersifat fluktuatif. TPAK Kota Pontianak pada Tahun 2023 adalah 63,47%. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk Kota Pontianak usia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang tersedia untuk memproduksi.

E. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Berikut digambarkan kondisi rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari tahun 2014 hingga tahun 2023 menunjukkan adanya fluktuasi. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin bertambahnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada Tahun 2023, dari setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang.

Tabel 2.46 Rasio Ketergantungan Kota Pontianak

Tahun	Rasio Ketergantungan
2014	44,18
2015	44,20
2016	43,95
2017	43,60
2018	43,49
2019	43,38
2020	45,02
2021	44,28
2022	42,60
2023	44,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2024 (diolah)

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar seperti jaringan air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, dan lain-lain. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Tabel 2.47 Capaian Indeks Infrastruktur Kota Pontianak

Tahun	Indeks Infrastruktur
2019	72,21
2020	65,75
2021	79,62
2022	82,37
2023	84,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah Kota Pontianak dilihat dari rasio Infrastruktur jalan, rasio infrastruktur Drainase, Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, persentase kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik, indeks infrastruktur permukiman dan persentase jalan utama dalam kondisi tertib dan lancar. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Infrastruktur Kota Pontianak relatif meningkat, hingga Tahun 2023 menjadi 84,55.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

A. Angka Konflik

Angka konflik di Kota Pontianak dari tahun 2014 hingga tahun 2023 memiliki capaian 0 (nol) artinya tidak terjadi konflik yang berdampak pada jalannya pemerintahan dalam kurun waktu tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa angka konflik di Kota Pontianak terkendali sehingga dapat berdampak baik pada iklim investasi di Kota Pontianak.

B. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Pontianak baru diukur mulai tahun 2023 dengan capaian 75,53. Hal tersebut ditandai dengan masyarakat Kota Pontianak



sudah terbiasa hidup rukun berdampingan dengan agama yang berbeda. Masyarakat Kota Pontianak memiliki toleransi yang kuat antar umat beragama. Hal ini nampak dari beberapa di antaranya ada rumah ibadah yang letaknya berdampingan, ada masjid bertetangga dengan gereja, gereja dengan kelenteng. Bentuk keberagaman di Pontianak juga direpresentasikan dengan hari raya keagamaan yang selalu meriah. Semua agama dipersilahkan untuk merayakan agendanya masing-masing dengan semarak.

C. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan tingkat daya saing ekonomi suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, inovasi, akses pasar, dan lain-lain.

Melalui penggunaan indeks ini, pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi suatu daerah. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut, seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan pro-bisnis, dan stimulasi inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah juga berguna dalam membandingkan kinerja ekonomi antara berbagai daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi potensi kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa daya saing daerah Kota Pontianak di tahun 2022 meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2022, daya saing Kota Pontianak berada di kategori tinggi dengan angka 3,37. Sementara itu, daya saing Kota Pontianak di tahun 2020 di angka 1,59 pada kategori sedang. Daya saing daerah Kota Pontianak mencapai angka tertinggi di tahun 2023, dengan angka 3,79 dan berada di kategori tinggi.

Tabel 2.48 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Pontianak

Tahun	Indeks Daya Saing Daerah
2019	NA
2020	Sedang (1,5925)
2021	Tinggi (3,1490)
2022	Tinggi (3,37)
2023	Tinggi (3,79)

Sumber: Pemerintah Kota Pontianak, 2023

D. Angka Kriminalitas yang Diselesaikan

Pada tahun 2023 jumlah laporan atas tindakan kriminalitas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercatat jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran di Kota Pontianak tahun 2023 adalah 1.295 laporan, ini lebih tinggi dari jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di tahun 2022 yang berjumlah 1.079 laporan. Dari 1.295 laporan di tahun 2023, jumlah kriminalitas yang diselesaikan oleh Poltabes Kota Pontianak adalah 862 kasus. Angka kriminalitas yang meningkat ini memerlukan sinergisitas seluruh pihak untuk melakukan upaya lebih dalam menekan angka kriminalitas di Kota Pontianak.

Tabel 2.49 Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2019–2023

No	SATUAN KEPOLISIAN	2019		2020		2021		2022		2023	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Polsekta Pontianak (Sat Reskrim)	855	699	438	416	444	423	450	431	609	334
2	Polsekta Pontianak (Sat Narkoba)	116	102	121	115	137	148	129	126	108	111
3	Polsekta Selatar	131	135	141	126	90	83	99	88	110	87
4	Polsekta Timur	183	133	168	143	113	115	96	100	178	115
5	Polsekta Utara	122	100	81	76	93	82	92	88	93	81
6	Polsekta Barat	163	143	118	124	116	95	100	73	129	72
7	Polsek Pontianak Kota	135	105	73	56	120	131	113	101	68	62
8	KP3L	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.709	1.418	1.142	1.058	1.113	1.077	1.079	1.007	1.295	862

Sumber: Polresta Kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, 2024, diolah
Keterangan: L =Dilaporkan; S = Diselesaikan

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS Adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kriteria masalah sosial adalah sebagai berikut:

- Kemiskinan
- Keterlantaran
- Kecacatan
- Keterpencilan
- Ketunaan Sosian dan Penyimpangan Perilaku
- Korban bencana dan/atau
- Korban tindak keketasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Adapun capaian realisasi penanganan PSKS di Dinas Sosial berdasarkan capaian Program pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50 Jumlah Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) Kota Pontianak

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PPKS Anak Berhadapan dengan Hukum	242	129	-	75	63	61
2	PPKS Korban Bencana Alam dan Sosial	65	131	-	232	110	192
3	PPKS Anak Panti Asuhan	1372	1486	-	690	690	696
4	PPKS Orang Terlantar	54	36	57	68	39	372
5	PPKS Mayat Telantar	8	21	0	0	11	14
6	PPKS Pengemis /Gelandangan	35	35	0	88	62	135

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2024

SPM Bidang Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota.

Adapun capaian SPM Urusan Sosial beberapa tahun belakang adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.51 Capaian SPM Urusan Sosial

NO	INDIKATOR	RELISASI TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar	116	158	193
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	18	63	57
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	38	90	90
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti	110	62	135
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	1401	111	192

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2024

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.52 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
2019	67,19
2020	67,72
2021	67,90
2022	69,98
2023	77,74

Sumber : KemenPAN-RB, 2024

Dari tabel di samping terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi mengalami tren meningkat. Realisasi tahun 2023 adalah 77,74(BB) dengan predikat sangat baik.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti responsibilitas, ketersediaan informasi, kejelasan prosedur, keadilan, dan kemudahan akses layanan publik. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat mengevaluasi seberapa baik layanan publik mereka berfungsi dan menemukan

area-area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan capaian indeks pelayanan publik tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan sebanyak 0,39 poin di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian di tahun 2023 adalah 4,09 dengan kategori Sangat Baik (A-), berdasarkan rata-rata hasil penilaian Kemenpan-RB terhadap Kecamatan Pontianak Utara (3,53 kategori B), Dinas Sosial (4,47 kategori A-) dan RSUD Sultan Syarif Mohammad Al Kadri kategori A-).

Tabel 2.53 Capaian Indeks Pelayanan Publik

Tahun	Capaian Indeks Pelayanan Publik
2018	3,70
2019	3,67
2020	3,67
2021	3,93
2022	4,44
2023	4,09

Sumber : KemenPAN-RB, 2024

D. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat atau metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kemajuan ekonomi serta sosial suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini biasanya mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan tingkat inovasi, seperti investasi dalam riset dan pengembangan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, keberhasilan dalam menerapkan teknologi baru, dan kesiapan dalam mengadopsi perubahan.

Tabel 2.54 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2023

Tahun	Capaian Indeks Inovasi Daerah
2019	Sangat Inovatif
2020	52 (Kurang Inovatif)
2021	56.10 (Inovatif)
2022	55.10 (Inovatif)
2023	55.81 (inovatif)

Sumber : Pemerintah Kota Pontianak, 2023

Dengan menggunakan indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan membandingkan kemajuan inovasi antara daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inovasi. Hal ini membantu dalam merencanakan kebijakan dan strategi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah atau wilayah tersebut.

Melalui tabel di atas terlihat bahwa capaian terakhir indeks inovasi di tahun 2023 adalah 55,81 dengan kategori "Inovatif". Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki potensi yang besar dalam bidang inovasi. Adanya peningkatan setiap tahun tersebut harus menjadi pendorong bagi pemerintah Kota Pontianak untuk semakin mengembangkan inovasi daerah, bagi kemajuan Kota Pontianak sendiri. Adapun inovasi yang paling banyak adalah pelayanan publik kesehatan.

E. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Government) adalah konsep di mana pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet dan komputer, untuk menyediakan layanan kepada warga negara, bisnis,

dan entitas lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan responsivitas pemerintah.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencakup berbagai aplikasi dan layanan, seperti portal pemerintah elektronik, sistem informasi manajemen pemerintah, e-procurement (pengadaan barang dan jasa secara elektronik), e-taxation (perpajakan elektronik), e-voting (pemilihan elektronik), e-education (pendidikan elektronik), e-health (kesehatan elektronik), dan banyak lagi.

Penerapan e-Government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses bagi masyarakat, mengurangi biaya administrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui e-Government, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup warga negara dan mempercepat pembangunan ekonomi serta sosial.

Tabel 2.55 Capaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pontianak Tahun 2019-2023

Tahun	Capaian Indeks SPBE
2019	2,32
2020	3,06
2021	3,31
2022	3,28
2023	3,43

Sumber : Pemerintah Kota Pontianak, 2023

Berdasarkan hasil capaian tersebut, diketahui bahwa indeks SPBE meningkat sebanyak 1,11 poin dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa SPBE di Kota Pontianak semakin membaik. Dengan capaian 3,43 di Tahun 2023, SPBE Kota Pontianak sudah masuk kategori Baik (2,6

sampai < 3,5) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE). Adapun komponen yang paling tinggi adalah Domain Layanan SPBE yang terdiri dari layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

F. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 2.56 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pontianak

Tahun	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
2019	87.862 (Baik)
2020	88.534 (Sangat Baik)
2021	88.651 (Sangat Baik)
2022	88,687(Sangat Baik)
2023	89.847 (Sangat Baik)

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak hingga tahun 2023 telah mencapai kinerja unit pelayanan Sangat Baik, sesuai standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan mayoritas perbaikan pada komponen kecepatan waktu pelayanan.



2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Visi Kota Pontianak 2025 sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah **"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025"**, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9).

Untuk mewujudkan Visi Kota Pontianak tersebut dirumuskan 5 Misi Kota Pontianak, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kebangsaan yang Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak Mulia;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjaminnya Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Tumbuh dan Merata Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
4. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Masyarakat yang Paham Politik, Taat Hukum Tenteram dan Tertib.

Ketercapaian Visi juga akan dilihat melalui evaluasi Misi dan Sasaran Pokok RPJPD sebagai berikut :

2.5.1. Evaluasi Misi I

Sasaran pokok dari misi 1 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan IPM mencapai 81,99 yang didukung dengan biaya pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, wajib belajar yang dicapai 12 tahun, semua anak kurang mampu dari SD s/d SMU digratiskan, sertifikasi guru tercapai 100 persen, kelayakan guru mengajar dari SD s/d SMA mendekati angka 100 persen, bebas buta aksara, memiliki ketrampilan yang beragam dan berkualitas, mendapat dukungan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, yang dibarengi dengan watak dan perilaku yang berakhlak mulia, jujur, berbudaya dan beradab sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan tetap berkepribadian Indonesia dan makin patriotik.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang mendapat dukungan maksimal dan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui dukungan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan yang meningkat melalui APBD mencapai 15 persen, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan, 100 persen keluarga kurang mampu digratiskan dari biaya kesehatan, angka harapan hidup mencapai 72 tahun, sarana dan prasarana kesehatan memadai, pelayanan Puskesmas dapat berlangsung selama 24 jam, kebutuhan dokter spesialis tercukupi, sekaligus berkembang pola hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gerakan bersama yang dapat meminimalkan serangan berbagai penyakit, termasuk penyakit demam berdarah, muntaber dan diare serta siap mengantisipasi HIV/AIDS, NAPZA dan flu burung.
3. Makin berkembangnya keteladanan para pemimpin, sekaligus mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai tujuan bersama, peningkatan budaya patuh pada hukum, apresiasi seni dan budaya daerah untuk memperkokoh jati diri bangsa, berkepribadian Indonesia dan makin patriotik, pengembangan

toleransi terhadap keragaman budaya, peningkatan daya saing, menumbuhkan budaya wirausaha, budaya cinta dan ramah lingkungan, penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, peningkatan pemahaman pengaruh positif dan negatif terhadap budaya global yang mendapat dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berikut tabel capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 untuk Misi 1:

Tabel 2.57 Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 1

Indikator	Satuan	Target Capaian (2025) pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Rasio Capaian Akhir Kinerja terhadap Target RPJPD (%)	Kriteria Rasio Capaian Akhir kinerja
IPM	Indeks	81,99	81,63	99,56	Sangat Tinggi
Dukungan dana pendidikan melalui APBD	%	20	22,36	111,80	Sangat Tinggi
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	79,38	79,38	Tinggi
Angka Melek Huruf (15 tahun keatas)	%	100	97,95	97,95	Sangat Tinggi
Sertifikasi Guru	%	100	62,3	62,30	Rendah
Angka Harapan Hidup	Tahun	72	75,07	104,26	Sangat Tinggi
Dukungan dana kesehatan melalui APBD	%	15	20,73	138,20	Sangat Tinggi
Persentase Keanggotaan PBI (Gratis biaya kesehatan untuk keluarga kurang mampu)	%	100	85,50	85,50	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Misi 1 (%)				97,37	Sangat Tinggi

Sumber: Perangkat Daerah dan BPS Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat diketahui, secara umum untuk indikator kuantitatif capaian sasaran pokok Misi 1 Sangat Tinggi yaitu 97,37% sesuai kriteria penilaian kinerja dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok dan indikator kualitatif sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Faktor pendorong keberhasilan:

- Kota Pontianak menjadi pusat pendidikan di Kalimantan Barat, dan dukungan dana pendidikan melalui APBD telah melebihi 20%, program wajib belajar 12 tahun, fasilitas pendidikan yang terus dibangun.
- Fasilitas kesehatan sudah memadai.



- Pontianak merupakan pusat ekonomi Kalbar, contoh kredit terbesar di Kalbar adalah Kota Pontianak, distribusi barang dan jasa terpusat di Kota Pontianak.
- Kenaikan IPM diperkirakan lebih didominasi oleh peningkatan pada komponen Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.
- Dukungan infrastruktur pendidikan seperti jumlah sekolah yang telah mencukupi kebutuhan siswa, namun perlu diatur sebarannya, serta melengkapi sarpras pendidikan diseluruh sekolah.

Usulan tindak lanjut:

- Pemerintah Kota Pontianak optimal melaksanakan wajib belajar 16 tahun.
- Kota Pontianak dapat memfokuskan diri menjadi Kota Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan pariwisata, selain perdagangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita masyarakat.

2. Dukungan Dana Pendidikan Melalui APBD (%)

Angka Dukungan dana Pendidikan melalui APBD telah tercapai 22,36% Tahun 2023. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kota Pontianak sekaligus menjadi pendorong keberhasilan peningkatan IPM.

Faktor pendorong keberhasilan:

Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pemenuhan dana pendidikan hingga diatas 20%

Usulan tindak lanjut: prioritas anggaran pendidikan terus dipertahankan untuk mendukung wajib belajar 16 tahun.

3. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C (%)

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C belum mencapai target.

Faktor penghambat keberhasilan:

- monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi anak usia SMA/SMK/MA/Paket C yang tidak melanjutkan perlu ditingkatkan.
- Adanya hambatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.

Usulan tindak lanjut: Perlu kebijakan yang dapat mendukung meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

4. Angka Melek Huruf (15 Tahun Keatas) (%)

Faktor pendorong keberhasilan: generasi muda sudah memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan membaca untuk bekal bekerja, dan didukung fasilitas pendidikan yang telah memadai termasuk untuk pendidikan informal.

5. Sertifikasi Guru PAUD-SD-SMP-dan Kesetaraan

Faktor penghambat keberhasilan:

- banyaknya guru yang telah tersertifikasi memasuki masa pensiun
- kurang optimalnya jam mengajar guru dan persyaratan lain yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Usulan tindak lanjut: Memberikan kemudahan pengurusan sertifikasi guru sesuai persyaratan yang ditentukan.

6. Angka Harapan Hidup (Tahun)

Faktor pendorong keberhasilan:

- Partisipasi swasta dan masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan dan Kota Pontianak
- Jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan telah mencukupi.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak semakin baik.



Usulan tindak lanjut:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota pontianak, contoh memperbanyak ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga.
- meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang handal.
- Meningkatkan Upaya promosi Kesehatan.

7. Dukungan Dana Kesehatan Melalui APBD (%)

Faktor pendorong keberhasilan: Dukungan dana kesehatan meningkat tajam pada periode terakhir sejak adanya pandemi covid 19.

Usulan tindak lanjut: Meningkatkan kemandirian pembiayaan Rumah Sakit dan Puskesmas dengan pengelolaan BLUD.

8. Persentase Keanggotaan PBI

Faktor penghambat keberhasilan: Kepesertaan BPJS belum mencapai *universal coverage* karena keterbatasan keuangan daerah.

Usulan tindak lanjut: Peningkatan dukungan anggaran APBD untuk mencapai *universal coverage* Kepesertaan BPJS.

9. Persentase Puskesmas 24 Jam Terhadap Jumlah Puskemas (%)

Tahun 2023 Kota Pontianak memiliki 23 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan, dan memiliki 3 puskesmas Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED) siap 24 jam memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas, serta kegawat daruratan bayi baru lahir dengan komplikasi, baik yang datang sendiri atau atas rujukan. Meskipun persentase puskesmas 24 jam baru terpenuhi 13,04%, kebutuhan akses masyarakat terbantu oleh banyaknya 45 klinik dan 12 Rumah Sakit.

10. Rasio Dokter Spesialis

Rasio dokter spesialis di Kota Pontianak jika dihitung dengan pelayanan 1 dokter melayani 2.500 warga, maka diperoleh data target dokter spesialis sebanyak 270 dokter terhadap jumlah penduduk Kota Pontianak tahun 2023 sebesar 675.468 jiwa. Ketersediaan dokter spesialis Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebesar 287 dokter melebihi target yang diperhitungkan, sehingga tingkat capaian 106,29% dengan kriteria sangat tinggi, namun belum tersebar sesuai kebutuhab di fasilitas kesehatan yang ada.

Faktor pendorong keberhasilan: keberadaan 12 rumah sakit yang berada di kota Pontianak mendorong kebutuhan terhadap dokter spesialis yang besar.

Usulan tindak lanjut: Beasiswa untuk dokter-dokter umum mengambil spesialisasi penyakit tertentu dan penempatan sesuai kebutuhan dan lengkap di disetiap faslilitas kesehatan pemerintah.

2.5.2. Evaluasi Misi II

Adapun sasaran pokok dari misi dua adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan terhadap perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung mengalami kemajuan yang pesat dan mencakup berbagai bidang kehidupan melalui hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah-masalah terutama kemiskinan dan PMKS dapat menjadi gerakan bersama yang efektif dan dapat

mengatasi masalah, sehingga penduduk miskin dan PMKS tidak lebih dan 5 persen.

- Partisipasi dan kontribusi swasta dan masyarakat dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk terus meningkat melalui gerakan KB, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,3 persen dan akhirnya masalah kependudukan yang menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kekumuhan kota menjadi kecil, dibarengi dengan tertib administrasi kependudukan yang mantap.

Berikut tabel capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 untuk Misi 2:

Tabel 2.58 Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 2

Indikator	Satuan	Target Capaian (2025) pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Rasio Capaian Akhir Kinerja terhadap Target RPJPD (%)	Kriteria Rasio Capaian Akhir kinerja
Angka Kemiskinan	%	5	4,2	116,00	Sangat Tinggi
Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	persen	90	100	111,11	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,17	94,65	100,51	Sangat Tinggi
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	0,95	126,92	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Misi 2 (%)				113,64	Sangat Tinggi

Sumber: Perangkat Daerah dan BPS Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat diketahui, secara umum untuk indikator kuantitatif capaian sasaran pokok Misi 2 Sangat Tinggi yaitu 113,64%. Dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok dan indikator kualitatif sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan

Faktor pendorong keberhasilan:

- Komitmen tinggi pemerintah pusat dan daerah
- Adanya Tim Koordinasi
- Adanya program penanganan kemiskinan, seperti bantuan rumah tidak layak huni, BLT, aplikasi data penduduk miskin.
- Penurunan angka kemiskinan diperkirakan didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya pengangguran.

Usulan tindak lanjut:

- Updating data penduduk miskin secara reguler by name by address agar program penanganan kemiskinan tepat sasaran.
- menggunakan data hasil Regsosek Bappenas.

2. Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Faktor pendorong keberhasilan: indikator ini termasuk dalam SPM.

Usulan tindak lanjut: Menggunakan indikator yang lebih tepat dalam mengurangi jumlah PMKS dan menggunakan data hasil Regsosek Bappenas.



3. Indeks Pembangunan Gender
Faktor pendorong keberhasilan: Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pontianak sudah sangat baik dan tidak ada budaya diskriminasi terhadap perempuan.
Usulan tindak lanjut: Menambahkan indikator Ketahanan Keluarga
4. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Faktor pendorong keberhasilan: Program Keluarga Berencana berjalan dengan baik.

2.5.3. Evaluasi Misi III

Adapun sasaran pokok dari misi tiga adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 % per tahun atau sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, dengan memperkuat sektor Perdagangan dan Jasa sebagai *leading sector*, yang didukung oleh sektor industri, pengangkutan dan komunikasi.
2. Terwujudnya iklim investasi yang memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan aktivitas ekonomi Kota Pontianak.
3. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional.
4. Terwujudnya usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian.
5. Terwujudnya peningkatan pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
6. Terwujudnya fasilitas perdagangan yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
7. Terwujudnya sistem dan prosedur pelayanan perizinan usaha yang kondusif (efisien dan efektif) melalui pelayanan satu atap.
8. Terwujudnya perdagangan yang dapat memperkuat sistem distribusi regional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha.
9. Meningkatnya peranan jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga dalam perekonomian Kota Pontianak.
10. Terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Berikut tabel capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 untuk Misi 3:

Tabel 2.59 Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 3

Indikator	Satuan	Target Capaian (2025) pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Rasio Capaian Akhir Kinerja terhadap Target RPJPD (%)	Kriteria Rasio Capaian Akhir kinerja
Pertumbuhan ekonomi	%	5	4,76	95,20	Sangat Tinggi
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3	3,17	90,83	Tinggi
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	14,61	17,93	122,72	Sangat Tinggi
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	16,3	15,69	96,26	Sangat Tinggi
PDRB perkapita	Rp/orang/tahun	67.271.528	70.891.937	105,38	Sangat Tinggi
Indeks Gini	Indeks	0,300	0,347	84,33	Tinggi
TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	%	76,05	63,47	83,46	Tinggi
Rasio penduduk bekerja	%	100	91,08	101,19	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Misi 3 (%)				97,42	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui, secara umum untuk indikator kuantitatif capaian sasaran pokok Misi 3 Sangat Tinggi yaitu 97,42%. Dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok dan indikator kualitatif sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Faktor pendorong keberhasilan: Perkembangan ekonomi yang baik didukung stabilitas keamanan dan sarana prasarana perkotaan yang semakin baik.

Usulan tindak lanjut:

- Menjaga stabilitas keamanan.
- Menjaga tingkat inflasi.
- Meningkatkan infrastruktur kesehatan, pendidikan, pariwisata.
- Usaha ekonomi kreatif go internasional.

2. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per-kapita yang disesuaikan Kota Pontianak mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp.13.232.000,- menjadi Rp.15.632.000,- di Tahun 2023. Data ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat Kota Pontianak.

3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kondisi awal penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada Tahun 2005 adalah sebesar Rp.46.443.620.000,- dan terjadi peningkatan yang besar dari data capaian kinerja Tahun 2023 menjadi sebesar Rp.205.726.890.506.000,-.

4. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing pada awal tahun perencanaan (2005) adalah sebesar Rp18.732.720.000,- dan terjadi peningkatan yang besar dari data capaian kinerja Tahun 2023 menjadi sebesar RP. 636.754.100.000,00,-.



5. Persentase Investasi Terhadap PDRB

Target capaian akhir persentase investasi ditetapkan sebesar 70%, namun angka investasi khususnya PMDN relatif kecil dikarenakan jumlah investasi didasarkan pada nilai LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dilaporkan oleh investor melalui aplikasi OSS, sehingga target ini tidak dapat dicapai.

6. Jumlah Pasar Modern

Jumlah pasar modern pada awal tahun perencanaan 2005 adalah 12 unit. Diperoleh data capaian pada Tahun 2023 menjadi sebanyak 277 unit. Peningkatan jumlah pasar modern yang pesat disebabkan salah satunya oleh masuknya Indomaret, Alfa Mart, dan Swalayan serta kemudahan izin usaha dengan OSS.

7. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

Faktor penghambat keberhasilan adalah upaya dan ragam promosi pariwisata belum optimal.

Usulan tindak lanjut:

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata.
- Meningkatkan kegiatan promosi pariwisata ke dalam dan luar negeri.
- Mengoptimalkan kolaborasi berbagai pihak untuk peningkatan sektor pariwisata.

8. Produk Unggulan Daerah

Kota Pontianak sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Produk Unggulan Kota Pontianak Sektor Pertanian dan Perikanan. Adapun jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan di dalam perda tersebut pada sektor pertanian, meliputi: lidah buaya dan pepaya pontianak. sedangkan sektor perikanan, meliputi: ikan cupang, ikan mas, ikan lele dan ikan nila.

Untuk produk unggulan lidah buaya, berdasarkan hasil survey diperoleh data luasan lidah buaya kurang lebih 20 hektar yg tersisa. Petani lidah buaya tidak mendapat alokasi pupuk subsidi, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian hanya 9 komoditas yg mendapat alokasi pupuk bersubsidi, sehingga perlu anggaran tambahan untuk memberikan bantuan sarana pupuk non subsidi, sedangkan anggaran bidang pertanian sangat terbatas. Terkait promosi produk unggulan terkendala dengan keterbatasan anggaran.

9. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Faktor pendorong keberhasilan: Kota pontianak sebagai ibu kota propinsi menjadi pusat perdagangan dan didukung akses yang dekat dengan bandara dan pelabuhan.

Usulan tindak lanjut:

- meningkatkan kemudahan perizinan
- menjaga kondusifitas keamanan kota
- meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan.

10. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Faktor pendorong keberhasilan: Keberadaan beberapa industri pengolahan kelapa sawit dan karet di kota pontianak.

Usulan tindak lanjut: pemindahan pelabuhan internasional ke Kabupaten Mempawah yang diikuti pindahnya industri pengolahan besar harus



diantisipasi dengan memperkuat pengembangan dan pembinaan UMKM sebagai industri rumah tangga.

11. Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB

Data kinerja Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB pada awal tahun perencanaan (2005) adalah 21,73%. Data capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 20,15%, yang menunjukkan terjadinya penurunan di sektor ini, hal tersebut disebabkan meningkatnya sektor perdagangan Kota Pontianak.

12. Jumlah UMKM

Data jumlah UMKM awal tahun (2005) adalah 1.016 unit. Data capaian kinerja jumlah UMKM Tahun 2023 menjadi 28.128 (sesuai data NIB) tumbuh 2.668,5% dari kondisi awal tahun perencanaan. Tumbuh pesat ini karena mudahnya urusan perizinan dengan OSS, juga disebabkan program pendampingan kepada UMKM dengan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan seperti pengemasan produk.

13. Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah koperasi aktif pada awal tahun (2005) adalah 474 unit, dengan capaian kinerja jumlah koperasi aktif pada Tahun 2023 sebanyak 485 unit, kondisi ini karena sebagian besar hanya bergerak pada jasa keuangan dan manajemen koperasi belum dan belum optimal.

14. PDRB per Kapita

Faktor pendorong keberhasilan: Pertumbuhan ekonomi yang baik dan dukungan stabilitas keamanan serta sarana prasarana perkotaan sudah baik.

Usulan tindak lanjut:

- Menjaga stabilitas keamanan.
- Meningkatkan infrastruktur kesehatan, pendidikan, pariwisata.
- Usaha ekonomi kreatif go internasional.

15. Indeks Gini

Faktor penghambat keberhasilan:

Lajunya peningkatan kesejahteraan masyarakat diatas garis kemiskinan tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat dibawah dan sekitar garis kemiskinan.

Usulan tindak lanjut:

- mendorong lapangan usaha atau sektor industri kreatif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
- meningkatkan jiwa dan ketrampilan berwirausaha masyarakat dibawah dan sekitar garis kemiskinan.

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Faktor penghambat keberhasilan: angkatan kerja dari masyarakat diatas garis kemiskinan lebih memilih pekerjaan yang sesuai minat dan bakat, dan selama masa pencarian kesejahterannya masih dapat disokong oleh keluarga, sehingga masih terdata sebagai pengangguran.

Usulan tindak lanjut:

- mendorong lapangan usaha atau sektor industri kreatif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
- meningkatkan jiwa dan ketrampilan berwirausaha masyarakat.

17. Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Pekerja)

Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2009 adalah sebesar Rp.52.630.763,00 dan tahun 2022 meningkat menjadi Rp.145.974.884,00, dari data tersebut dapat diketahui pertumbuhannya sebesar 177,36%.



18. Rasio Penduduk Bekerja
Faktor pendorong keberhasilan adalah karena bekerja merupakan kebutuhan hidup setiap orang.
19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Data tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 adalah 7,15%, dan data capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023 meningkat menjadi 8,92%. Peningkatan ini disebabkan oleh besarnya pencari kerja di Kota Pontianak yang tidak hanya berasal dari penduduk asli, tapi juga dari pendatang yang telah menyelesaikan pendidikan di Kota Pontianak, di tambah lagi terbatasnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja.
Usulan tindak lanjut:
 - mendorong lapangan usaha atau sektor industri kreatif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
 - meningkatkan jiwa dan ketrampilan berwirausaha masyarakat.
 - Mendorong dan membina UMKM di masyarakat.

2.5.4. Evaluasi Misi IV

Adapun sasaran pokok dari misi empat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya drainase kota, daerah resapan, dan ruang terbuka hijau yang mampu mengurangi genangan air dan mencegah terjadinya banjir terutama di kawasan perdagangan, jasa ruas jalan, dan pemukiman.
2. Terwujudnya kualitas, dan kuantitas jalan yang cukup baik untuk menunjang perdagangan, jasa dan mampu menjaga keseimbangan pertumbuhan kendaraan. Pembangunan jalan yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan baik terhadap fungsi, lebar, ada daerah pengawasan jalan maupun adanya jalur hijau, trotoar dan sarana penyanggah cacat. Terwujudnya swasta ikut berinvestasi membangun dan mengelola jalan serta partisipasi masyarakat dalam membangun jalan lokal. Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran pokok ini karena meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan kota.
3. Terwujudnya penduduk Kota Pontianak, termasuk keluarga miskin, memiliki perumahan dan pemukiman sehat dilengkapi sarana seperti air bersih, sanitasi lingkungan yang aman, bebas genangan dan sarana persampahan.
4. Terwujudnya kota dengan kualitas dan kuantitas air bersih yang memenuhi syarat dengan cakupan layanan mendekati 90% oleh PDAM dan adanya cadangan air bersih yang memenuhi syarat dari air hujan oleh masyarakat. Munculnya operator air bersih selain PDAM sebagai kompetitor dalam mengolah dan mendistribusikan air.
5. Terwujudnya kota dengan banyak alternatif transportasi umum baik secara massal atau individu yang terintegrasi, baik moda transportasi darat, laut, sungai dan udara yang aman, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien untuk menunjang kota perdagangan dan jasa.
6. Terwujudnya kota dengan daya listrik yang cukup secara kualitas dan kuantitas untuk menunjang visi kota dalam sektor perdagangan, jasa, industri dan kebutuhan rumah tangga. Terwujudnya kota yang mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk penyediaan listrik dan sumber energi alternatif lain sesuai kebutuhan perdagangan, jasa, industri dan rumah tangga.
7. Terwujudnya kota dengan tata ruang yang optimal bagi semua masyarakat di tingkat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, serta dalam sektor

perdagangan dan jasa, yang konsisten dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan.

8. Terwujudnya pertumbuhan kawasan perkotaan dengan kesenjangan wilayah yang relatif kecil dan berdasarkan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Kesenjangan relatif kecil pada sarana, prasarana dasar, pendapatan dan kualitas lingkungan di semua wilayah kecamatan.
9. Terwujudnya kualitas air permukaan yang memenuhi syarat untuk diolah sebagai air baku dan kondisi kualitas lingkungan udara dengan kualitas tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan.

Berikut tabel capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 untuk Misi 4:

Tabel 2.60 Capaian Indikator Sasaran Pokok Misi 4

Indikator	Satuan	Target Capaian (2025) pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Rasio Capaian Akhir Kinerja terhadap Target RPJPD (%)	Kriteria Rasio Capaian Akhir kinerja
Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	%	60	53,21	88,68	Tinggi
Rasio Infrastruktur Jalan	%	92	90,58	98,46	Sangat Tinggi
Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	%	100	92,35	92,35	Sangat Tinggi
Cakupan Layanan Air Bersih PDAM	%	84,1	87,78	104,38	Sangat Tinggi
Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,037	126,00	Sangat Tinggi
Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang	%	95	88,50	93,16	Sangat Tinggi
Persentase Kawasan Tidak Kumuh	%	100	99,95	99,95	Sangat Tinggi
IKLH	Indeks	63,4	60,71	95,76	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Misi 4 (%)				99,84	Sangat Tinggi

Sumber: Perangkat Daerah terkait, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui, secara umum untuk indikator kuantitatif capaian sasaran pokok Misi 4 sangat tinggi yaitu 99,84%. Dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok dan indikator kualitatif sebagai berikut:

1. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase
Adapun panjang saluran drainase primer 131.870m, saluran sekunder 127.220 m dan saluran tersier 345.715 m.
Faktor penghambat keberhasilan:
 - Belum memiliki perencanaan sistem drainase terintegrasi
 - Kurangnya penegakan hukum
 - Perkembangan kota termasuk pembangunan jalan telah mengecilkan fungsi drainase.
 - Efek dari pemanasan global dan naiknya permukaan laut, mengakibatkan kapasitas drainase yang ada tidak memadai.



Usulan tindak lanjut:

- Menyusun masterplan sistem drainase terintegrasi
- Penegakan hukum Perda
- Prioritas yang berimbang antara pembangunan saluran drainase/koker dengan pembangunan turap.
- pembangunan drainase lebih memperhatikan sistem yang saling berhubungan terutama pada daerah resiko genangan.

2. Rasio Infrastruktur Jalan

Adapun data total panjang jalan adalah 304,7 Km , dengan kondisi mantab sebesar 276,17 Km dan kondisi tidak mantab 28,53 Km (terdiri dari rusak ringan 13,91 Km dan rusak berat 14,62Km).

Faktor pendorong keberhasilan adalah perencanaan dan penganggaran yang baik.

Usulan tindak lanjut:

- Pengaturan, penindakan
- Mengoptimalkan perbaikan jalan secara rutin, berkala dan periodik.
- Meningkatkan kualitas kinerja jalan.
- Membangun akses jalan-jalan baru.

3. Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Faktor pendorong keberhasilan adalah adanya Program Hibah Air Minum MBR.

4. Cakupan Layanan Air Bersih PDAM

Faktor pendorong keberhasilan: Dinas PUPR dan Perumda Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak terus membangun Jaringan pipa baru.

Usulan tindak lanjut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas air produksi PDAM dari air bersih menjadi air minum aman.

5. Rata-Rata Waktu Tempuh

Faktor pendorong keberhasilan adalah semakin meningkatnya infrastruktur jalan kota.

Usulan tindak lanjut yaitu penyediaan fasilitas transportasi publik.

6. Daya Listrik Terpasang

Pada data Daya Terpasang capaian pada awal tahun perencanaan (2005) sebesar 163.900.00 kw, dan data capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 666.503.781.92 kw, tumbuh 406.552,7% jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun perencanaan (2005).

7. Persentase Pemanfaatan lahan Sesuai Tata Ruang

Faktor pendorong keberhasilan:

- Tersedianya regulasi tata ruang (Perda dan Perwa)
- Kesadaran masyarakat
- Penegakan hukum

Usulan tindak lanjut:

- Penegakan hukum Perda
- Edukasi masyarakat terkait pembangunan sesuai tata ruang
- Membuat kebijakan arah pembangunan vertikal
- Membuat kebijakan penampungan air hujan.



8. Persentase Kawasan Tidak Kumuh

Capaian Pengurangan Kumuh hingga Tahun 2019 menyisakan 3.49 Ha, berdasarkan Permen PUPR Tahun No. 14 Tahun 2018, dilakukan pendataan kembali baseline kumuh dan didapat luas kumuh 150,16 Ha dengan kondisi Kumuh Ringan.

Faktor pendorong keberhasilan:

- Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
- Penguatan program pemerintah pusat melalui Program KOTAKU Pontianak.
- Adanya kebijakan dan dukungan dana APBD untuk mengatasi kekumuhan (contoh: bedah rumah, bedah WC).

Usulan tindak lanjut:

- Penguatan dukungan dana APBD dalam program menuntaskan kekumuhan.
- Mengoptimalkan Peran Pokja PKP.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Faktor pendorong keberhasilan:

- Kolaborasi dan kerjasama pemangku kepentingan, mitra usaha dalam pelaksanaan program kegiatan.
- Inovasi yg mendukung peningkatan IKLH.
- Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program kegiatan.
- SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
- Publikasi dan pemberian informasi terkait program kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan IKLH.

Usulan tindak lanjut:

- Melakukan penanaman di lokasi RTH sesuai dalam RTRW.
- Mengembalikan Fungsi sempadan sungai sebagai RTH, inspeksi sungai, dan sebagai tempat wisata air sebagai sarana rekreasi, sosialisasi dan edukasi peluang ekonomi
- Membangun IPAL komunal skala perkotaan.
- Melakukan kampanye perilaku menjaga lingkungan.
- Melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor.
- Melaksanakan aksi-aksi peningkatan kualitas lingkungan hidup secara terintegrasi dengan melibatkan mitra dan para pihak sesuai peran masing masing.
- Penyiapan lahan untuk taman kehati.
- Melakukan kegiatan parit bersih dalam program Jumat bersih .
- Penerapan peraturan tentang perijinan perumahan dikaitkan dengan kewajiban membangun dan mengoperasikan IPAL komunal.

2.5.5. Evaluasi Misi V

Adapun sasaran pokok dari misi lima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat yang paham politik, berkurangnya politisasi identitas etnik, agama, dan efektifnya pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang politik, paham mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan beretika dalam berpolitik.
2. Arah pembangunan bidang hukum adalah mewujudkan optimalisasi sinergi antara aspek substansi, struktur dan kultur hukum daerah, melalui:
 - a. Harmonisasi seluruh produk hukum daerah agar sesuai dengan visi kota;

- b. Mengoptimalkan peran/partisipasi masyarakat, Panitia Ran HAM Kota dan Prolegda dalam setiap penyusunan produk hukum daerah;
 - c. Terbangunnya budaya hukum yang mendorong meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum.
3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui kemitraan polisi, swasta dan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga di bidang keamanan dan ketertiban. Penggunaan pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang tepat sasaran dan seimbang.
 4. Terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Terwujudnya organisasi pemerintah yang adaptif sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan efektif dalam menjalankan fungsi dan koordinasi.
 6. Terwujudnya optimalisasi anggaran berbasis kinerja dan karakteristik mendorong anggaran publik yang besar dan memperkecil anggaran aparatur.

Berikut tabel capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 untuk Misi 5:

Tabel 2.61 capaian indikator sasaran pokok Misi 5

Indikator	Satuan	Target Capaian (2025) pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota	Rasio Capaian Akhir Kinerja terhadap Target RPJPD (%)	Kriteria Rasio Capaian Akhir kinerja
Angka konflik	Angka	0	0	100,00	Sangat Tinggi
Angka kriminalitas	Angka	984	1.295	68,39	Rendah
Nilai AKIP	Nilai	80-90 (A)	72,58 (BB)	90,73	Tinggi
Indeks RB	Indeks	80,74	77,74	96,28	Sangat Tinggi
Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Sangat baik	Sangat baik	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Misi 5 (%)				92,57	Sangat Tinggi

Sumber: Perangkat Daerah dan BPS Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat diketahui, secara umum untuk indikator kuantitatif capaian sasaran pokok Misi 5 sangat tinggi yaitu 92,57%. Dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok dan indikator kualitatif sebagai berikut:

1. **Angka Konflik**
Yang dimaksud "konflik" adalah konflik sosial berdasarkan UU No 7 th 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dianggap terjadi konflik ketika pertentangan mencapai skala level kabupaten/kota.
Faktor pendorong keberhasilan:
 - Kebijakan Pemerintah yang netral dan tidak represif dalam menangani konflik
 - Penanganan yang bersifat pencegahan masih terus dilaksanakan.



- Peran para tokoh agama dan masyarakat yang mau terlibat dalam dialog dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah

Usulan tindak lanjut:

- Menjaga kebijakan dan tindakan Pemerintahan yang mengayomi perbedaan.
- Menjaga kebijakan agar adil dengan tetap memperhatikan komposisi elemen dalam masyarakat seperti agama, budaya, suku, dan lain-lain, sebagai modal persatuan dan integrasi bukan modal perpecahan.
- menjaga dialog antar elemen masyarakat.

2. Angka Kriminalitas

Faktor penghambat keberhasilan:

- Tingginya tingkat pengangguran
- Dampak penyalahgunaan narkoba.

Usulan tindak lanjut:

- meningkatkan patroli dan pengawasan aparat dan melibatkan multi sektor seperti Kepolisian, Satpol PP, aparat kelurahan/kecamatan.
- meningkatkan taraf pendidikan warga kota.
- meningkatkan kesejahteraan dan mempersempit ketimpangan ekonomi antar warga negara.
- Sosialisasi bahaya narkoba

3. Nilai AKIP

Dari 32 Perangkat Daerah, baru 8 yang telah mencapai nilai A.

Faktor penghambat keberhasilan:

- hal-hal yang kerap menjadi temuan dalam evaluasi SAKIP oleh Lemahnya kapabilitas SDM
- Perencanaan, pelaksanaan diseluruh PD dan evaluasi dari instansi pengawas dan pelaporan belum optimal

Usulan tindak lanjut:

- Pemda Kota Pontianak masih belum mampu membuat aplikasi yang dapat menghubungkan penilaian kinerja organisasi dan kinerja individu
- Tim SAKIP segera menyiapkan aplikasi yang terintegrasi untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah serta mengkaitkannya dengan aplikasi kinerja individu pegawai.

4. Indeks RB

Faktor pendorong keberhasilan:

- Sudah ditetapkannya agen perubahan monev telah dilakukan terhadap efektivitas peraturan daerah dan peraturan walikota
- Seluruh PD telah menyusun Matrik Peran Hasil (MPH) hingga level pegawai terbawah yang telah mengacu pada sasaran organisasi
- Pemda telah melakukan asesment kepada pegawai eselon II, III, IV dan menyusun HCDP dan menyusun Standar Kompetensi jabatan
- Telah mengikutsertakan Tim Penilai Internal dan unit kerja yang telah membangun ZI dalam bimtek, seminar, sosialisasi guna meningkatkan pemahaman ZI pada unit kerja lain
- PD telah melibatkan peran masyarakat an stakeholder dalam pelayan publik.

Usulan tindak lanjut:

- melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi reformasi birokrasi, dengan menuangkannya dalam rencana aksi.



- mendorong agen perubahan untuk meningkatkan pemahaman pegawai lain dalam hal budaya kerja dan pencapaian kinerja.
 - menyusun peta keterkaitan antar kebijakan sehingga dapat diidentifikasi keterkaitan kebijakan satu dengan lainnya baik internal Pemda maupun dengan peraturan lainnya.
 - Melakukan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi PD saat ini.
 - Perangkat Daerah diminta menyusun peta proses bisnis untuk kemudian dijabarkan dalam SOP yang mendukung kinerja.
 - meningkatkan peran manajemen SPBE di Kota Pontianak.
 - meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen SDM dengan melakukan asesment kepada seluruh pegawai untuk menjadi landasan pengembangan karir.
 - melakukan reviu dan penyempurnaan cascading dan pohon kinerja Perangkat Daerah.
 - meningkatkan kualitas APIP dalam penilaian resiko.
 - meningkatkan peran Tim penilai internal dalam pendampingan membangun ZI.
 - Terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
 - menyusun kebijakan teknis terkait reward and punishment bagi pegawai yang ada dalam pelaksanaan pemberian layanan publik.
5. Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Faktor pendorong keberhasilan: Pengawasan inspektoran cukup baik.
Usulan tindak lanjut: terus memperkuat pencegahan terjadinya potensi kesalahan-kesalahan dalam penatausahaan keuangan serta sosialisasi yang intensif terkait pengelolaan keuangan.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat
Faktor pendorong keberhasilan:
- komitmen Pimpinan Daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga Kota.
 - penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang cukup masif untuk mempercepat layanan
 - infrastruktur teknologi informasi di Kota Pontianak sudah memadai.
 - tingkat literasi teknologi warga Kota mulai meningkat.
 - penilaian rutin dari lembaga penilai layanan publik (ombudsman, inspektorat, LSM dll) mendorong penyedia layanan untuk terus menjaga kualitas layanan.

Secara keseluruhan, indikator yang belum tercapai dengan kategori rendah adalah indikator angka kriminalitas dan persentase sertifikasi guru, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya lebih konkrit pada perencanaan berikutnya.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Tren Demografi

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2018). Proyeksi penduduk digunakan untuk memproyeksi kebutuhan

infrastruktur di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk Kota Pontianak telah dihitung oleh BPS Kota Pontianak dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.62 Hasil Proyeksi Penduduk Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang akan dilayani di Kota Pontianak pada tahun 2045 diprediksi akan mencapai 742.045 jiwa atau meningkat sebanyak lebih dari 60 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terjadi karena ada adanya penurunan penduduk usia muda serta penurunan angka pernikahan, sehingga angka kelahiran ikut menurun.

Setelah mengetahui proyeksi penduduk total dari Kota Pontianak di tahun 2045, maka disusunlah proyeksi komposisi penduduk menurut kecamatan dengan menggunakan metode *shift-share* dengan menggunakan basis data di tahun 2015-2019. Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pontianak Barat, yakni 162.184 jiwa di tahun 2045. Sementara itu, kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Pontianak Tenggara sebesar 60.357 jiwa di tahun 2045.

Tabel 2.63 Proyeksi Komposisi Penduduk Per-Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Kecamatan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Pontianak Tenggara	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Pontianak Timur	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Pontianak Barat	150.517	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Pontianak Kota	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Pontianak Utara	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Kota Pontianak	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045

Sumber: Hasil Analisis Olahan dari BPS Kota Pontianak, 2024

Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2023 adalah 5.709 jiwa/km². Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk pada Kota Pontianak, maka akan ada peningkatan kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, kepadatan penduduk Kota Pontianak di tahun 2045 diprediksi berada pada angka 6.278 jiwa/km² atau 62,78 jiwa/ha. Dengan kata lain, akan ada peningkatan ±569 jiwa/km² atau ±6 jiwa/ha pada tahun yang akan datang. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, kepadatan penduduk di Kota Pontianak sampai tahun 2045 akan masih tetap rendah, karena di bawah 150 jiwa/ha. Dengan luas Kota Pontianak sebesar 118,209 km², berikut ini adalah proyeksi kepadatan penduduk Kota Pontianak dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Tabel 2.64 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2025-2045

Kepadatan Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk				
	2025	2030	2035	2040	2045
5.709 (jiwa/km ²)	5.804 (jiwa/km ²)	5.992 (jiwa/km ²)	6.131 (jiwa/km ²)	6.226 (jiwa/km ²)	6.278 (jiwa/km ²)
57,09 jiwa/ha	58,04 jiwa/ha	59,92 jiwa/ha	61,31 jiwa/ha	62,26 jiwa/ha	62,78 jiwa/ha

Sumber: Hasil Analisis Olahan dari BPS Kota Pontianak, 2024

Di tahun 2023, rasio penduduk Kota Pontianak adalah 1, artinya jumlah laki-laki dan perempuan seimbang. Namun pada tahun 2045, rasio penduduk diproyeksikan akan menurun ke angka 0,98. Hal ini menandakan bahwa jumlah perempuan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Hal ini disebabkan karena angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.

Tabel 2.65 Proyeksi Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2022 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Laki-laki	45.879	52.517	55.152	57.344	59.136	60.534
Perempuan	46.794	52.848	55.565	57.925	59.927	61.537
Pontianak Tenggara						
Laki-laki	24.297	27.141	27.982	28.574	28.949	29.123
Perempuan	24.562	28.394	29.381	30.149	30.711	31.057
Pontianak Timur						
Laki-laki	54.264	51.169	52.689	53.737	54.376	54.637
Perempuan	53.633	50.608	52.303	53.608	54.541	55.090
Pontianak Barat						
Laki-laki	75.294	75.767	77.836	79.198	79.952	80.146
Perempuan	75.264	75.471	77.850	79.638	80.869	81.525
Pontianak Kota						
Laki-laki	62.950	66.839	68.465	69.458	69.912	69.872
Perempuan	64.243	68.213	70.611	72.487	73.868	74.732
Pontianak Utara						
Laki-laki	74.011	69.447	70.995	71.881	72.204	72.015
Perempuan	72.119	67.605	69.440	70.731	71.512	71.777
KOTA PONTIANAK						
Laki-laki	334.777	342.880	353.119	360.192	364.529	366.327
Perempuan	335.018	343.139	355.150	364.538	371.428	375.718
Rasio	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98

Sumber: Hasil Analisis Olahan dari BPS Kota Pontianak, 2024

Penduduk berdasarkan usia tahun 2025-2045 akan mengalami pergeseran. Meskipun jumlah penduduk bertambah, namun penduduk usia muda akan berkurang, sedangkan penduduk usia lanjut akan bertambah. Hal ini dikarenakan Indonesia menghadapi tantangan kecenderungan penurunan fertilitas hingga melewati *replacement level* dan juga *population aging*.

Di tahun 2045, populasi penduduk tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun berada di angka 141.674 jiwa atau 19% dari jumlah penduduk Kota Pontianak dan penduduk

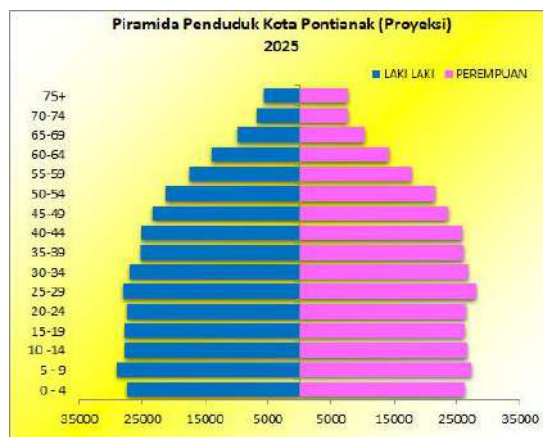
usia 65 tahun ke atas di tahun 2045 diprediksi mencapai angka 108.955 atau 15%. Persentase populasi penduduk usia muda mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan penduduk diatas 65 tahun sebesar 9% dibandingkan dengan tahun 2022 artinya, 15 dari 100 penduduk di Kota Pontianak adalah lansia. Sementara itu, persentase penduduk usia produktif di tahun 2045 adalah 491.416 jiwa atau 66%, dimana akan mengalami penurunan 3% dibandingkan dengan tahun 2022. Meski demikian, bonus demografi di Kota Pontianak masih akan tetap berlaku hingga tahun 2045.

Dengan adanya hal tersebut, maka *dependency ratio* juga akan meningkat. Pada tahun 2023 *dependency ratio* Kota Pontianak adalah 45 lalu akan meningkat ke angka 51 pada tahun 2045. Artinya pada tahun 2045, 100 penduduk produktif akan menanggung 51 penduduk non-produktif di Kota Pontianak. Angka ketergantungan akan meningkat 6 orang pada 20 tahun yang akan datang.

Tabel 2.66 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

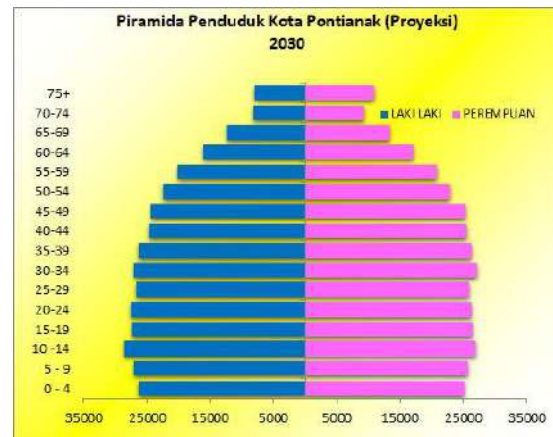
Kelompok umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	165.405	164.174	159.543	151.719	146.030	141.674
15-64 tahun	466.897	473.566	486.561	495.680	495.892	491.416
> 65 tahun	43.166	48.279	62.165	77.331	94.035	108.955
Angka ketergantungan	45	45	46	46	48	51

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024



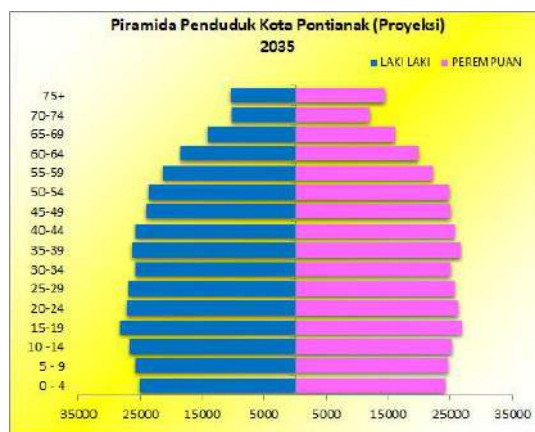
Grafik 2.7 Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2025

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024



Grafik 2.8 Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2030

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024



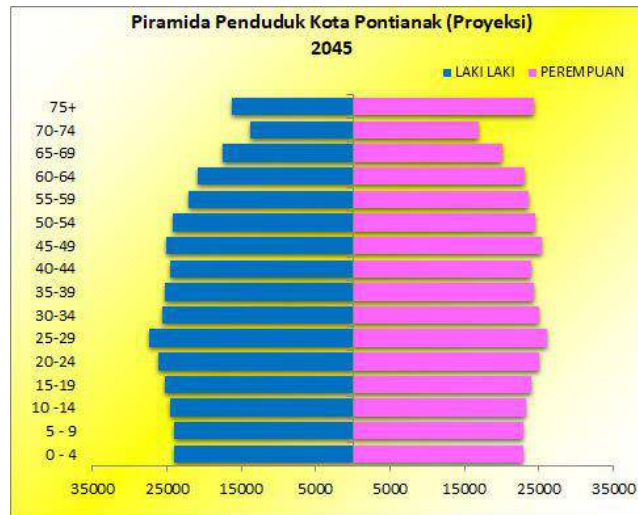
Grafik 2.9 Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2035

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024



Grafik 2.10 Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2040

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024



Grafik 2.11 Piramida Penduduk Kota Pontianak Tahun 2045
Sumber: BPS Kota Pontianak, 2024

2.6.2. Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar

A. Rumah/Tempat Tinggal Permukiman

Dengan adanya peningkatan penduduk, maka akan ada peningkatan permintaan kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Untuk mengetahui kebutuhan lahan pemukiman atau unit rumah hingga tahun 2045, maka diperlukan perhitungan proyeksi kebutuhan pemukiman baik lahan yang dibutuhkan maupun unit yang dibutuhkan.

Perhitungan proyeksi ini menggunakan asumsi dari SNI 03-1733-2004, yaitu jumlah penghuni rumah rata-rata adalah 5 jiwa dan kebutuhan kavling minimum per rumah adalah 100 m². Meskipun begitu, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 4 orang di Kota Pontianak pada tahun 2019. Dengan asumsi setiap rumah tangga adalah satu rumah, berikut ini adalah hasil proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal pemukiman pada Kota Pontianak dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Tabel 2.67 Proyeksi Kebutuhan Unit Rumah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Jumlah Penduduk (jiwa)	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Proyeksi Kebutuhan Rumah	19.362	26.360	27.714	28.869	29.834	30.604
Pontianak Tenggara						
Jumlah Penduduk (jiwa)	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Proyeksi Kebutuhan Rumah	13.915	13.894	14.359	14708	14.950	15.089
Pontianak Timur						
Jumlah Penduduk (jiwa)	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Rumah	26.492	25.462	26.283	26888	27.299	27.519
Pontianak Barat						
Jumlah Penduduk (jiwa)	150.517	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Proyeksi Kebutuhan Rumah	31.277	37.837	38.973	39.786	40.308	40.546
Pontianak Kota						
Jumlah Penduduk (jiwa)	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Proyeksi Kebutuhan Rumah	33.221	33.666	34.583	35.209	35.573	35.685
Pontianak Utara						
Jumlah Penduduk (jiwa)	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Proyeksi Kebutuhan Rumah	36.446	34.287	35.156	35.724	36.025	36.068
Kota Pontianak						
Jumlah Penduduk (jiwa)	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Proyeksi Kebutuhan Rumah	160.713	171.506	177.068	181.184	183.989	185.511

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.68 Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Ruang untuk Permukiman				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Proyeksi Kebutuhan Ruang (m ²)	16.071.300	17.150.475	17.706.725	18.118.250	18.398.925	18.551.125
Proyeksi Kebutuhan Ruang (ha)	1.607,13	1.715,05	1.770,67	1.811,83	1.839,89	1.855,11
Proyeksi Kebutuhan Ruang (km ²)	16,07	17,15	17,71	18,12	18,40	18,55

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kota Pontianak tahun 2013-2033, wilayah yang direncanakan menjadi zona perumahan hingga tahun 2033 ada sebanyak 62,380425 km² atau ±44 km² lebih banyak dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan ruang minimum pemukiman di tahun 2045. Kebutuhan rumah di tahun



2045 adalah 185.511 unit, dengan kebutuhan ruang minimum untuk pemukiman di tahun 2045 adalah 1.855,11 ha atau 18,55 km².

B. Air Minum

Penyediaan air minum/bersih berasal dari sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan air sumur. Untuk Kota Pontianak sendiri secara keseluruhan diharapkan menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM. Dasar analisis penyediaan air bersih ini berasal dari proyeksi penduduk yang ada selama periode waktu perencanaan, rata-rata konsumsi air bersih pada masing-masing pelanggan dan presentase kehilangan air pada tahun ini. Perhitungan kebutuhan air bersih pada kawasan perkotaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Domestik

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air bersih untuk menunjang aktivitas rumah tangga yang perhitungannya didasarkan pada jumlah penduduk. Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan standar kriteria serta pelayanan berdasarkan pada ukuran atau kategori kotanya.

Tabel 2.69 Standar Kebutuhan Domestik

Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Keb. Domestik (Ltr/Org/Hari)	Non Domestik
Metropolitan	> 1 juta	190	Berdasarkan survei masterplan
Kota Besar	500 ribu – 1 juta	170	
Kota Sedang	100 – 500 ribu	150	
Kota Kecil	20 – 100 ribu	130	20 – 30% keb. Domestik
Kota Kecamatan	3 – 20 ribu	100	10 – 20% keb. Domestik
Pedesaan	<3000	60	-

Sumber: Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Dep. PU dalam Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, 2006

Perhitungan kebutuhan air domestik didasarkan pada rumus berikut:

$$\text{Kebutuhan Air Domestik} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air Per Kapita}$$

Sesuai dengan standar, Kota Pontianak pada tahun 2023 dengan penduduk 675.468 jiwa dapat diklasifikasikan sebagai kota besar. Maka, kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih adalah sebesar 170 liter/orang/hari. Sedangkan pada tahun 2045, jumlah penduduk di Kota Pontianak diprediksi akan menjadi 742.045 jiwa dimana klasifikasinya tetap sebagai kota besar. Jadi kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih di Kota Pontianak adalah 170 liter/orang/hari.

b. Kebutuhan Non Domestik

Kebutuhan non domestik meliputi kebutuhan air selain untuk menunjang kegiatan rumah tangga, yang dapat ditujukan untuk melayani kegiatan komersial, industri, fasilitas umum dan lain sebagainya. Proporsi/perkiraan kebutuhan air non domestik ini setiap tahun dianggap sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, yakni 10-20% dari kebutuhan domestik. Sementara itu, asumsi untuk tiap jenis kebutuhan air non domestik dapat diuraikan sebagai berikut:

- Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
- Kantor = 15% x kebutuhan domestik
- Komersial = 20% x kebutuhan domestik
- Industri = 10% x kebutuhan domestik

c. Kebocoran/Kehilangan Air

Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen (uncounted water) sesuai dengan yang tercatat pada meter air pelanggan. Secara umum, kebocoran air diasumsikan sebesar 20% dari kebutuhan total, dimana kebocoran ini dapat terjadi pada saat distribusi air ke tiap konsumen. Kebocoran/kehilangan air terdiri dari 2 (dua) macam, yakni:



- 1) Kehilangan teknis, yang terjadi karena adanya perbedaan angka pemakaian air (volume) yang diukur dari meter air pelanggan atau terjadi karena kebocoran pada jaringan perpipaan air bersih.
- 2) Kehilangan non teknis, yang terjadi karena kesalahan pembacaan meter air serta adanya kerjasama antara petugas dan konsumen maupun dikarenakan adanya sambungan pipa air bersih secara ilegal.

Sesuai dengan hasil proyeksi dimana jumlah penduduk pada Kota Pontianak terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga menyebabkan kebutuhan air bersih pada kawasan perencanaan juga mengalami peningkatan. Standar kebutuhan air bersih kemudian didasarkan pada beberapa perhitungan sebagai berikut:

- Kebutuhan Air Domestik = \sum Penduduk x Kebutuhan Air per Kapita
- Kebutuhan Non Domestik
 - Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
 - Kantor = 15% x kebutuhan domestik
 - Komersial = 20% x kebutuhan domestik
 - Industri = 10% x kebutuhan domestik
- Hidran air = 20% x (keb. domestik + keb. non domestik)
- Kehilangan Air = 20% x (keb. domestik + keb. non domestik)
- Kebutuhan Total = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran
- Kebutuhan Rata-rata Harian = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran + kehilangan air
- Kebutuhan Harian Maksimum = 1,15 x kebutuhan rata-rata harian.

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kebutuhan air bersih di Kota Pontianak pada masa mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	675.468	114.829.560	17.224.434	17.224.434	22.965.912	11.482.956	36.745.459	36.745.459	220.472.755	257.218.214	295.800.947
2025	686.019	116.623.230	17.493.485	17.493.485	23.324.646	11.662.323	37.319.434	37.319.434	223.916.602	261.236.035	300.421.440
2030	708.269	120.405.730	18.060.860	18.060.860	24.081.146	12.040.573	38.529.834	38.529.834	231.179.002	269.708.835	310.165.160
2035	724.730	123.204.100	18.480.615	18.480.615	24.640.820	12.320.410	39.425.312	39.425.312	236.551.872	275.977.184	317.373.762
2040	735.957	125.112.690	18.766.904	18.766.904	25.022.538	12.511.269	40.036.061	40.036.061	240.216.365	280.252.426	322.290.289
2045	742.045	126.147.650	18.922.148	18.922.148	25.229.530	12.614.765	40.367.248	40.367.248	242.203.488	282.570.736	324.956.346

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	91.290	13.693.500	2.054.025	2.054.025	2.738.700	1.369.350	4.381.920	4.381.920	26.291.520	30.673.440	35.274.456
2025	105.439	15.815.782	2.372.367	2.372.367	3.163.156	1.581.578	5.061.050	5.061.050	30.366.301	35.427.352	40.741.454
2030	110.855	16.628.214	2.494.232	2.494.232	3.325.643	1.662.821	5.321.028	5.321.028	31.926.170	37.247.198	42.834.278
2035	115.474	17.321.103	2.598.165	2.598.165	3.464.221	1.732.110	5.542.753	5.542.753	33.256.518	38.799.271	44.619.161
2040	119.337	17.900.606	2.685.091	2.685.091	3.580.121	1.790.061	5.728.194	5.728.194	34.369.164	40.097.358	46.111.962
2045	122.416	18.362.436	2.754.365	2.754.365	3.672.487	1.836.244	5.875.979	5.875.979	35.255.877	41.131.856	47.301.634

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Tenggara

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	49.176	6.392.880	958.932	958.932	1.278.576	639.288	2.045.722	2.045.722	12.274.330	14.320.051	16.468.059
2025	55.577	7.225.061	1.083.759	1.083.759	1.445.012	722.506	2.312.020	2.312.020	13.872.118	16.184.138	18.611.758
2030	57.437	7.466.851	1.120.028	1.120.028	1.493.370	746.685	2.389.392	2.389.392	14.336.354	16.725.746	19.234.608
2035	58.831	7.648.018	1.147.203	1.147.203	1.529.604	764.802	2.447.366	2.447.366	14.684.194	17.131.560	19.701.294
2040	59.802	7.774.242	1.166.136	1.166.136	1.554.848	777.424	2.487.758	2.487.758	14.926.545	17.414.303	20.026.448
2045	60.357	7.846.363	1.176.955	1.176.955	1.569.273	784.636	2.510.836	2.510.836	15.065.018	17.575.854	20.212.232

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.73 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	110.904	14.417.520	2.162.628	2.162.628	2.883.504	1.441.752	4.613.606	4.613.606	27.681.638	32.295.245	37.139.532
2025	101.848	15.277.266	2.291.590	2.291.590	3.055.453	1.527.727	4.888.725	4.888.725	29.332.350	34.221.075	39.354.236
2030	105.130	15.769.507	2.365.426	2.365.426	3.153.901	1.576.951	5.046.242	5.046.242	30.277.453	35.323.695	40.622.250
2035	107.551	16.132.679	2.419.902	2.419.902	3.226.536	1.613.268	5.162.457	5.162.457	30.974.743	36.137.201	41.557.781
2040	109.195	16.379.213	2.456.882	2.456.882	3.275.843	1.637.921	5.241.348	5.241.348	31.448.090	36.689.438	42.192.854
2045	110.075	16.511.297	2.476.694	2.476.694	3.302.259	1.651.130	5.283.615	5.283.615	31.701.689	36.985.304	42.533.100

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.74 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Barat

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	150.517	22.577.550	3.386.633	3.386.633	4.515.510	2.257.755	7.224.816	7.224.816	43.348.896	50.573.712	58.159.769
2025	151.346	22.701.900	3.405.285	3.405.285	4.540.380	2.270.190	7.264.608	3.632.304	43.587.648	47.219.952	54.302.945
2030	155.891	23.383.655	3.507.548	3.507.548	4.676.731	2.338.365	7.482.770	7.482.770	44.896.618	52.379.387	60.236.295
2035	159.143	23.871.415	3.580.712	3.580.712	4.774.283	2.387.142	7.638.853	7.638.853	45.833.117	53.471.970	61.492.765
2040	161.231	24.184.648	3.627.697	3.627.697	4.836.930	2.418.465	7.739.087	7.739.087	46.434.524	54.173.611	62.299.652
2045	162.185	24.327.750	3.649.163	3.649.163	4.865.550	2.432.775	7.784.880	3.892.440	46.709.280	50.601.720	58.191.978

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Kota

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	123.867	18.580.050	2.787.008	2.787.008	3.716.010	1.858.005	5.945.616	5.945.616	35.673.696	41.619.312	47.862.209
2025	134.662	20.199.355	3.029.903	3.029.903	4.039.871	2.019.936	6.463.794	6.463.794	38.782.762	45.246.556	52.033.540
2030	138.333	20.749.972	3.112.496	3.112.496	4.149.994	2.074.997	6.639.991	6.639.991	39.839.946	46.479.937	53.451.927
2035	140.835	21.125.277	3.168.791	3.168.791	4.225.055	2.112.528	6.760.088	6.760.088	40.560.531	47.320.619	54.418.712
2040	142.293	21.343.929	3.201.589	3.201.589	4.268.786	2.134.393	6.830.057	6.830.057	40.980.343	47.810.400	54.981.960
2045	142.740	21.410.987	3.211.648	3.211.648	4.282.197	2.141.099	6.851.516	6.851.516	41.109.094	47.960.610	55.154.701

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kecamatan Pontianak Utara

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2023	149.714	22.457.100	3.368.565	3.368.565	4.491.420	2.245.710	7.186.272	7.186.272	43.117.632	50.303.904	57.849.490
2025	137.147	20.572.043	3.085.806	3.085.806	4.114.409	2.057.204	6.583.054	6.583.054	39.498.323	46.081.376	52.993.583
2030	140.623	21.093.406	3.164.011	3.164.011	4.218.681	2.109.341	6.749.890	6.749.890	40.499.339	47.249.229	54.336.613
2035	142.896	21.434.391	3.215.159	3.215.159	4.286.878	2.143.439	6.859.005	6.859.005	41.154.030	48.013.035	55.214.990
2040	144.099	21.614.874	3.242.231	3.242.231	4.322.975	2.161.487	6.916.760	6.916.760	41.500.558	48.417.318	55.679.916
2045	144.272	21.640.861	3.246.129	3.246.129	4.328.172	2.164.086	6.925.075	6.925.075	41.550.453	48.475.528	55.746.857

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.77 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Pontianak

Uraian	Kondisi Tahun 2023 (m3/s)	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (m3/s)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Jumlah Penduduk	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	0,30	0,35	0,37	0,39	0,40	0,41
Pontianak Tenggara						
Jumlah Penduduk	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	0,14	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
Pontianak Timur						
Jumlah Penduduk	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37
Pontianak Barat						
Jumlah Penduduk	150.517	151.346	155.891	159.143	161.185	162.185
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,54
Pontianak Kota						
Jumlah Penduduk	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	0,41	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48
Pontianak Utara						
Jumlah Penduduk	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	0,50	0,46	0,47	0,48	0,48	0,48
Kota Pontianak						
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	2,56	2,60	2,68	2,74	2,79	2,81

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Pontianak sampai tahun 2045, diketahui bahwa pada tahun 2023 membutuhkan 2,56 m³/s dan meningkat menjadi 2,81 m³/s di tahun 2045. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan yang terus berubah seiring berjalannya waktu sehingga menimbulkan keberagaman aktivitas di Kota Pontianak yang tentunya membutuhkan air bersih.

C. Energi/Listrik

Sistem kelistrikan di Kota Pontianak utamanya mengandalkan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) untuk mendistribusikan listrik. Setelah itu, daya listrik tersebut dialirkan melalui gardu-gardu distribusi yang tersebar di seluruh Kota Pontianak, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti industri, penerangan, rumah tangga, dan lain-lain. Pengelolaan jaringan listrik di Kota Pontianak ini menjadi tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN). Konstruksi instalasi distribusi primer dan sekunder umumnya dibangun dengan kapasitas sebagai berikut:

1. Instalasi distribusi sekunder (SUTM) – dengan kapasitas 20-50kV
2. Instalasi distribusi tersier (SUTR) – dengan kapasitas 220V

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara maka ditentukan jarak minimum antara penghantar dengan tanah dan benda lain dengan aturan sebagai berikut:

Tabel 2.78 Jarak Minimum antara Penghantar dengan Tanah dan Benda Lain

NO	LOKASI	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	SALURAN KABEL	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1	Bangunan Beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2	Pompa Bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3	Penimbunan Bahan Bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5	Lapangan Terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6	Jalan Raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8	Bangunan Tahan Api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	1,5 m	20 m	20 m
9	Rel Kereta Api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10	Jembatan Besi/Tangga besi/kereta api	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11	Lapangan Olah Raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12	SUTT Lainnya penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi	2,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Sumber: Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/M.PE/1992

Permintaan akan listrik bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan listrik pada tahun berikutnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan jaringan listrik harus disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan listrik yang didasarkan pada jumlah penduduk. Ini menandakan pentingnya proyeksi untuk beberapa tahun ke depan terkait jumlah kebutuhan listrik per individu. Proyeksi kebutuhan listrik menggunakan data dari konsumsi listrik per kWh.

Berikut ini adalah tabel hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kota Pontianak:

Tabel 2.79 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	686.019	56.551.348	678.616.719	823.222.800
2030	708.269	72.734.977	872.819.720	991.576.600
2035	724.730	89.108.452	1.069.301.429	1.159.568.000
2040	735.957	105.399.346	1.264.792.150	1.324.722.600
2045	742.045	121.305.147	1.455.661.764	1.484.090.000

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.80 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	105.439	8.691.721	104.300.654	126.526.256
2030	110.855	11.384.118	136.609.421	155.196.659
2035	115.474	14.197.993	170.375.912	184.758.432
2040	119.337	17.090.783	205.089.396	214.807.278
2045	122.416	20.011.872	240.142.465	244.832.476

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.81 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Tenggara

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	55.577	4.581.467	54.977.605	66.692.875
2030	57.437	5.898.468	70.781.611	80.412.240
2035	58.831	7.233.495	86.801.943	94.129.451
2040	59.802	8.564.464	102.773.569	107.643.355
2045	60.357	9.866.742	118.400.900	120.713.284

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.82 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	101.848	8.395.774	100.749.290	122.218.126
2030	105.130	10.796.225	129.554.699	147.182.063
2035	107.551	13.223.849	158.686.191	172.081.907
2040	109.195	15.638.218	187.658.613	196.550.561
2045	110.075	17.994.451	215.933.415	220.150.621

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.83 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Barat

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	151.346	12.476.056	149.712.674	181.615.200
2030	155.891	16.009.074	192.108.885	218.247.447
2035	159.143	19.567.239	234.806.877	254.628.427
2040	161.231	23.090.534	277.086.410	290.215.772
2045	162.185	26.513.031	318.156.368	324.370.000

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.84 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Kota

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	134.662	11.100.758	133.209.093	161.594.843
2030	138.333	14.205.984	170.471.807	193.666.402
2035	140.835	17.316.248	207.794.980	225.336.283
2040	142.293	20.378.329	244.539.953	256.127.145
2045	142.740	23.334.264	280.011.169	285.479.820

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.85 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kecamatan Pontianak Utara

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik per Bulan (kWh)	Konsumsi Listrik Tahun (kWh)	Konsumsi Listrik per Tahun berdasarkan IUP (kWh)
2025	137.147	11.305.572	135.666.864	164.576.344
2030	140.623	14.441.108	173.293.297	196.871.788
2035	142.896	17.569.627	210.835.525	228.633.500
2040	144.099	20.637.017	247.644.207	259.378.490
2045	144.272	23.584.787	283.017.446	288.544.810

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024



Tabel 2.86 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Pontianak

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan					
Jumlah Penduduk	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Jumlah Rumah	26.360	27.714	28.869	29.834	30.604
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	126.526.256	155.196.659	184.758.432	214.807.278	244.832.476
Pontianak Tenggara					
Jumlah Penduduk	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Jumlah Rumah	13.894	14.359	14.708	14.950	15.089
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	66.692.875.21	80.412.240	94.129.451	107.643.355	120.713.284
Pontianak Timur					
Jumlah Penduduk	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Jumlah Rumah	25.462	26.283	26.888	27.299	27.519
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	122.218.125.55	147.182.063	172.081.907	196.550.561	220.150.621
Pontianak Barat					
Jumlah Penduduk	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Jumlah Rumah	37.837	38.973	39.786	40.308	40.546
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	181.615.200	218.247.447	254.628.427	290.215.772	324.370.000
Pontianak Kota					
Jumlah Penduduk	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Jumlah Rumah	33.666	34.583	35.209	35.573	35.685
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	161.594.843	193.666.402	225.336.283	256.127.145	285.479.820
Pontianak Utara					
Jumlah Penduduk	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Jumlah Rumah	34.287	35.156	35.724	36.025	36.068
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	164.576.344	196.871.788	228.633.500	259.378.490	288.544.810
Kota Pontianak					
Jumlah Penduduk	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Jumlah Rumah	171.505	177.067	181.183	183.989	185.511
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	823.222.800	991.576.600	1.159.568.000	1.324.722.600	1.484.090.000

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Kota Pontianak terus meningkat dari tahun 2023 hingga tahun 2045. Pada awal periode tersebut, wilayah ini memiliki populasi sebanyak 675.468 jiwa yang tersebar dalam 168.867 rumah tangga pada tahun 2023. Proyeksi kebutuhan listrik untuk tahun 2045 dilakukan berdasarkan jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Proyeksi total kebutuhan listrik Kota Pontianak pada tahun 2045 sebesar 1.484.090.000 kWh, yang signifikan lebih tinggi daripada kebutuhan pada tahun 2025 yang mencapai 823.222.800 kWh.

Peningkatan signifikan ini menandakan bahwa perlu adanya strategi pengembangan infrastruktur listrik yang matang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk dan sektor-sektor ekonomi di Kota Pontianak. Pemahaman yang cermat terhadap pola kebutuhan listrik ini menjadi kunci dalam menyusun rencana pengembangan yang efisien dan berkelanjutan untuk memastikan pasokan listrik yang memadai dan handal dalam mendukung kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

D. Persampahan

Analisis sistem manajemen sampah dilaksanakan untuk mengestimasi volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia di suatu kota. Untuk menilai besarnya akumulasi sampah, pedoman yang digunakan adalah SNI-3242-2008 sebagai acuan perhitungan, yang kemudian dibandingkan dengan standar kebutuhan prasarana yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004. Hal ini bertujuan untuk meramalkan infrastruktur persampahan yang diperlukan di dalam wilayah studi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, prediksi untuk volume timbulan sampah dan infrastruktur yang diperlukan di kota kecil ditetapkan sekitar 2,5 liter per orang per hari, sedangkan kota besar ditetapkan sekitar 3 liter per orang per hari.

Tabel 2.87 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--	
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Mobil mengangkut 3x seminggu	
	Bak sampah besar		25 m ³		
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	--	
	Tempat daur ulang sampah		-		

Sumber: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (SNI 03-1733-2004)

Menurut ketentuan tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di skala kecamatan, diperlukan fasilitas persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah berukuran 25 m³ di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setempat. Hasil proyeksi volume sampah dan kebutuhan sarana pengelolaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.88 Proyeksi Timbunan Sampah dan Kebutuhan TPS di Kota Pontianak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Jumlah Penduduk	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	273,87	316,32	332,56	346,42	358,01	367,25
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	11	13	13	14	14	15
Pontianak Tenggara						
Jumlah Penduduk	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	147,53	166,73	172,31	176,49	179,41	181,07
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	6	7	7	7	7	7
Pontianak Timur						
Jumlah Penduduk	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	332,71	305,55	315,39	322,65	327,58	330,23
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	13	12	13	13	13	13
Pontianak Barat						
Jumlah Penduduk	150.517	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	451,55	454,04	467,67	477,43	483,69	486,56
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	18	18	19	19	19	19
Pontianak Kota						
Jumlah Penduduk	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	371,60	403,99	415,00	422,51	426,88	428,22
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	15	16	17	17	17	17
Pontianak Utara						
Jumlah Penduduk	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	449,14	411,44	421,87	428,69	432,30	432,82
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	18	16	17	17	17	17
Kota Pontianak						
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Proyeksi Timbunan Sampah (m ³ /H)	2.026,40	2.058,07	2.124,81	2.174,19	2.207,87	2.226,15
Proyeksi Kebutuhan TPST/TPS3R	81	82	86	87	87	88

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Pada tahun 2023, dengan populasi mencapai 675.468 jiwa di Kota Pontianak, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya diperkirakan sebesar 2.026,40 m³ per hari. Analisis tersebut didasarkan pada standar SNI yang menyatakan bahwa rata-rata setiap individu akan menghasilkan sampah sebanyak 3 liter per hari. Melihat pertumbuhan penduduk, proyeksi untuk tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi 742.045 jiwa, yang kemudian diperkirakan dapat menghasilkan volume sampah sebesar 2.226,14 m³ setiap harinya. Kondisi ini memerlukan perhatian dalam perencanaan manajemen sampah di masa mendatang.

Perhitungan kebutuhan TPS pada tahun tersebut sekitar 89 unit, sementara jumlah TPS yang telah tersedia mencapai 110 unit. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan TPS telah memenuhi kebutuhan hingga tahun 2045. Tetapi, seiring terjadinya peningkatan volume sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota

Pontianak perlu dikembangkan menjadi TPST maupun TPS3R. Distribusi TPS saat ini tersebar di 36 lokasi yang mencakup 6 kecamatan, dengan Kecamatan Pontianak Barat menjadi yang paling banyak, menyediakan 34 kontainer sampah. Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Kota masing-masing memiliki 11 unit TPS. Dalam memenuhi kebutuhan kekurangan TPS, penting untuk memperhatikan lokasi strategis dan keberlanjutan manajemen sampah untuk memastikan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam strategi manajemen sampah di Kota Pontianak, perlu dilakukan evaluasi, termasuk pemantauan perkembangan jumlah penduduk dan implementasi kebijakan yang mendukung pengurangan timbulan sampah serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sampah di setiap kecamatan.

E. Telekomunikasi

Pelayanan jaringan telekomunikasi pada umumnya sudah menjangkau dan melayani Kota Pontianak. Hanya saja pada kenyataannya penggunaan telepon rumah hanya digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Berkembangnya telekomunikasi yang pesat ini ditandai dengan semakin massifnya penggunaan telepon seluler dan makin banyak operator yang melayani telepon jenis ini.

Kebutuhan prasarana telekomunikasi telepon seluler dalam pemenuhan kebutuhan telekomunikasi di wilayah perencanaan akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Menara Telekomunikasi dan Penyiaran adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran. Keberadaan prasarana telekomunikasi sangatlah penting untuk perkembangan teknologi saat ini, mengingat dengan prasarana ini masyarakat dengan mudah bisa menerima informasi terbaru.

Arahan pengembangan untuk kawasan sekitar tower atau telematika, antara lain:

- Penggunaan tanah sekitar tower difungsikan sebagai kawasan RTH, jauh dari pemukiman; dan
- Pemagaran yang rapat pada sepanjang tower demi keamanan, karena tegangan tinggi.

Selain itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika tentang pedoman pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran, beberapa ketentuan yang diatur dalam pengembangan telekomunikasi, antara lain:

- Struktur Menara Telekomunikasi dan Penyiaran;
- Menara Telekomunikasi dan Penyiaran dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung ; dan
- Pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan pondasi; pembebanan; dan struktur.

Menara telekomunikasi dan penyiaran dapat berupa:

- Menara tunggal, apabila digunakan untuk penempatan satu antena atau lebih oleh satu penyelenggara telekomunikasi atau penyiaran; atau
- Menara bersama, apabila digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan atau penyiaran;
- Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dijadikan menara telekomunikasi bersama;

- Menara telekomunikasi yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama;
- Penggunaan Menara Telekomunikasi dan Penyiaran bersama dilarang menimbulkan interferensi antar sistem jaringan ;
- Setiap pengguna Menara Telekomunikasi dan Penyiaran bersama wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah. Beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara.;
- Isolasi antar pemancar merupakan batas aman antar antenna pemancar yaitu 30 dB atau dengan jarak antar antenna 3 meter.

Berdasarkan standar yang ada, jangkauan BTS adalah 10 Km. Hasil analisis menunjukkan bahwa BTS yang ada di Kota Pontianak telah menjangkau seluruh Kota Pontianak. Penggunaan telepon rumah terhitung sangat minim, masyarakat banyak yang beralih menggunakan telepon seluler.

Telepon yang ada di Kota Pontianak selain diperuntukan untuk awasan pemukiman juga untuk fasilitas lainnya. Kebutuhan telepon dikawasan perencanaan memperhatikan standart sebagai berikut:

- 17 satuan sambungan untuk melayani 100 penduduk (kebutuhan domestik);
- Kebutuhan non domestik diperkirakan sebesar 25% dari kebutuhan domestik;
- Distribusi point 8 SS/unit; dan
- Rumah kabel 300 – 500 SS/unit.

Berikut ini adalah hasil analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kota Pontianak pada 20 tahun mendatang:

Tabel 2.89 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	675.468	114.830	14.354	383	230	28.707	3.588	96	57
2025	686.019	116.623	14.578	389	233	29.156	3.644	97	58
2030	708.269	120.406	15.051	401	241	30.101	3.763	100	60
2035	724.730	123.204	15.401	411	246	30.801	3.850	103	62
2040	735.957	125.113	15.639	417	250	31.278	3.910	104	63
2045	742.045	126.148	15.768	420	252	31.537	3.942	105	63

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.90 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	91.290	15.519	1.940	52	31	3.880	485	13	8
2025	105.439	17.925	2.241	60	36	4.481	560	15	9
2030	110.855	18.845	2.356	63	38	4.711	589	16	9
2035	115.474	19.631	2.454	65	39	4.908	613	16	10
2040	119.337	20.287	2.536	68	41	5.072	634	17	10
2045	122.416	20.811	2.601	69	42	5.203	650	17	10

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.91 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Tenggara

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	49.176	8.360	1.045	28	17	2.090	261	7	4
2025	55.577	9.448	1.181	31	19	2.362	295	8	5
2030	57.437	9.764	1.221	33	20	2.441	305	8	5
2035	58.831	10.001	1.250	33	20	2.500	313	8	5
2040	59.802	10.166	1.271	34	20	2.542	318	8	5
2045	60.357	10.261	1.283	34	21	2.565	321	9	5

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.92 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	110.904	18.854	2.357	63	38	4.713	589	16	9
2025	101.848	17.314	2.164	58	35	4.329	541	14	9
2030	105.130	17.872	2.234	60	36	4.468	559	15	9
2035	107.551	18.284	2.285	61	37	4.571	571	15	9
2040	109.195	18.563	2.320	62	37	4.641	580	15	9
2045	110.075	18.713	2.339	62	37	4.678	585	16	9

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.93 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Barat

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	150.517	25.588	3.198	85	51	6.397	800	21	13
2025	151.346	25.729	3.216	86	51	6.432	804	21	13
2030	155.891	26.501	3.313	88	53	6.625	828	22	13
2035	159.143	27.054	3.382	90	54	6.764	845	23	14
2040	161.231	27.409	3.426	91	55	6.852	857	23	14
2045	162.185	27.571	3.446	92	55	6.893	862	23	14

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.94 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Kota

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	123.867	21.057	2.632	70	42	5.264	658	18	11
2025	134.662	22.893	2.862	76	46	5.723	715	19	11
2030	138.333	23.517	2.940	78	47	5.879	735	20	12
2035	140.835	23.942	2.993	80	48	5.985	748	20	12



Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2040	142.293	24.190	3.024	81	48	6.047	756	20	12
2045	142.740	24.266	3.033	81	49	6.066	758	20	12

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.95 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kecamatan Pontianak Utara Berdasarkan Standar

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi							
		Perumahan				Non Perumahan			
		Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal	Satuan Sambungan	Distr. Point (Unit)	Rumah Kabel (Unit) Minimal	Rumah Kabel (Unit) Maksimal
2023	149.714	25.451	3.181	85	51	6.363	795	21	13
2025	137.147	23.315	2.914	78	47	5.829	729	19	12
2030	140.623	23.906	2.988	80	48	5.976	747	20	12
2035	142.896	24.292	3.037	81	49	6.073	759	20	12
2040	144.099	24.497	3.062	82	49	6.124	766	20	12
2045	144.272	24.526	3.066	82	49	6.132	766	20	12

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.96 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi di Kota Pontianak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Jumlah Penduduk	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Perumahan)	15.519	17.925	18.845	19.631	20.287	20.811
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Non Perumahan)	3.880	4.481	4.711	4.908	5.072	5.203
Pontianak Tenggara						
Jumlah Penduduk	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Perumahan)	8.360	9.448	9.764	10.001	10.166	10.261
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Non Perumahan)	2.090	2.362	2.441	2.500	2.542	2.565
Pontianak Timur						
Jumlah Penduduk	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Perumahan)	18.854	17.314	17.872	18.284	18.563	18.713
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Non Perumahan)	4.713	4.329	4.468	4.571	4.641	4.678
Pontianak Barat						
Jumlah Penduduk	150.517	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Perumahan)	25.588	25.729	26.501	27.054	27.409	27.571
Proyeksi Kebutuhan Sambungan (Non Perumahan)	6.397	6.432	6.625	6.764	6.852	6.893
Pontianak Kota						
Jumlah Penduduk	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Sumbangan (Perumahan)	21.057	22.893	23.517	23.942	24.190	24.266
Proyeksi Kebutuhan Sumbangan (Non Perumahan)	5.264	5.723	5.879	5.985	6.047	6.066
Pontianak Utara						
Jumlah Penduduk	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Proyeksi Kebutuhan Sumbangan (Perumahan)	25.451	23.315	23.906	24.292	24.497	24.526
Proyeksi Kebutuhan Sumbangan (Non Perumahan)	6.363	5.829	5.976	6.073	6.124	6.132
Kota Pontianak						
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Proyeksi Kebutuhan Sumbangan (Perumahan)	114.830	116.623	120.406	123.204	125.113	126.148
Proyeksi Kebutuhan Sumbangan (Non Perumahan)	28.707	29.156	30.101	30.801	31.278	31.537

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kota Pontianak terbagi menjadi 2, yaitu proyeksi terhadap kebutuhan perumahan dan proyeksi terhadap kebutuhan non perumahan. Pada proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi pada perumahan, proyeksi satuan sambungan pada tahun 2045 didapat dari perhitungan $17/100$ atau $0,17$ (17 satuan sambungan untuk 100 penduduk) dari jumlah penduduk sehingga hasilnya adalah sebesar 126.148 sambungan.

Pada proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi non perumahan, proyeksi satuan sambungan didapat dari jumlah proyeksi satuan sambungan domestik dikali 25%, yang menghasilkan 31.537 sambungan.

Berdasarkan hasil proyeksi, hasil kebutuhan jaringan telekomunikasi di perumahan jauh lebih besar dibandingkan non perumahan. Pada nyatanya, jaringan telekomunikasi sebagian besar dibutuhkan oleh non perumahan berupa perkantoran maupun industri. Sebagian besar masyarakat dan kegiatan sektor perumahan menggunakan telepon genggam dibanding telepon rumah.

F. Limbah

Perhitungan debit air limbah didasarkan pada jumlah pemakaian air minum. Volume air limbah adalah 80% volume air minum. Untuk pendekatan secara umum berdasarkan Pedoman Konstruksi dan Bangunan dari kementerian PU, kriteria pemakaian air minum untuk kategori kota telah dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.97 Tingkat Pemakaian Air Minum Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Kota

No.	Kategori Kota	Jumlah Penduduk (X 1.000 orang)	Tingkat Pemakaian air minum (ltr/orang/hari)	Debit Air Limbah (ltr/orang/hari)
1	Kota Metropolitan	>1.000	190	152
2	Kota Besar	500-1.000	170	136
3	Kota Sedang	100-500	150	120
4	Kota Kecil	20-100	130	104
5	Kota Kecamatan	3-20	100	80
6	Kota Pusat Pertumbuhan	<3	30	24

Sumber: Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Dep. PU dalam Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, 2006

*digunakan asumsi debit air limbah = 80% debit pemakaian air minum



Berdasarkan Pedoman Konstruksi dan Bangunan, pada tahun 2023 Kota Pontianak dikategorikan sebagai kota besar dengan jumlah penduduk berjumlah 675.468 jiwa. Sehingga pada tahun 2023 tingkat pemakaian air minum di Kota Pontianak adalah 170 L/orang/hari, dengan debit air 136 L/orang/hari. Sedangkan pada tahun 2045, jumlah penduduk di Kota Pontianak diprediksi sebanyak 1.017.365 jiwa, dimana kategorinya tetap sebagai kota metropolitan yaitu dengan debit air limbah 152 L/orang/hari.

$$\text{Proyeksi Total Buangan Limbah} = \text{Debit Air Limbah} \left(\frac{L}{\text{org}} \times \text{Jumlah Penduduk} \right) \frac{1}{\text{hari}}$$

Sistem sanitasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan penanganan limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia/masyarakat. Seiring berjalannya waktu, tentu buangan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Hasil proyeksi buangan limbah di Kota Pontianak pada 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.98 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	675.468	114.829.560	91.863.648	33.530.231.520
2025	686.019	116.623.230	93.298.584	34.053.983.160
2030	708.269	120.405.730	96.324.584	35.158.473.160
2035	724.730	123.204.100	98.563.280	35.975.597.200
2040	735.957	125.112.690	100.090.152	36.532.905.480
2045	742.045	140.988.550	112.790.840	41.168.656.600

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.99 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	91.290	13.693.500	10.954.800	3.998.502.000
2025	105.439	15.815.782	12.652.626	4.618.208.338
2030	110.855	16.628.214	13.302.571	4.855.438.342
2035	115.474	17.321.103	13.856.882	5.057.762.066
2040	119.337	17.900.606	14.320.485	5.226.977.088
2045	122.416	18.362.436	14.689.949	5.361.831.232

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.100 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Tenggara

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	49.176	6.392.880	5.114.304	1.866.720.960
2025	55.577	7.225.061	5.780.049	2.109.717.952
2030	57.437	7.466.851	5.973.481	2.180.320.460
2035	58.831	7.648.018	6.118.414	2.233.221.215
2040	59.802	7.774.242	6.219.394	2.270.078.749
2045	60.357	7.846.363	6.277.091	2.291.138.123

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2. 101 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	110.904	14.417.520	11.534.016	4.209.915.840
2025	101.848	15.277.266	12.221.813	4.460.961.583
2030	105.130	15.769.507	12.615.605	4.604.695.985
2035	107.551	16.132.679	12.906.143	4.710.742.210
2040	109.195	16.379.213	13.103.371	4.782.730.308
2045	110.075	16.511.297	13.209.037	4.821.298.590

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.102 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Barat

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	150.517	22.577.550	18.062.040	6.592.644.600
2025	151.346	22.701.900	18.161.520	6.628.954.800
2030	155.891	23.383.655	18.706.924	6.828.027.258
2035	159.143	23.871.415	19.097.132	6.970.453.200
2040	161.231	24.184.648	19.347.718	7.061.917.117
2045	162.185	24.327.750	19.462.200	7.103.703.000

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.103 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Kota

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	123.867	18.580.050	14.864.040	5.425.374.600
2025	134.662	20.199.355	16.159.484	5.898.211.783
2030	138.333	20.749.972	16.599.977	6.058.991.735
2035	140.835	21.125.277	16.900.221	6.168.580.753
2040	142.293	21.343.929	17.075.143	6.232.427.188
2045	142.740	21.410.987	17.128.789	6.252.008.062

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.104 Proyeksi Total Buangan Limbah di Kecamatan Pontianak Utara

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/hari)	Proyeksi Total Buangan Limbah (L/org/tahun)
2023	149.714	22.457.100	17.965.680	6.557.473.200
2025	137.147	20.572.043	16.457.634	6.007.036.568
2030	140.623	21.093.406	16.874.725	6.159.274.502
2035	142.896	21.434.391	17.147.512	6.258.842.062
2040	144.099	21.614.874	17.291.899	6.311.543.265
2045	144.272	21.640.861	17.312.689	6.319.131.345

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.105 Proyeksi Total Buangan Limbah Kota Pontianak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Limbah (m ³)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Jumlah Penduduk	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	10.954,80	12.652,63	13.302,57	13.856,88	14.320,49	14.689,95
Pontianak Tenggara						
Jumlah Penduduk	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	5.114,30	5.780,05	5.973,48	6.118,41	6.219,39	6.277,09
Pontianak Timur						
Jumlah Penduduk	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	11.534,02	12.221,81	12.615,61	12.906,14	13.103,37	13.209,04
Pontianak Barat						
Jumlah Penduduk	150.517	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	18.062,04	18.161,52	18.706,92	19.097,13	19.347,72	19.462,20
Pontianak Kota						
Jumlah Penduduk	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	14.864,04	16.159,48	16.599,98	16.900,22	17.075,14	17.128,79
Pontianak Utara						
Jumlah Penduduk	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	17.965,68	16.457,63	16.874,72	17.147,51	17.291,90	17.312,69
Kota Pontianak						
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Proyeksi Total Buangan Limbah Per Hari	91.863,65	93.298,58	96.324,58	98.563,28	100.090,15	112.790,84

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Berdasarkan hasil analisis, buangan limbah setiap orang dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan semakin bertambah setiap harinya. Limbah ini berasal dari kegiatan rumah tangga maupun industri di Kota Pontianak yang semakin meningkat. Pada tahun 2023, kebutuhan domestik air bersih adalah sebesar 2,56 m³/s. Setelah digunakan untuk berbagai aktivitas, 80% dari kebutuhan air bersih domestik maka akan menjadi limbah sebanyak 91.863,65 m³ setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2045, kebutuhan domestik air bersih adalah sebesar 2,81 m³/s. Setelah digunakan untuk berbagai aktivitas, 80% dari kebutuhan air bersih domestik maka akan menjadi limbah sebanyak 112.790,84 m³ setiap harinya. Dengan jumlah yang begitu besar, tentu perlu adanya alternatif untuk meminimalisasi jumlah yang semakin besar dan memikirkan masalah pembuangan limbah. Jika buangan limbah tidak mampu diantisipasi, maka berdampak pada lingkungan sekitar.

G. Drainase

Analisis terhadap sistem jaringan drainase ditujukan untuk mengetahui kemampuan sistem drainase yang ada di Kota Pontianak dalam menampung air. Kota Pontianak telah memiliki sistem drainase yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier yang merupakan saluran alam berupa sungai yang langsung tersambung dengan laut dan saluran buatan (parit). Sistem saluran tersier merupakan saluran buatan dengan konstruksi pasangan batu, cor beton dan lain-lain. Sistem saluran drainase di Kota Pontianak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Drainase primer (*maindrain*) adalah saluran yang memanfaatkan sungai dan anak sungai
2. Drainase sekunder (*conveyor*) adalah saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer
3. Drainase tersier (*collector*) adalah saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder berupa plesteran, pipa dan tanah

Berdasarkan SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase dalam menentukan air buangan drainase diasumsikan 70% dari tingkat air bersih di suatu kawasan, sehingga didapatkan rumus untuk menghitung air buangan pada saluran drainase adalah sebagai berikut ini:

$$\text{Air Buangan pada Saluran Drainase} = 70\% \times \text{Kebutuhan Total Air Bersih}$$

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, maka hasil analisis air buangan saluran drainase di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.106 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	675.468	220.472.755	154.330.929
2025	686.019	223.916.602	156.741.621
2030	708.269	231.179.002	161.825.301
2035	724.730	236.551.872	165.586.310
2040	735.957	240.216.365	168.151.455
2045	742.045	242.203.488	169.542.442

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.107 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	91.290	26.291.520	18.404.064
2025	105.439	30.366.301	21.256.411
2030	110.855	31.926.170	22.348.319
2035	115.474	33.256.518	23.279.562
2040	119.337	34.369.164	24.058.415
2045	122.416	35.255.877	24.679.114

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.108 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kec. Pontianak Tenggara

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	49.176	12.274.330	8.592.031
2025	55.577	13.872.118	9.710.483
2030	57.437	14.336.354	10.035.448
2035	58.831	14.684.194	10.278.936
2040	59.802	14.926.545	10.448.582
2045	60.357	15.065.018	10.545.512

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.109 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	110.904	27.681.638	19.377.147
2025	101.848	29.332.350	20.532.645
2030	105.130	30.277.453	21.194.217
2035	107.551	30.974.743	21.682.320
2040	109.195	31.448.090	22.013.663
2045	110.075	31.701.689	22.191.183

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.110 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Barat

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	150.517	43.348.896	30.344.227
2025	151.346	43.587.648	30.511.354
2030	155.891	44.896.618	31.427.632
2035	159.143	45.833.117	32.083.182
2040	161.231	46.434.524	32.504.166
2045	162.185	46.709.280	32.696.496

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.111 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Kota

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	123.867	35.673.696	24.971.587
2025	134.662	38.782.762	27.147.934
2030	138.333	39.839.946	27.887.962
2035	140.835	40.560.531	28.392.372
2040	142.293	40.980.343	28.686.240
2045	142.740	41.109.094	28.776.366

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.112 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainase di Kecamatan Pontianak Utara

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Total Air Bersih (L/H)	Air Buangan pada Saluran Drainase (L/H)
2023	149.714	43.117.632	30.182.342
2025	137.147	39.498.323	27.648.826
2030	140.623	40.499.339	28.349.537
2035	142.896	41.154.030	28.807.821
2040	144.099	41.500.558	29.050.391
2045	144.272	41.550.453	29.085.317

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.113 Proyeksi Buangan Pada Saluran Drainasedi Kota Pontianak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Buangan Drainase (m ³ /H)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pontianak Selatan						
Jumlah Penduduk	91.290	105.439	110.855	115.474	119.337	122.416
Proyeksi Buangan Drainase	18.404,06	21.256,41	22.348,32	23.279,56	24.058,42	24.679,11
Pontianak Tenggara						
Jumlah Penduduk	49.176	55.577	57.437	58.831	59.802	60.357
Proyeksi Buangan Drainase	8.592,03	9.710,48	10.035,45	10.278,94	10.448,58	10.545,51
Pontianak Timur						
Jumlah Penduduk	110.904	101.848	105.130	107.551	109.195	110.075
Proyeksi Buangan Drainase	19.377,15	20.532,65	21.194,22	21.682,32	22.013,66	22.191,18
Pontianak Barat						
Jumlah Penduduk	150.517	151.346	155.891	159.143	161.231	162.185
Proyeksi Buangan Drainase	30.344,23	30.511,35	31.427,63	32.083,18	32.504,17	32.696,50
Pontianak Kota						
Jumlah Penduduk	123.867	134.662	138.333	140.835	142.293	142.740
Proyeksi Buangan Drainase	24.971,59	27.147,93	27.887,96	28.392,37	28.686,24	28.776,37
Pontianak Utara						
Jumlah Penduduk	149.714	137.147	140.623	142.896	144.099	144.272
Proyeksi Buangan Drainase	30.182,34	27.648,83	28.349,54	28.807,82	29.050,39	29.085,32
Kota Pontianak						
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045
Air Buangan Drainase	154.330,93	156.741,62	161.825,30	165.586,31	168.151,46	169.542,44

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Dari hasil perhitungan proyeksi tersebut, dapat diketahui bahwa air buangan pada saluran drainase di Kota Pontianak adalah sebanyak 154.330,93 m³ tahun 2023, sedangkan pada tahun 2045 adalah sebanyak 169.542,44 m³.

H. Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan sebagai pondasi untuk mewujudkan upaya transformatif kesehatan, dimana setiap orang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan yang berkualitas. Puskesmas dan Rumah Sakit yang modern dan lengkap dengan peralatan canggih serta didukung oleh Tenaga Kesehatan yang professional. Kepercayaan publik akan tumbuh seiring dengan keyakinan masyarakat akan mendapatkan perawatan kesehatan terbaik saat dibutuhkan. Fasilitas kesehatan yang baik, baik tingkat pertama maupun tingkat rujukan, merupakan kunci untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Keberadaan insfrastruktur Kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang mendukung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, prinsip dasar Fasilitas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Akses yang Lebih Mudah dan Merata:

Puskesmas yang memadai di setiap kelurahan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan penyakit ringan. Hal ini akan mengurangi beban di rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Rumah sakit yang modern dan lengkap akan menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan yang lebih kompleks.

Dengan infrastruktur yang memadai, pasien tidak perlu lagi pergi ke luar kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Mutu Layanan yang Terjamin:

Fasilitas kesehatan yang baik memungkinkan tenaga kesehatan untuk bekerja dengan lebih optimal. Peralatan medis yang canggih dan ruang perawatan yang nyaman akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pemulihan pasien.

Tenaga kesehatan yang profesional dan terlatih akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan harus menjadi prioritas untuk memastikan mutu layanan yang terjaga.

3. Membuka Peluang Swasta:

Keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana kesehatan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- Memberikan kemudahan dalam investasi Pembangunan dan pengelolaan rumah sakit swasta: Memberikan pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing dalam pelayanan Kesehatan dan menumbuhkan kepercayaan dan branding terhadap mutu layanan rumah sakit dalam negeri.
- Kerjasama pemerintah dengan swasta (PPP): Memanfaatkan sumber daya dan keahlian swasta untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan publik.
- Pendanaan dan filantropi: Mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan melalui program CSR dan donasi.

4. Menanggulangi Tantangan Promosi Layanan Kesehatan di Perbatasan:

Promosi layanan kesehatan di perbatasan harus dilakukan secara strategis dan kreatif untuk menarik pasien dari negara tetangga. Berikut beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan:

- Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan: Menawarkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan berstandar internasional.
- Memanfaatkan teknologi informasi: Menyediakan informasi yang mudah diakses tentang layanan kesehatan di Kota Pontianak melalui website, media sosial, dan aplikasi mobile. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan rumah sakit di swasta untuk menawarkan paket wisata kesehatan yang menarik.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2045 serta piramida kependudukan. Pada tahun 2045 akan terjadi peningkatan penduduk usia lanjut sebagai efek dari bonus demografi yang sedang berlangsung saat ini. Kondisi ini akan berpengaruh pada kebutuhan layanan terhadap usia lanjut yang semakin meningkat, hal ini akan menjadi tantangan khusus bagi pelayanan kesehatan untuk terus meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan pada segmen usia tersebut.

Mempertimbangkan beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai, baik dengan melibatkan pemerintah maupun swasta, merupakan kunci untuk mewujudkan Kota Pontianak yang sehat dan sejahtera. Dengan akses yang mudah, mutu layanan yang terjamin, dan strategi yang tepat, Kota Pontianak dapat menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di Kalimantan Barat maupun regional Kalimantan.



Peran dan Fungsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

1. Posyandu:
 - Peran: Memberikan pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, penimbangan balita, penyuluhan kesehatan, dan pemberian makanan tambahan.
 - Fungsi: Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, remaja dan lansia, serta menekan angka kematian bayi dan balita.
2. Puskesmas:
 - Peran: Memberikan pelayanan kesehatan primer yang paripurna, termasuk upaya Kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 - Fungsi: Menjadi garda terdepan/ gate keeper dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.
3. Klinik:
 - Peran: Memberikan pelayanan Kesehatan perorangan baik rawat inap maupun kesehatan rawat jalan yang lebih spesifik, seperti dokter umum, dokter gigi, spesialis, dan subspecialis.
 - Fungsi: Memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih kompleks.
4. Laboratorium Kesehatan:
 - Peran: Melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosis dan pengobatan penyakit.
 - Fungsi: Meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis, serta mendukung upaya surveilans kesehatan.
5. Dokter Praktek Mandiri dan Dokter Gigi Praktek Mandiri:
 - Peran: Memberikan pelayanan kesehatan individual di luar layanan fasilitas kesehatan institusi.
 - Fungsi: Meningkatkan pilihan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
6. Apotek:
 - Peran: Menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Fungsi: Mendukung upaya pengobatan dan menjaga kesehatan masyarakat.
7. Rumah Sakit:
 - Peran: Memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan rawat inap yang komprehensif, termasuk untuk kedaruratan medis, kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan tindakan medis spesialistik.
 - Fungsi: Menjadi rujukan utama bagi puskesmas dan klinik dalam menangani kasus-kasus yang lebih berat.

Konsep pembangunan Puskesmas di Kota Pontianak sudah berkembang, tidak lagi menggunakan pendekatan konsep Puskesmas Kecamatan tetapi sudah dengan pendekatan Puskesmas Kelurahan dalam rangka meningkatkan akses layanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan UKM dan UKP tingkat pertama di kota Pontianak.

Pertimbangan tersebut juga didasari atas tidak efektifnya keberadaan puskesmas baik dari aspek sarana maupun SDM yang semua sudah di cakup layanannya oleh puskesmas kelurahan. Oleh sebab itu maka rasio kebutuhan sarannya adalah satu puskesmas dibanding 30.000 penduduk, dengan proyeksi penduduk tahun 2023 sampai 2045 sebagaimana terlampir maka jumlah proyeksi kebutuhan puskesmas di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.114 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksistensi	Kebutuhan	Belum Terpenuhi
2023	675.468	30.000	Puskesmas	23	23	0
2025	686.019	30.000	Puskesmas	23	23	0
2030	708.269	30.000	Puskesmas	23	24	1
2035	724.730	30.000	Puskesmas	23	24	1
2040	735.957	30.000	Puskesmas	23	25	2
2045	742.045	30.000	Puskesmas	23	25	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Kebutuhan tempat tidur rumah sakit idealnya adalah satu untuk 1.000 penduduk. Saat ini, Kota Pontianak memiliki 14 (empat belas) rumah sakit, yang secara matematis melebihi target. Beberapa analisa yang dapat mendukung kebutuhan Rumah Sakit di Kota Pontianak adalah :

- Rumah Sakit di Kota Pontianak sebagai RS Rujukan bagi Kab/Kota lainnya di Kalimantan Barat, oleh karena itu, jumlah penduduk Kota Pontianak bukan satu- satunya faktor yang menentukan kebutuhan tempat tidur rumah sakit.
- Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). RS merupakan fasilitas kesehatan yang menangani masalah kesehatan individu dan terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat spesialis, subspecialis; rawat jalan lanjutan; dan perawatan rawat inap kamar. Sistem rujukan berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana RS di kategorikan pada beberapa kelas dengan sistem rujukan berjenjang.
- Kebutuhan akan RS Khusus di Kota Pontianak

Sejalan dengan Transisi Epidemiologi dimana tahun 2045, isu kependudukan pasca Bonus Demografi, dimana jumlah penduduk usia lanjut meningkat dengan risiko penyakit tidak menular. Pada tahun 2045, Rumah Sakit dituntut menjadi fasilitas kesehatan yang sangat kompleks dimana penyakit yang serius dan kompleks harus dilayani dengan cepat dengan menggunakan peralatan yang canggih dan dilakukan oleh tenaga spesialis yang ahli dalam bidangnya.

Pelayanan seperti bedah jantung, transplantasi ginjal dan bedah mikro lainnya menjadi hal umum disediakan oleh suatu rumah sakit (McKee, 2000). Permasalahan

penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan dasar pertimbangan jenis pelayanan yang harus disediakan di Kota Pontianak yang menjadi pusat rujukan regional di Provinsi Kalimantan Barat.



Tabel 2.115 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan Bed*	Kebutuhan RS	Belum Terpenuhi
2023	675.468	1.000	RS	14	675	7	0
2025	686.019	1.000	RS	14	686	7	0
2030	708.269	1.000	RS	14	708	7	0
2035	724.730	1.000	RS	14	725	7	0
2040	735.957	1.000	RS	14	736	7	0
2045	742.045	1.000	RS	14	742	7	0

*Catatan : dengan asumsi 1 RS rata-rata 100 tempat tidur

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.116 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kota Pontianak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Sarana Kesehatan (unit)					Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045		
Jumlah Penduduk	675.468	686.019	708.269	724.730	735.957	742.045		
Proyeksi Sarana Puskesmas	Eksisting	23	23	23	23	23	2	KURANG
	Kebutuhan	23	23	24	24	25		
Proyeksi Sarana Rumah Sakit	Eksisting	14	14	14	14	14	0	CUKUP
	Kebutuhan	7	7	7	7	7		
	Kebutuhan Bed*	675	686	708	725	736		

*Catatan : dengan asumsi 1 RS rata-rata 100 tempat tidur

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan BAPPEDA Kota Pontianak, 2023

Dari tabel di atas disebutkan kebutuhan sarana kesehatan berupa puskesmas pada tahun 2023 yaitu 23 sarana, dan puskesmas di Kota Pontianak yang ada pada saat ini yaitu 23 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana kesehatan berupa puskesmas yang ada di Kota Pontianak sudah memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2045, kebutuhan sarana kesehatan berupa puskesmas yaitu 25 puskesmas, dan puskesmas di Kota Pontianak yang ada pada saat ini yaitu 23 unit, yang berarti bahwa puskesmas yang belum terpenuhi sebanyak 2 unit.

Sedangkan pada sarana kesehatan berupa rumah sakit, saat ini sudah terdapat 14 rumah sakit yang beroperasi di Kota Pontianak. Pada tahun 2045, kebutuhan sarana kesehatan berupa rumah sakit yaitu 7 rumah sakit, yang berarti bahwa ketersediaan rumah sakit sudah mencukupi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan berupa puskesmas yang ada pada saat ini belum dapat mencakup kebutuhan akan sarana kesehatan berupa puskesmas yaitu sebanyak 2 unit pada tahun 2045, sedangkan rumah sakit sudah mencakup kebutuhan untuk 20 tahun kedepan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang ada, tentunya memerlukan kontrol dan pemantauan khusus oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak agar sarana kesehatan yang ada dapat meningkat kualitasnya sehingga dapat mencakup kebutuhan penduduk pada 20 tahun kedepan. Perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan khususnya rumah sakit harus terus dilakukan, terutama dalam hal penambahan ketersediaan *bed*. Penambahan penyediaan unit rumah sakit dari pihak swasta juga memungkinkan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Pontianak.

I. Infrastruktur Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- Optimasi daya tampung dengan satu *shift*;
- Efisiensi dan efektivitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; dan
- Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-Kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU/SMA/MAN).

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- Taman Kanak-Kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- Sekolah Dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 2.117 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1.250
2.	Sekolah Dasar (SD)	1.600
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800

Sumber: SNI 03-1733-2004

Tabel 2. 118 Standar Pembakuan Tipe dan Rombongan Belajar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (Siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SMP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMA	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

Sumber: SNI 03-1733-2004



Kondisi kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran di Kota Pontianak dihitung berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk usia 3-6 tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK), 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam penentuan proyeksi kebutuhan jumlah unit sarana pendidikan TK menggunakan asumsi peserta didik sebanyak 150 siswa, sarana pendidikan SD menggunakan standar sekolah tipe A yaitu 480 siswa, sedangkan sarana pendidikan SMP dan SMA menggunakan standar sekolah tipe C yaitu 360 siswa. Hal ini dikarenakan pada kondisi eksisting masih banyak siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP dan SMA. Jadi rasio jumlah siswa SD lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP maupun siswa SMA. Untuk proyeksi sarana pendidikan di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Selatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)					Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045		
Jumlah Penduduk Usia Sekolah TK	3.375	3.928	4.129	4.390	4.624	4.888		
Proyeksi Sarana TK	Eksisting	26	26	26	26	26	7	KURANG
	Kebutuhan	23	26	28	29	31		



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD	9.620	10.773	11.597	11.985	12.447	12.927			
Proyeksi Sarana SD	Eksisting	28	28	28	28	28	0	CUKUP	
	Kebutuhan	20	22	24	25	26			27
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP	4.696	4.860	5.080	5.149	5.046	4.998			
Proyeksi Sarana SMP	Eksisting	18	18	18	18	18	0	CUKUP	
	Kebutuhan	13	14	14	14	14			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA	4.820	4.914	4.990	5.198	4.963	4.849			
Proyeksi Sarana SMA	Eksisting	22	22	22	22	22	0	CUKUP	
	Kebutuhan	13	14	14	14	13			

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.120 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Tenggara

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah TK	1.748	1.824	1.744	1.706	1.669	1.652			
Proyeksi Sarana TK	Eksisting	22	22	22	22	22	0	CUKUP	
	Kebutuhan	12	12	12	11	11			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD	5.127	5.255	5.228	5.033	4.902	4.802			
Proyeksi Sarana SD	Eksisting	21	21	21	21	21	0	CUKUP	
	Kebutuhan	11	11	11	10	10			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP	2.593	2.612	2.660	2.630	2.517	2.438			
Proyeksi Sarana SMP	Eksisting	11	11	11	11	11	0	CUKUP	
	Kebutuhan	7	7	7	7	7			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA	2.651	2.657	2.653	2.719	2.555	2.458			
Proyeksi Sarana SMA	Eksisting	11	11	11	11	11	0	CUKUP	
	Kebutuhan	7	7	7	8	7			

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.121 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Timur

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah TK	3.114	2.732	2.139	1.648	1.194	784			
Proyeksi Sarana TK	Eksisting	16	16	16	16	16	0	CUKUP	
	Kebutuhan	21	18	14	11	8			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD	9.118	8.345	7.338	6.166	5.158	4.247			
Eksisting	29	29	29	29	29	29	0	CUKUP	



Uraian		Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						
			2025	2030	2035	2040	2045	Kekurangan	Klasifikasi
Proyeksi Sarana SD	Kebutuhan	19	17	15	13	11	9		
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP		4.556	4.372	4.236	3.979	3.611	3.310		
Proyeksi Sarana SMP	Eksisting	11	11	11	11	11	11	0	CUKUP
	Kebutuhan	13	12	12	11	10	9		
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA		4.641	4.403	4.150	4.002	3.526	3.168		
Proyeksi Sarana SMA	Eksisting	7	7	7	7	7	7	2	KURANG
	Kebutuhan	13	12	12	11	10	9		

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.122 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Barat

Uraian		Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						
			2025	2030	2035	2040	2045	Kekurangan	Klasifikasi
Jumlah Penduduk Usia Sekolah TK		4.782	4.673	4.178	3.816	3.478	3.198		
Proyeksi Sarana TK	Eksisting	21	21	21	21	21	21	0	CUKUP
	Kebutuhan	32	31	28	25	23	21		
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD		13.762	13.307	12.471	11.289	10.320	9.467		
Proyeksi Sarana SD	Eksisting	34	34	34	34	34	34	0	CUKUP
	Kebutuhan	29	28	26	24	21	20		
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP		6.890	6.796	6.778	6.563	6.151	5.832		
Proyeksi Sarana SMP	Eksisting	21	21	21	21	21	21	0	CUKUP
	Kebutuhan	19	19	19	18	17	16		
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA		7.204	7.364	7.494	7.825	7.487	7.331		
Proyeksi Sarana SMA	Eksisting	19	19	19	19	19	19	1	KURANG
	Kebutuhan	20	20	21	22	21	20		

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.123 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Kota

Uraian		Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						
			2025	2030	2035	2040	2045	Kekurangan	Klasifikasi
Jumlah Penduduk Usia Sekolah TK		4.318	4.489	4.277	4.170	4.066	4.010		
Proyeksi Sarana TK	Eksisting	32	32	32	32	32	32	0	CUKUP
	Kebutuhan	29	30	29	28	27	27		



Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD	12.436	12.685	12.562	12.040	11.676	11.388			
Proyeksi Sarana SD	Eksisting	39	39	39	39	39	0	CUKUP	
	Kebutuhan	26	26	26	25	24			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP	6.230	6.237	6.314	6.206	5.904	5.684			
Proyeksi Sarana SMP	Eksisting	24	24	24	24	24	0	CUKUP	
	Kebutuhan	17	17	18	17	16			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA	6.494	6.468	6.418	6.537	6.104	5.835			
Proyeksi Sarana SMA	Eksisting	23	23	23	23	23	0	CUKUP	
	Kebutuhan	18	18	18	18	17			

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 2.124 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kecamatan Pontianak Utara

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)						Kekurangan	Klasifikasi
		2025	2030	2035	2040	2045			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah TK	4.374	4.530	4.301	4.180	4.062	3.993			
Proyeksi Sarana TK	Eksisting	22	22	22	22	22	5	KURANG	
	Kebutuhan	29	30	29	28	27			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD	12.720	12.933	12.768	12.199	11.794	11.469			
Proyeksi Sarana SD	Eksisting	49	49	49	49	49	0	CUKUP	
	Kebutuhan	27	27	27	25	24			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP	6.310	6.303	6.366	6.243	5.927	5.693			
Proyeksi Sarana SMP	Eksisting	27	27	27	27	27	0	CUKUP	
	Kebutuhan	18	18	18	17	16			
Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA	6.436	6.401	6.342	6.449	6.013	5.739			
Proyeksi Sarana SMA	Eksisting	21	21	21	21	21	0	CUKUP	
	Kebutuhan	18	18	18	18	17			

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Dari tabel di atas, pada tahun 2045, kebutuhan sarana pendidikan tingkat TK yang masih kurang yaitu pada Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 7 unit, dan Kecamatan Pontianak Utara 15 unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan TK yang ada pada saat ini belum dapat mencakup kebutuhan akan sarana pendidikan TK untuk 20 tahun kedepan.

Sarana pendidikan tingkat SD yang tersedia di seluruh kecamatan di Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kebutuhan hingga tahun 2045. Begitu pula dengan sarana pendidikan tingkat SMP. SMP di seluruh kecamatan di Kota Pontianak telah memenuhi kebutuhan sarana pendidikan SMP hingga 20 tahun kedepan. Sehingga

hanya diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sekolah, termasuk jumlah rombongan belajar.

Sedangkan kebutuhan sarana pendidikan tingkat SMA yang masih kurang pada tahun 2045 yaitu pada Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 2 unit, dan Kecamatan Pontianak Barat 1 unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan SMA yang ada pada saat ini belum dapat mencakup kebutuhan akan sarana pendidikan SMA untuk 20 tahun kedepan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan yang ada di Kota Pontianak, tentunya memerlukan kontrol dan pemantauan khusus oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak agar sarana pendidikan yang ada saat ini dapat meningkat kualitas dan fasilitasnya sehingga dapat mencakup kebutuhan peserta didik pada 20 tahun kedepan. Pengembangan pendidikan di Kota Pontianak tidak hanya dapat dilakukan dengan penambahan sekolah, tapi juga dapat dilakukan dengan menambah kelas serta rombongan belajar.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sistem pusat pelayanan Kota Pontianak direncanakan terdiri atas 1 (satu) pusat pelayanan kota dan 7 (tujuh) sub pusat pelayanan kota. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Pusat Kota Eksisting saat ini dan di Sebagian dari wilayah Kecamatan Pontianak Selatan serta sebagian lagi merupakan bagian dari Kecamatan Pontianak Utara (sekitar pasar Siantan). Dengan pusat pelayanan kota yang mewakili 3 bagian kota, maka struktur pusat pelayanan Kota Pontianak diharapkan menjadi lebih baik.

Pusat pelayanan kota (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dengan wilayah Pelayanan Seluruh Kota atau ditambah beberapa kabupaten atau seluruh Provinsi. Pusat Pelayanan Kota diarahkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pasar Skala Regional dapat berupa pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan dan atau
- Pusat Pemerintahan baik pemerintahan kota maupun pemerintahan provinsi dan atau
- Pusat Jasa Perbankan dan perhotelan serta jasa umum skala regional lainnya dan atau
- Fasilitas Peribadatan dan olahraga skala regional dan atau
- Dilengkapi dengan Lahan Parkir umum dan taman yang memadai

Subpusat pelayanan kota (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sebagian wilayah kota atau beberapa kecamatan. Sub Pusat Pelayanan Kota diarahkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pasar skala bagian wilayah kota seperti Pasar Tradisional, Pertokoan dan supermarket dan atau
- Pemerintahan dan perkantoran skala kota atau bagian wilayah kota dan atau
- Jasa umum dan atau Fasilitas peribadatan dan olahraga skala kota
- Dilengkapi dengan Lahan Parkir umum dan taman yang memadai

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan terdekat dari kelompok permukiman, dapat berupa simpul perdagangan, pendidikan, pelayan umum dan lain-lain. Pusat Pelayanan Lingkungan melayani satu kecamatan atau beberapa kelurahan. Pusat Pelayanan Lingkungan diarahkan dengan kegiatan sebagai berikut:



- Kegiatan perdagangan dan jasa umum skala kecamatan dan atau kelurahan dan atau
- Kegiatan pelayanan umum skala kecamatan dan atau
- Fasilitas peribadan, olahraga, dan rekreasi skala kecamatan
- Dilengkapi dengan Lahan Parkir umum dan taman yang memadai

Sebagai PKN dan Kawasan Metropolitan, Kota Pontianak selayaknya mempersiapkan Infrastruktur terkait seperti:

- a. Simpul-simpul eksport-import sebagai pintu gerbang untuk Kota Pontianak adalah Pelabuhan utama dan angkutan antarmoda penghubung dengan terminal internasional ambawang;
- b. Simpul-simpul jasa nasional yang diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha produksi yang berada disekitarnya;
- c. Pelabuhan utama dan angkutan antarmoda penghubung dengan terminal internasional ambawang serta simpul angkutan penyeberangan antar pulau;
- d. Kota Pontianak tidak tepat berada di pesisir laut tetapi menjadi pusat collecting hasil Perikanan dan Kelautan di Kawasan Perkotaan Pontianak dan sekitarnya.

Terminal antar Negara dan bandara serta rencana pelabuhan yang berada di luar wilayah Kota Pontianak mengindikasikan perlunya system konektivitas yang tidak hanya berorientasi ke pusat kota tetapi juga pengembangan lalu lintas internal-eksternal atau eksternal-eksternal. Beberapa program strategis terkait dengan pusat perkembangan wilayah di Kota Pontianak. Berikut program strategis pusat perkembangan wilayah beserta dampaknya terhadap Kota Pontianak.



Tabel 2.125 Program Strategis Pusat Perkembangan Wilayah

Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	RTRW	Penyusunan Rencana Detail Kawasan PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan mulai jalan Pak Kasih, jalan HRA. Rachman, jalan Tanjung Pura dan Jalan Gajahmada dan sekitarnya 2. Koridor A. Yani 3. Kawasan Pasar Siantan 	Pengaturan tata ruang yang lebih mendetail berdasarkan Kawasan PPK yang meliputi rencana tata guna lahan, infrastruktur, lingkungan, dan fasilitas umum di suatu kawasan
	RTRW	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana di Kota Pontianak yang lebih merata dapat berdampak pada perkembangan dan kualitas hidup Kota Pontianak
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa kota, provinsi, nasional, dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koridor Jalan Gajah Mada dan sekitarnya 2. Koridor Jalan Tanjung Pura dan sekitarnya 3. Pasar Siantan dan sekitarnya 	Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa berdampak pada kehidupan masyarakat dan aspek ekonomi Kota Pontianak. Dampak tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing global
	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan wisata budaya mancanegara dan domestik	Keraton Kadariyah dan sekitarnya	Pengembangan pusat pelayanan wisata budaya dapat berdampak segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak ekonominya seperti adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Dampak sosialnya yaitu dapat berupa peningkatan kepadatan penduduk. Sedangkan dampak lingkungan yaitu seperti deforestasi, perubahan tata air, dan peningkatan polusi.
	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan pemerintah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Walikota Pontianak dan sekitarnya 2. Komplek perkantoran pemerintah kota dan sekitarnya 	Pengembangan pusat pelayanan pemerintah kota dapat memberikan peningkatan layanan publik, kemudahan akses dan efisiensi, transparansi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan



Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
				infrastruktur kota, pengembangan ekonomi bisnis, dan peningkatan citra pemerintah kota
	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan pemerintah provinsi	Komplek perkantoran pemerintah provinsi dan sekitarnya	Pengembangan pusat pelayanan pemerintah provinsi dapat memberikan pengembangan infrastruktur dan layanan publik, peningkatan pendapatan daerah, stimulasi ekonomi lokal, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas
	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan transportasi laut nasional dan internasional	Pelabuhan Utama Dwikora dan sekitarnya	Pengembangan pusat pelayanan transportasi laut nasional dan internasional berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses dan efisiensi, peningkatan konektivitas, dan peningkatan kerjasama internasional
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	RTRW	Penyusunan Rencana Detail Kawasan SPPK	Seluruh Kota	Pengaturan tata ruang yang lebih mendetail berdasarkan Kawasan SPPK yang meliputi rencana tata guna lahan, infrastruktur, lingkungan, dan fasilitas umum di suatu kawasan
	RTRW	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan	Seluruh Kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana di Kota Pontianak yang lebih merata dapat berdampak pada perkembangan dan kualitas hidup Kota Pontianak
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pendidikan tinggi	SPPK 1 di Universitas Tanjungpura dan sekitarnya	Pengembangan pusat pendidikan tinggi berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, inovasi dan penelitian, peningkatan kemampuan SDM, peningkatan akses pendidikan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi
	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan	SPPK 2 di Perempatan SMAN 2 dan sekitarnya	Dampak terhadap Kota Pontianak yaitu: A. Pusat pemerintahan: efisiensi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat B. Pusat pendidikan: peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan SDM



Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
				C. Pusat perdagangan: pertumbuhan ekonomi dan konektivitas global
	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan sebagian wilayah kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPPK 3 di Jl. H. Rais Abdur Rahman, Jl. Jeranding A Rachman, J. R.E Martadinata, dan sekitarnya 2. SPPK 4 di Pasar Teratai dan sekitarnya 3. SPPK 5 di UPTD Agrobisnis dan sekitarnya 4. SPPK 6 di Pertigaan Jl. Khatulistiwa dengan Jl. Budi Utomo dan sekitarnya 5. SPPK 7 di Pasar Anggrek dan sekitarnya 	Pengembangan pusat perdagangan sebagian wilayah kota dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stimulasi kegiatan ekonomi lokal, peningkatan nilai properti di sekitar pusat perdagangan, dan peningkatan konektivitas
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	RTRW	Penyusunan Rencana Detail Kawasan PPL	Seluruh Kota	Pengaturan tata ruang yang lebih mendetail berdasarkan Kawasan PPL yang meliputi rencana tata guna lahan, infrastruktur, lingkungan, dan fasilitas umum di suatu kawasan
	RTRW	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan	Seluruh Kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana di Kota Pontianak yang lebih merata dapat berdampak pada perkembangan dan kualitas hidup Kota Pontianak
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat lingkungan kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Kecamatan Pontianak Utara, Kantor Kelurahan Siantan Hilir, dan sekitarnya 2. Kantor Kec. Pontianak Tenggara, Kantor Kelurahan Bangka Belitung Darat, SMPN 08, dan sekitarnya 	Tersebar merata di seluruh wilayah	Pengembangan dan peningkatan pusat lingkungan berdampak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, stimulasi ekonomi lokal, kemudahan akses, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan nilai properti di sekitar pusat lingkungan kecamatan dan kelurahan



Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
		<ol style="list-style-type: none">3. Kantor Kecamatan Pontianak Kota, Kantor Kelurahan Sungai Bangkong dan sekitarnya4. Kantor Kecamatan Pontianak Barat, Kantor Kelurahan Sungai Jawi Dalam, dan sekitarnya5. Kantor Kecamatan Pontianak Timur dan sekitarnya		
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	RDTR	<p>Pengembangan dan peningkatan pusat lingkungan kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kantor Kelurahan Mariana dan sekitarnya2. Kantor Kelurahan Tengah dan sekitarnya3. Kantor Kelurahan Darat Sekip dan sekitarnya4. Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat, Kelurahan Benua Melayu Laut, dan sekitarnya5. Kantor Kelurahan Tambelan Sampit dan sekitarnya6. Kantor Kelurahan Dalam Bugis, Puskesmas Kampung Dalam, dan sekitarnya7. Kantor Kelurahan Tanjung Hilir, dan sekitarnya8. Kantor Kelurahan Siantan Tengah, Puskesmas Siantan Tengah, dan sekitarnya9. Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar dan sekitarnya	Tersebar merata di seluruh wilayah	



Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
		<ol style="list-style-type: none">10. Kantor Kelurahan Parit Tokaya dan sekitarnya11. Kantor Kelurahan Bansir Laut dan sekitarnya12. Kantor Kelurahan Bangka Belitung Laut dan sekitarnya13. Kantor Kelurahan Bansir Darat dan sekitarnya (Kawasan Perdana)14. Kantor Kelurahan Akcaya dan sekitarnya15. Kantor Kelurahan Kotabaru dan sekitarnya16. Kantor Kelurahan Pal Lima, Terminal Pal Lima, dan sekitarnya17. Kantor Kelurahan Sungai Jawi dan sekitarnya18. Kantor Kelurahan Sungai Beliung dan sekitarnya19. Kantor Kelurahan Siantan Hulu dan sekitarnya20. Kantor Kelurahan Batu Layang dan sekitarnya21. Kantor Kelurahan Tanjung Hulu dan sekitarnya22. Kantor Kelurahan Saigon, SDN 03, SMPN 14, dan sekitarnya23. Kantor Kelurahan Banjar Serasan, Puskesmas Banjar Serasan, dan sekitarnya24. Kantor Kelurahan Parit Mayor dan sekitarnya		



Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	RDTR	Pengembangan dan peningkatan pusat lingkungan pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan rekreasi lokal <ol style="list-style-type: none">1. SMPN 05 dan sekitarnya2. SMPN 01 dan sekitarnya3. SMPN 10, SMAN 03 dan sekitarnya4. SMPN 4, SMPN 27, dan sekitarnya5. SDN 21 Pontianak Timur dan sekitarnya6. Rumah Sakit YARSI, STIKES Yarsi, dan sekitarnya7. Puskesmas Tambelan Sampit, SMA Haruniyah, dan sekitarnya8. Stadion Kebun Sayuk dan sekitarnya9. Terminal Cempaka dan sekitarnya10. Rencana RTH11. SMP dan SMA Gembala Baik, serta sekitarnya12. Simpang RSUD Dr. Soedarso dan sekitarnya13. Puskesmas Kampung Bangka dan sekitarnya14. Puskesmas Parit H. Husin II dan sekitarnya15. Pasar Harapan Jaya dan sekitarnya16. Pertigaan Jl. Purnama dengan Jl. Wonobaru dan sekitarnya17. SMPN 09 dan sekitarnya18. SMPN 06 dan sekitarnya19. SD Negeri 36 dan sekitarnya20. Puskesmas Akcaya dan sekitarnya21. Pertigaan Jl. Dr. Wahidin dengan Jl. Husein Hamzah, dan sekitarnya	Tersebar merata di seluruh wilayah	Dampak terhadap Kota Pontianak yaitu: <ol style="list-style-type: none">A. Pendidikan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan lokal dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang lebih baik.B. Kesehatan: Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas medis, klinik, dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.C. Perdagangan: Merangsang pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan pusat perdagangan yang menarik pengunjung dan pelanggan.D. Transportas: Memperbaiki sistem transportasi lokal untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah.E. Rekreasi: Menyediakan fasilitas rekreasi yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



Sistem Pusat Permukiman/ Pelayanan	Program/Proyek Strategis		Lokasi	Dampak ke Kota Pontianak
	Sumber	Nama Program/ Proyek		
		<ol style="list-style-type: none">22. Pasar Dahlia, Terminal Dahlia, dan sekitarnya23. IKIP PGRI Pontianak dan sekitarnya24. Puskesmas Pal Lima dan sekitarnya25. Pasar Belimbing dan sekitarnya26. Universitas Panca Bakti dan sekitarnya27. Puskesmas Kom Yos Sudarso dan sekitarnya28. Puskesmas Perum 1 dan sekitarnya29. Terminal Nipah Kuning dan sekitarnya30. Perempatan Jl. Gst.Situt Mahmud dengan Jl. 28 Oktober dan sekitarnya31. Perempatan Jl Parwasal dengan Garden Mas dan sekitarnya32. Perempatan Jl. Budi Utomo dengan Jl. Sungai Selamat dan sekitarnya33. Pusat Agribisnis dan sekitarnya34. Puskesmas Siantan Hulu dan sekitarnya35. Terminal Agribisnis dan sekitarnya36. Pasar Batulayang37. Puskesmas Khatulistiwa dan sekitarnya38. Terminal Batu Layang dan sekitarnya39. Pasar Express dan Sekitarnya40. Rencana perdagangan local41. Puskesmas Pembantu Tanjung Hulu, SDN 04, dan sekitarnya42. Puskesmas Tanjung Hulu dan sekitarnya43. Puskesmas Saigon dan sekitarnya		

Sumber: RTRW dan RDTR Kota Pontianak, 2024



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan didapat melalui hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan sebelumnya serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah biasanya muncul dari keunggulan yang belum dipergunakan secara optimal dan kekurangan yang tidak diatasi untuk mencapai peluang yang muncul dan meminimalisasi hambatan yang terjadi. Pengoptimalan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keunggulan, kekurangan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan yang diampu. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang agar didapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah daerah menjelaskan terkait apa yang menjadi masalah di masa lalu serta gambaran solusi dimasa mendatang tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat Daerah. Berikut merupakan permasalahan yang ada di Kota Pontianak.



Tabel 3.1 Permasalahan di Kota Pontianak

Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
Geografi dan Demografi:		
1. Hubungan Antar Wilayah	1. Pengelolaan wilayah perbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lain yang belum maksimal	1. Belum lengkapnya dokumen rencana tata ruang pada wilayah perbatasan kota, terutama wilayah yang di luar wilayah Kota Pontianak
		2. Kurang optimalnya kerja-sama antar-wilayah
		3. Administrasi kependudukan sebagian warga perbatasan Kota Pontianak dengan kabupaten sekitar
2. Kebencanaan dan Perubahan Iklim	1. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Letak geografis Kota Pontianak membuat wilayah ini memiliki risiko bencana:
		a. Banjir, terutama di kawasan yang dekat dengan Sungai Kapuas
		b. Kekeringan, dimana pada musim kemarau dan akan berpotensi lebih parah dengan adanya peningkatan suhu ekstrem dari perubahan iklim)
		c. Kebakaran hutan dan lahan, risiko bencana lebih tinggi pada musim kemarau dan terutama pada lahan gambut
		d. Cuaca ekstrem/angin puting beliung, risiko bencana lebih tinggi pada transisi dua musim
		2. Adanya perubahan iklim (peningkatan suhu dan penurunan curah hujan) meningkatkan bahaya atau ancaman bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan, cuaca ekstrem/angin puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan
		3. Penanggulangan bencana sedang dalam proses diarahkan agar terintegrasi dengan dimensi pembangunan, dimana kebencanaan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih dalam proses diupayakan secara optimal
		5. Adanya risiko bencana banjir yang lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di rumah panggung di atas sungai, karena hal tersebut adalah kearifan lokal
		6. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kehadiran RTRW/RDTR Kota, sehingga masih ada pemanfaatan ruang yang kurang sesuai pada wilayah rawan bencana
		7. Belum optimalnya infrastruktur drainase untuk mencegah banjir karena sering tumpang tindih dengan infrastruktur lain seperti listrik, saluran air bersih, dan jalan
3. Lingkungan Hidup	2. Menurunnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Pertumbuhan penduduk menyebabkan: a. Tingginya permintaan sarana prasarana dasar sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dihindari b. Meningkatnya limbah domestik serta sampah dari rumah tangga dan kegiatan usaha c. Meningkatnya jumlah transportasi pribadi, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca
		2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan penanganan sampah dari sumbernya
		3. Pesatnya pembangunan tidak memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Minimnya luas Ruang Terbuka Hijau sebagai resapan air, mengurangi emisi untuk meningkatkan kualitas udara, serta estetika perkotaan
		5. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem di Kota Pontianak sudah didominasi sangat rendah akibat pembangunan perkotaan yang masif. Meskipun demikian, daya dukung air masih surplus karena mengandalkan Sungai Kapuas, namun diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air Sungai Kota Pontianak agar layak digunakan oleh Penduduk
	2. Pengembangan energi terbarukan yang masih belum maksimal	1. Adanya tumpang tindih kewenangan untuk percepatan energi terbarukan
		2. Pengembangan energi terbarukan untuk menambah PAD masih dalam proses
4. penggunaan lahan	1. Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	3. Kolaborasi <i>stakeholder</i> dalam pengadaan energi ramah lingkungan yang belum optimal
		1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku (RTRW/RDTR)
		2. Legalitas lahan milik pribadi yang menyulitkan pemerintah dalam menata ruang
5. Rasio Penduduk	Meningkatnya angka ketergantungan dan menurunnya <i>sex ratio</i>	3. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada sektor atau kepentingan tertentu
		1. Menurunnya angka kelahiran hingga melewati <i>replacement level</i> , hal ini dibuktikan dengan penurunan penduduk usia muda
		2. Terjadinya <i>aging population</i> atau peningkatan penduduk usia tua, terutama pada perempuan karena memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan	
Kesejahteraan Masyarakat:			
1. Pangan Pertanian dan Perikanan	1. Akses pangan yang tidak merata	1. Ketersediaan dan distribusi pangan yang terbatas karena sebagian besar bahan pangan berasal dari luar Kota Pontianak	
		2. Tingkat pendapatan masyarakat, dimana pola konsumsi masyarakat berdasarkan pendapatannya serta adanya fluktuasi harga pangan	
	2. Penurunan jumlah produksi pertanian (Tanaman Pangan & Hortikultura)	Adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan terbangun untuk rumah maupun infrastruktur, akibatnya konversi lahan pertanian tidak dapat dihindari	
	3. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan	3. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan	1. Rata-rata pendapatan nelayan Kota Pontianak masih rendah, volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah
			2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut, terutama di daerah yang terpencil serta Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas
			3. Kualitas SDM nelayan rata - rata masih rendah
			4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas
			5. Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil."
	4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	1. Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kota Pontianak masih rendah
			2. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		3. Sarana dan Prasarana pengolahan ikan masih Terbatas
		4. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya
	5. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya, sarana dan prasarana di bidang peternakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan	1. Kurangnya pasokan ternak potong yang tersedia akibat wabah penyakit, minimnya stok ternak (pembibitan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan tidak ada pelabuhan dan alat angkut khusus untuk pengangkutan dan pendaratan ternak
		2. Minimnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap rumah pemotongan unggas dan hewan besar (sapi/kambing) yang memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan bersertifikat NKV dan Halal serta rumah potong hewan babi yang ASU (Aman, Sehat, Utuh)
2. Pendidikan	1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	1. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar/Guru PAUD, SD, SMP
		2. Kurangnya tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan di Kota Pontianak
		3. Masih banyak siswa miskin yang butuh pembiayaan pendidikan
	2. Akses pendidikan belum merata	1. Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk
		2. Sarana prasarana penunjang pembelajaran pendidikan yang belum terpenuhi
		3. Sumber pembiayaan operasi sekolah yang berasal dari dana BOS belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan
		4. Belum terpenuhinya seluruh lulusan SD pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama pada zonasi pendidikan



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan	
		5. Belum meratanya ketersediaan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus	
3. Kesehatan	1. Penurunan stunting	1. Masih tingginya prevalensi stunting	
	2. Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2. Masih adanya prevalensi penyakit menular (TBC)	
		3. Prevalensi penyakit tidak menular terus bertambah (Hipertensi,dll)	
		4. Rendahnya kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat	
		5. Kualitas lingkungan yang menurun menyebabkan turunnya kualitas kesehatan	
		6. Belum tercapainya universal coverage (BPJS Kesehatan)	
		7. Terbatasnya sarana fisik, jumlah dan jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya	
		8. Diperlukannya tenaga ahli bidang kesehatan terutama dalam bidang promosi dan perilaku kesehatan, epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, perencanaan kesehatan dan ekonomi kesehatan.	
4. Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan pemuda	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai dengan minat pencari kerja sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran pemuda	
		2. Masih rendahnya minat pemuda untuk menjadi entrepreneurship	
		3. Kurang optimalnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan	



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Adanya ancaman perilaku berisiko di kalangan pemuda seperti narkoba, pernikahan usia dini, risiko kesehatan reproduksi dan bahaya merokok
5. Kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan dan pengembangan prestasi olahraga	1. Pemajuan objek kebudayaan, cagar budaya yang masih rendah
		2. Upaya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan sistematis, serta berkelanjutan masih belum optimal
		3. Sport science belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga
		4. Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional
		5. Belum tersedianya Sport Center sebagai faktor utama sarana olahraga untuk mendukung olahraga prestasi dan olahraga masyarakat
6. Ketenagakerjaan	1. Banyak tenaga kerja terutama dalam sektor informal menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, termasuk kontrak sementara atau kontrak tanpa jaminan keamanan pekerjaan	1. Fleksibilitas dan kebutuhan bisnis yang menyebabkan kontrak yang tidak pasti bagi pekerja
		2. Kontrak jangka panjang atau kontrak dengan banyak manfaat dapat meningkatkan biaya dan kewajiban perusahaan
		3. Ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi pasar, atau perubahan peraturan dapat membuat perusahaan berhati - hati dan memilih kontrak yang lebih fleksibel dan tidak pasti.
		4. Tuntutan keseimbangan hidup dan kerja
		5. Perekonomian yang berubah dari pekerjaan tetap ke kontrak atau proyek dapat menghasilkan lebih banyak kontrak jangka pendek atau gig economy, menciptakan ketidakpastian kontrak kerja.



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		6. Banyak perusahaan startup atau wirausaha memulai dengan anggaran terbatas, sehingga mereka lebih cenderung menggunakan kontrak jangka pendek dan tidak pasti untuk meminimalkan risiko keuangan.
		7. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan
		8. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuka pintu bagi pekerjaan jarak jauh dan kontrak jangka pendek.
		9. Pekerja mungkin tidak dapat menemukan atau mempertahankan pekerjaan tetap karena persaingan yang ketat atau kualifikasi yang tidak sesuai.
		10. Tingkat pengangguran yang tinggi
	2. Banyak pekerja, terutama di sektor informal, bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, termasuk jam kerja yang panjang, gaji rendah, lingkungan kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan dan keamanan kerja yang memadai.	1. Tidak memadainya gaji dan upah
		2. Jam kerja yang berlebihan tanpa adanya kompensasi yang sesuai
		3. Keselamatan dan Kesehatan yang Kurang
		4. Diskriminasi dan pelecehan di tempat Kerja
		5. Ketidakpastian kontrak kerja
		6. Ketidakadilan dalam kenaikan jabatan dan kompensasi
		7. Kurangnya akses terhadap perlindungan sosial
		8. Beban kerja yang berlebihan
		9. Kondisi kerja fisik yang buruk.



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		10. Pengabaian hak buruh
	3. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan dalam pekerjaan, promosi, dan pendapatan yang adil	1. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan diskriminasi
		2. Budaya organisasi yang tidak inklusif
		3. Pendidikan dan Kesadaran yang Kurang
		4. Pengaruh media dan kebudayaan populer karena ada Representasi yang tidak akurat atau stereotipikal dari kelompok tertentu dapat membuat persepsi yang salah
		5. Sifat kepemimpinan yang tidak responsif
		6. Kebijakan dan praktek yang tidak adil
		7. Diskriminasi struktur dan sistematis
		8. Ketimpangan kekuasaan dan akses
		9. Nilai dan norma budaya yang melekat dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara orang memandang dan memperlakukan orang lain, baik secara positif maupun negatif.
		10. Ketidacukupan Undang-Undang dan penegakan hukum
	4. Ketidakesesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja	1. Perkembangan teknologi yang cepat mengubah kebutuhan pasar kerja.
		2. Kurangnya sinkronisasi antara pendidikan dan pasar kerja.
		3. Struktur perekonomian yang berubah dengan cepat, seperti transisi dari industri manufaktur ke ekonomi berbasis jasa atau ekonomi digital, dapat



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		menciptakan ketidaksesuaian keterampilan karna keterampilan yang diperlukan di sektor-sektor baru berbeda
		4. Akses yang terbatas atau rendahnya kualitas pendidikan formal atau pelatihan vokasional dapat mengakibatkan kekurangan keterampilan yang diperlukan di pasar kerja.
		5. Sistem pendidikan yang tidak responsif. dan tidak responsif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi
		6. Proses pendidikan yang panjang, seperti gelar akademis yang membutuhkan waktu lama untuk dicapai. Selama waktu ini, kebutuhan pasar kerja dapat berubah secara signifikan.
		7. Banyak tenaga kerja mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang tren pasar kerja, jenis pekerjaan yang paling diminati, atau keterampilan yang akan diminati di masa mendatang.
		8. Perusahaan mungkin tidak menginvestasikan cukup dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan
		9. Perbedaan antara struktur usia, preferensi pekerjaan, dan mobilitas geografis antara populasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja dapat menciptakan kesenjangan keterampilan.
		10. Ketidak terlibatan industri dalam proses pendidikan dan pelatihan menghasilkan kurangnya wawasan tentang apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
	5. Tingginya tingkat pengangguran dan <i>underemployment</i> terutama di kalangan pemuda	1. Pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan bisnis cenderung membatasi rekrutmen dan bahkan melakukan PHK, mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat.



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		2. Pekerja mungkin tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja
		3. Pergeseran struktur perekonomian
		4. Krisis keuangan dan ekonomi dapat mengakibatkan pengurangan lapangan kerja, penutupan usaha, dan retensi pekerja yang ada
		5. Perkembangan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja
		6. Kurangnya investasi dalam berbagai sektor ekonomi atau kegagalan usaha untuk berkembang secara signifikan
		7. Regulasi yang buruk atau terlalu rumit dipasar kerja, seperti aturan perburuhan yang kaku atau birokrasi yang berlebihan
		8. Pasar kerja yang tidak efisien, dimana informasi tentang pekerjaan tidak terdistribusi dengan baik atau dimana proses perekrutan tidak efektif
		9. Kejadian mendadak seperti pandemi covid-19 atau bencana alam dapat menyebabkan penutupan bisnis, pemotongan anggaran, dan berkurangnya permintaan pekerjaan
		10. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tanpa disertai penciptaan lapangan kerja yang cukup
	6. Migrasi tenaga kerja yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di negara asal dan negara tujuan	1. Ketimpangan ekonomi antara negara-negara dapat mendorong orang untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain
		2. Kondisi politik yang tidak stabil, perang, konflik bersenjata, atau kekerasan di suatu negara dapat memaksa orang untuk mencari perlindungan atau peluang di negara lain



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		3. Ketidakadilan sosial dan diskriminasi dari negara asal
		4. Adanya tuntutan keseimbangan keluarga
		5. Krisis kesehatan dan bencana alam
		6. Tren demografis, termasuk penuaan penduduk di beberapa negara, dapat menciptakan kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, yang dapat diatasi melalui migrasi tenaga kerja.
		7. Perkembangan teknologi dan aksesibilitas global ke informasi memudahkan orang untuk mengetahui tentang peluang di negara lain. Globalisasi juga dapat meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih terampil dan mobilitas tenaga kerja internasional.
		8. Ketidakpastian ekonomi dari negara asal
		9. Kebijakan migrasi yang rumit birokratis, dan sulit diakses dapat menghambat migrasi yang legal dan aman, mendorong orang untuk mencari jalur migrasi yang tidak sah dan berisiko.
		10. Ketidakadilan dalam pembagian kelayakan dan akses negara asal
	7. Kurangnya pendidikan dan Pelatihan yang Tepat karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja	1. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas karena faktor geografis, sosial-ekonomi atau budaya.
		2. Kurangnya dana untuk pendidikan
		3. Infrastruktur pendidikan yang tidak memadai
		4. Kualifikasi dan kompetensi guru yang kurang memadai
		5. Kurangnya fokus pada keterampilan yang relevan



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		6. Tidak sinkronnya pendidikan dengan tuntutan industri
		7. Kurangnya orientasi karir dan bimbingan
		8. Perbedaan sistem pendidikan
		9. Tidak adanya investasi dalam pelatihan lanjutan
		10. Kurangnya motivasi atau kesadaran individu
	8. Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia	1. Otomasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa pekerjaan
		2. Perkembangan teknologi dapat menciptakan kesenjangan keterampilan antara pekerja yang diinginkan oleh pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja
		3. Peralihan pekerjaan dapat sulit bagi sebagian pekerja, terutama yang lebih tua atau tidak memiliki akses ke pelatihan yang diperlukan.
		4. Perkembangan teknologi menghadirkan risiko keamanan dan privasi data yang lebih tinggi.
		5. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat membuat masyarakat dan organisasi rentan terhadap gangguan, kegagalan sistem, atau bencana alam yang mempengaruhi infrastruktur teknologi.
		6. Masyarakat dan negara-negara yang kurang berkembang mungkin mengalami kesenjangan digital



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		<p>7. Hilangnya pekerjaan manusia yang Unik yang memiliki elemen kreatif, empati, dan pengambilan keputusan kompleks tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh otomasi</p> <p>8. Pekerjaan yang diotomatisasi atau tergantikan oleh teknologi dapat menciptakan krisis identitas bagi individu yang kehilangan pekerjaan mereka, mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan psikologis mereka.</p> <p>9. Pengenalan teknologi baru, terutama yang sangat canggih, dapat mengakibatkan biaya tinggi.</p> <p>10. Pengaruh Sosial dan Budaya memicu kebingungan dan ketidakstabilan sosial, serta tantangan adaptasi budaya dan cepat.</p>
7. Kemiskinan	Masih adanya penduduk miskin serta akses perlindungan sosial pada masyarakat yang belum merata	<p>1. Terbatasnya lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha</p> <p>2. Kualitas dan produktivitas SDM rendah</p> <p>3. Data warga miskin belum dimutakhirkan secara sistematis"</p>
Daya Saing		
1. Daya Saing SDM	Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak	<p>1. Masih tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan</p> <p>2. Masih tingginya angka perceraian</p> <p>3. Masih adanya prostitusi anak dan wanita</p>
	Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat	<p>4. Kurangnya akses terhadap bahan bacaan</p>
2. Daya Saing Investasi Daerah		<p>1. Belum optimalnya promosi dan pemasaran efektif tentang potensi dan peluang investasi</p>



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	Tidak adanya insentif pada calon investor dan potensi daerah yang belum dipromosikan secara optimal.	2. Belum tersedianya regulasi kemudahan berusaha 3. Ketidakstabilan politik atau fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi investor 4. Data investasi yang tercatat belum menggambarkan kondisi real besarnya investasi di Kota Pontianak karena rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan investasinya
3. Daya Saing Ekonomi	1. Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relatif sangat berfluktuatif.	1. Tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di Kalbar khususnya Pontianak karena produk-produk konsumsi di Pontianak utamanya berasal dari luar Pontianak bahkan dari negara tetangga. Padahal sistem logistik Kota Pontianak sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai.
	2. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan	1. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT, dll 2. Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah. 3. Perdagangan luar negeri (ekspor) masih didominasi oleh produk hulu (bahan mentah). 4. minimnya lahan dan terjadi konversi lahan lidah budaya ke fungsi lain 5. Pemasaran produk tidak berkembang



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	3. Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI	1. Beberapa pasar yang sudah dibangun namun belum memiliki sarana prasarana pendukung
		2. Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional belum optimal.
	4. Pemanfaatan koperasi yang belum optimal	1. Rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi, rendahnya partisipasi anggota serta rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.
		2. Keterbatasan akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar
	5. Pemanfaatan destinasi wisata belum dikelola optimal serta belum sinkronnya acara acara seperti olah raga wisata, dan kebudayaan	1. Profesionalitas pengelolaan pariwisata daerah yang eblum optimal. Destinasi wisata sudah banyak namun belum dikelola secara profesional sehingga dapat mempengaruhi citra pariwisata daerah.
		2. Produk wisata unggulan belum memiliki daya jual sehingga tidak membantu penguatan citra pariwisata daerah.
		3. Minat Investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di bidang pariwisata masih rendah sehingga pengembangan pariwisata hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah untuk pengelolaan destinasi wisata.
		4. Penguatan kemitraan yang belum optimal antara para pelaku industri pariwisata dan instansi pariwisata untuk meningkatkan akses terhadap destinasi wisata, produk wisata, dan sinkronisasi event.
		5. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung iklim pariwisata yang kondusif dalam rangka membangun citra pariwisata daerah.



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		6. Pemanfaatan teknologi digital perlu dimaksimalkan dalam pengembangan industri pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk pariwisata.
	6. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak akibat ekosistem ekonomi kreatif yang belum siap	1. Keterbatasan sumber daya (SDM dan SDA) kreatif yang profesional dan kompetitif
		2. Ekonomi kreatif dianggap belum bisa memberikan jaminan kesejahteraan yang layak, kurangnya apresiasi terhadap ekonomi kreatif
		3. Tingginya biaya produksi akibat mahal bahan baku dan mahal piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif
		4. Kualitas produk belum maksimal serta proses produksi yang tidak efisien karena kurangnya inovasi dalam pengembangan produk
		5. Minimnya akses pembiayaan
		6. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri
		7. Infrastruktur belum memadai (Internet)
		8. Kurangnya riset konten dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten
	7. Rasio Kemandirian Daerah masih berada pada kategori menuju mandiri	1. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih kurang
		2. Digitalisasi penerimaan pajak belum optimal
		3. Belum sinkronnya produk hukum



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	8. Penguatan Local Taxing Power melalui Transformasi Akselerasi, integrasi data, digitalisasi pengelolaan pajak daerah, Sinergisitas dan kolaborasi belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Updating data pajak daerah belum menyeluruh, Pemutakhiran dan akselerasi data belum dimanfaatkan sebagai identifikasi atas potensi PAD 2. Sinergi Pemanfaatan transformasi digital Pengelolaan PAD dengan Bank Pembangunan Daerah dalam mengembangkan inklusi keuangan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal daerah belum optimal 3. Perdagangan oleh pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan belum diatur dalam peraturan perundang - undangan menjadi pihak yang berkewajiban memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak daerah yang berasal dari transaksi perdagangan secara elektronik, dan Peran bendahara pengeluaran belum sebagai wajib pungut atas pajak daerah melalui belanja APBD/APBN. 4. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang memiliki keahlian khusus dan lambannya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan informasi yang semakin masif. 5. Keterbatasan sarana prasana masih terbatas terutama sarana prasarana dalam teknologi informasi 6. Pemanfaatan kerjasama dengan instansi terkait dalam penagihan pajak daerah belum terlaksana, dan kerjasama akselerasi data pertanahan dan fiskal daerah belum optimal disebabkan oleh faktor keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Bapenda.
3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah	1. Belum optimalnya realisasi <i>waterfront city</i> pada tepi Sungai Kapuas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya penarikan minat wisatawan pada <i>waterfront city</i> 2. Belum tersedianya perizinan bagi pedagang di <i>Waterfront City</i>, sehingga pengelolaan usaha masih berantakan



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	2. Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta kemacetan lalu lintas pada <i>peak hour</i>	1. Belum tersedianya transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, terintegrasi, serta ramah lingkungan. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum belum dipersiapkan secara optimal untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi
		2. Berkurangnya ketersediaan angkutan umum
		3. Ketersediaan sarana prasarana jalan tidak mampu mengimbangi tingginya jumlah kendaraan pribadi
		4. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan transportasi dan pemutakhiran data data lalu lintas belum dapat diwujudkan secara optimal.
		5. Beberapa titik jalan kota yang terendam banjir/genangan pada saat terjadi pasang laut dan hujan dengan intensitas tinggi terjadi bersamaan
	3. Jalan lingkungan belum merata dalam kondisi baik/mantap	1. Pembangunan jalan lingkungan belum merata
		2. Penegakan aturan mengenai standar pembangunan jalan lingkungan perlu di pertegas, khususnya di area perumahan.
	4. Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai	1. Keterbatasan penyediaan sarana prasarana transportasi sungai
		2. Transportasi sungai belum dikembangkan dan masih terbatas untuk angkutan tambang dan komoditas lain
	5. Kebutuhan perumahan yang tidak sebanding dengan ketersediaan dan penyediaan perumahan	1. Konsep pembangunan perumahan masih menyebar/horizontal



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	6. Masih terdapat prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan serta drainase lingkungan yang kondisinya belum baik	1. Pengawasan pembangunan perumahan sesuai ketentuan RTRW belum optimal
	7. Semakin berkurang lahan pemakaman (perkuburan) yang ada	1. Aset tanah pemerintah Kota Pontianak terbatas
		2. Pembebasan lahan untuk pemakaman belum optimal
	8. Masih terdapat Kawasan kumuh di Kota Pontianak	1. Kurangnya pencegahan dan pengawasan terhadap bangunan liar baru
		2. masih terdapat rumah tidak layak huni
		3. pemanfaatan rumah susun yang belum optimal
	9. Masih terjadinya banjir dan genangan di wilayah Kota Pontianak	1. Rendahnya topografi yang relatif rendah (rata rata 1 sampai 2 meter diatas permukaan Laut) dan posisi Kota Pontianak yang dekat dengan muara menyebabkan wilayah di Kota Pontianak terpengaruh pasang surut laut
		2. Kontur tanah yang ada relatif datar meyebabkan aliran air tidak laju dan cepat terjadinya sedimen pada saluaran
		3. Semakin berkurangnya daerah resapan dan semakin luasnya areal yang terbangun
		4. Kapasitas saluran yang ada tidak mampu menahan volume atau debit air , terutama pada saat hujan lebat ditambah dengan terjadinya pasang laut.
	10. Sumber Air Baku semakin terbatas	1. Pada saat musim kemarau sering terjadi intrusi air laut ke sungai kapuas sebagai sumber air baku PDAM
		2. Belum adanya alternatif air baku selain air Sungai kapuas



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	11. Air PDAM yang ada belum dimanfaatkan oleh warga sebagai air minum sehari-hari	Kualitas keluaran air PDAM belum layak untuk langsung dikonsumsi
	12. Daya tampung (kapasitas) Tempat Pembuangan Akhir yang semakin terbatas	1. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir masih open dumping
		2. Kondisi sarana persampahan (Alat Angkut dan TPS) banyak yang kurang baik, serta belum ada pemilahan sampah pada kontainer di TPS
		3. Luasan yang terbatas sedangkan Volume sampah selalu bertambah
		4. Belum optimalnya pengurangan sampah/pengolahan sampah di tingkat Rumah Tangga
		5. Prilaku hidup bersih belum optimal dengan banyaknya sampah di tempat pembuangan, sungai dan jalan.
		6. masih belum optimalnya penegakan perda untuk yang membuang sampah sembarangan
	13. belum optimalnya Pengembangan dan Pembangunan sistem Sanitasi lingkungan	1. Sebagian besar penampungan limbah tinja rumah tangga adalah dengan sistem septic tank tanpa pengolahan.
		2. Belum adanya instalasi pengolah lumpur tinja skala kota yang memenuhi persyaratan
		3. belum tersedia nya IPALD, IPLT
	14. Jalan lingkungan belum merata dalam kondisi baik	1. Sebagian jalan terendam apabila terjadi banjir
		2. Pemerataan perbaikan seluruh jalan lingkungan belum optimal



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
Pelayanan Umum		
1. Tata Kelola Pemerintah	1. Implementasi manajemen talenta belum optimal sehingga menciptakan kesan kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang kurang memadai	1. Kompetensi ASN yang belum sesuai dengan kebutuhan
		2. Implementasi Sistem merit untuk manajemen ASN belum optimal
		3. Pemantauan dan pengukuran kinerja individu serta pembinaan yang belum optimal menyebabkan terbatasnya talenta seluruh ASN yang dapat dikelompokkan dalam talent pool
	2. Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien	Akuntabilitas kinerja yang masih stagnan
	3. Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif	1. Penyelarasan regulasi keuangan dan otonomi daerah masih rendah
		2. Infrastruktur dan Literasi digital di sektor keuangan masih rendah
		3. Belum optimalnya penyesuaian core bisnis Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi yang digunakan, antara Pemda dan Bank RKUD.
		4. Rendahnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
	4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset aset masih belum optimal	1. Terdapat aset aset yang statusnya bermasalah dengan pihak III
		2. Informasi / data yang tersedia terkait pengelolaan aset belum tervalidasi
		3. Cakupan dan rentang kendali dalam pengelolaan aset yang besar
		4. Jumlah sumber daya manusia pengelolaan aset yang tidak memadai
		5. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait data pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang digunakan



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
		6. Masih terdapat aset yang belum didukung dokumen/data untuk dilakukan proses pensertifikatan tanah
	5. Kurang maksimalnya profesional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas.	1. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko
		2. Masih lemahnya sistem pengendalian internal Perangkat Daerah
		3. Kurangnya pagu anggaran indikatif pengawasan yang ditetapkan.
	6. Belum optimalnya pembentukan peraturan daerah	1. Belum tersedianya jabatan pelaksana administrasi hukum, analisis peraturan dan perundang-undangan dan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang memadai
		2. Peran dan fungsi tenaga ahli DPRD belum optimal
		3. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan kajian perundang-undangan dan penyusunan naskah akademik
		4. Usulan Peraturan Daerah dari Eksekutif/ Perangkat Daerah tidak disertai dengan penjelasan/ keterangan dan/ atau naskah akademik yang memadai
	7. Belum optimalnya pembangunan daerah Kota Pontianak di bidang perekonomian dan SDM	Belum adanya data kerjasama lokal maupun nasional yang berpotensi dikerjasamakan untuk pembangunan di daerah Kota Pontianak
	8. Belum dilaksanakan kerjasama daerah secara optimal	1. Perangkat Daerah pelaksana kerjasama daerah tidak memberikan laporan pelaksanaan kerjasama dengan tertib dan dilakukan secara tertulis
		2. Tidak tersedianya data potensi wilayah yang bisa dikerjasamakan
	9. Adanya tuntutan pelayanan publik berbasis IT dan data yang update,	1. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan layanan publik yang murah dan cepat



Aspek	Permasalahan	Akar Permasalahan
	namun belum dapat dilaksanakan secara optimal	<ol style="list-style-type: none">2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam satu data kependudukan untuk semua keperluan, seperti pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan, nama dan alamat (By NIK By Name By Address)3. Masih perlunya pembenahan secara menyeluruh terkait masalah infrastruktur disdukcapil meliputi masalah <i>cyber security</i> untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang daerah di masa mendatang. Isu Strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun dapat berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat. Hal tersebut dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Pontianak. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

3.2.1. Isu Internasional

Tantangan global ke depan semakin kompleks dengan adanya perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatrend global. Perubahan global tersebut meliputi perubahan transformative berskala besar, berjangka panjang, dan bersifat massif terutama pada kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Beberapa faktor tersebut menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat, sehingga menciptakan tatanan kehidupan baru.



Gambar 3.1 Isu Strategis Nasional

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Terdapat sepuluh *megatrend global* yang akan dihadapi menuju 2045. *Megatrend global* ini memiliki dua sisi, yakni memberikan potensi kemajuan bagi sosial ekonomi global, tetapi disisi lain juga berdampak disruptif. Beberapa perubahan tersebut meliputi:

1. Urbanisasi dunia;
2. Perdagangan internasional;
3. Disrupsi teknologi;
4. Demografi global;
5. Geopolitik dan geoekonomi;
6. Penduduk kelas menengah
7. Persaingan sumber daya manusia
8. Perubahan Iklim
9. Tata Kelola Keuangan Global
10. Pemanfaatan Luar Angkasa

A. Demografi Global

Tantangan terkait penyesuaian, tingginya kebutuhan hidup masyarakat, serta terbatasnya sumber daya alam dan lahan muncul akibat peningkatan penduduk. Berdasarkan data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini berjumlah 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar pada tahun 2050.



Pemenuhan kualitas keluarga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan bentuk rumah tangga, perkembangan teknologi digital, dan penetrasi global. Perpindahan penduduk dan pergeseran ideologi berpotensi menimbulkan perbedaan struktur dan bentuk keluarga. Infertilitas, penundaan pernikahan, dan perilaku sesama jenis semakin umum terjadi, sehingga menurunkan angka kelahiran.

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dampak dari perkembangan geopolitik yang semakin meluas terhadap seluruh lapisan masyarakat dan tatanan global, tantangan bagi Indonesia adalah meningkatnya persaingan antar negara adidaya yang akan berdampak pada tatanan global.

Kewaspadaan yang semakin meningkat akibat konflik-konflik negara di dunia seperti Perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi menciptakan konflik geopolitik di masa depan di wilayah lain, seperti yang terjadi di Semenanjung Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut Cina Selatan. Kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang bagi negara lain, seperti tingginya tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, dan lain-lain. Selain itu, perang mendorong negara-negara untuk mencari cara militer untuk melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya konflik atau perang lagi di kemudian hari.

B. Geopolitik dan Geoekonomi

Kemunculan kawasan Indo-Pasifik akibat perkembangan dinamika geopolitik yang melibatkan wilayah maritim Samudera Hindia dan Pasifik. Pasifik telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga memicu persaingan antar negara.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Negara-negara berkembang semakin mendominasi output dunia. Pada tahun 2015, negara-negara berkembang menyumbang 55% dari total output dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang akan mencapai 71% dari total nilai output dunia, dengan negara-negara Asia sebagai pendorong utama menyumbang 54% dari total nilai output global. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita di negara maju masih lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selama 60 tahun terakhir, sebagian besar negara berkembang mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 54% ekspor nasional Amerika Latin berbasis komoditas, 81% di Afrika, dan 75% di negara-negara Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, terutama di negara-negara pengimpor komoditas, telah menurunkan permintaan terhadap komoditas. Tingkat kesiapan menghadapi perubahan komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang terjadi akibat kebijakan makroekonomi yang kredibel berdasarkan prinsip kehati-hatian telah mendukung pertumbuhan selama bertahun-tahun dan akan menjadi salah satu pilar utama di masa depan. Investasi jangka panjang pada peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan



berkelanjutan. Reformasi dan perbaikan lingkungan usaha akan mendukung terbentuknya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

C. Perkembangan Teknologi

Manfaat dari perkembangan teknologi digital telah dirasakan oleh masyarakat, seperti Internet of Things (IoT), blockchain, hyper-connected Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Life Cycle Management, dan Robotic Process. otomatisasi (RPA)), komputasi tepi, sistem robot otomotif, 3D dan teknologi masa depan.

Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi sebagian besar aktivitas industri, seperti: nanoteknologi, blockchain; robotika pintar, IoT, kecerdasan buatan, dan teknologi imersif; digitalisasi untuk memungkinkan konektivitas: material canggih; rekayasa genetika dan bioteknologi; teknologi

Inovasi dalam proses belajar mengajar berbasis kecerdasan buatan (A) diperlukan agar transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan dapat terus berjalan tanpa kendala ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan maka penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Kecerdasan buatan kini bahkan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperkirakan sebelumnya. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pengambilan kebijakan, termasuk pengembangan peraturan. Pemanfaatan teknologi membantu tercapainya proses pembentukan undang-undang dan peraturan serta pembangunan lembaga-lembaga nasional yang lebih terencana, lengkap dan sistematis.

D. Urbanisasi Dunia

Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan Di sisi lain, dampak pandemy COVID-19 di samping.

E. Konstelasi Perdagangan Global

Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya



produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara.

Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial dan kompetensi SDM industri yang berkualitas. Khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Kerjasama Kawasan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-- dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global investasi.

F. Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Computing*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

G. Pertumbuhan Kelas Menengah

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses.

H. Persaingan Memperebutkan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan sumber daya alam (SDA) (energi, air, dan pangan) diperkirakan akan meningkat secara global di masa depan. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam seperti air, pangan, dan energi sehingga mendorong persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam.

I. Perubahan iklim

Perubahan iklim global, kerusakan dan polusi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman (tiga krisis global, tiga krisis planet) diperkirakan akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari. Triple Planet Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan model pembangunan seperti biasa (BaU) yang lama dan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Tren pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Banyak negara maju dan berkembang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Promosi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon yang dilakukan Indonesia adalah arah pengembangan kebijakan global di masa depan.

J. Pemanfaatan luar angkasa

Antariksa dianggap sebagai warisan bersama umat manusia, yaitu suatu ruang strategis yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Peraturan bahwa ruang angkasa bukan milik suatu negara tertentu telah mendorong banyak negara untuk mengembangkan industri dirgantara. Dalam jangka panjang, ekonomi antariksa global akan tumbuh secara signifikan. Ekonomi luar angkasa diperkirakan akan mencapai \$469 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai \$1 triliun pada tahun 2040.

3.2.2. Isu Nasional

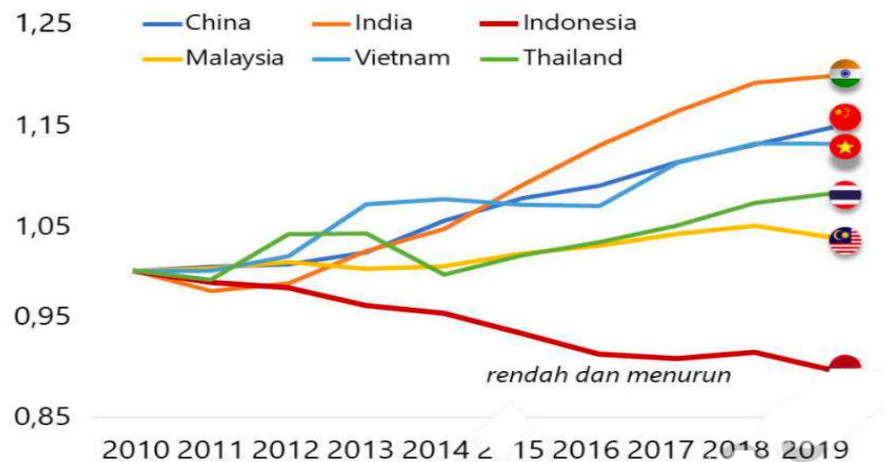
Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan.

A. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.



Gambar 3.2 Rata-Rata Total Factor Productivity Index
Sumber: APO, 2022



Grafik 3.1 Total Factor Productivity Index 2010-2019

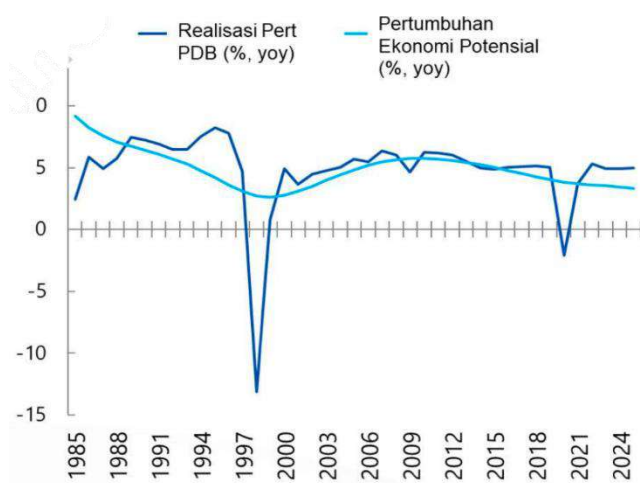
Sumber: APO, 2022

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Berikutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022.

Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen.

B. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi disebabkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari seri anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81). Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada 2005.



Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia (1985-2024)

Sumber: Bank Dunia, 2023

C. Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai

Peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri,

serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445, jauh tertinggal dari Malaysia (1.863), Singapura (9.766), dan Korea Selatan (267.527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

D. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

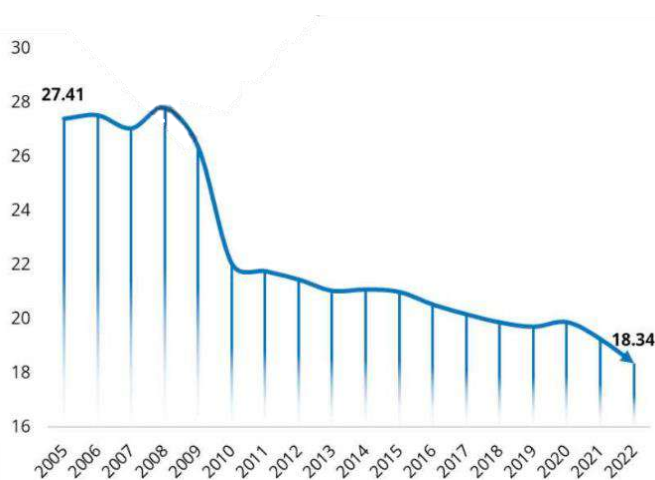
Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula 27,41 persen di tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen tahun 2022.

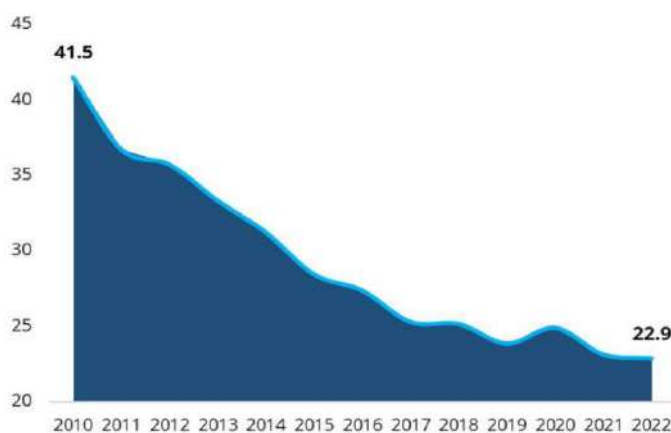
Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata disebabkan

terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital belum merata. Inovasi dan



Grafik 3.3 Kontribusi Manufaktur terhadap PDB
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Grafik 3.4 Produktivitas Pertanian
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

E. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60 persen.

Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Meskipun demikian, peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

F. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

G. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56.3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.3. Isu Strategis Kota Pontianak

Berdasarkan permasalahan dan analisis akar permasalahan yang ada di Kota Pontianak, berikut ini merupakan proses perumusan isu strategis di Kota Pontianak.



Tabel 3.2 Perumusan Isu Strategis RPJPD Kota Pontianak

Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Perubahan iklim	Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi		1. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah 2. Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan	1. Rendahnya ketahanan daerah dan kualitas lingkungan hidup
	Perlunya kerja sama dengan dunia internasional terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut	Perlunya dukungan dari pusat terkait aturan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut	Perlu adanya kerjasama pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan gambut antar daerah untuk menjaga kelestariannya		
	Menggabungkan strategi pencegahan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan	Belum efektifnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan			
	Peningkatan kemitraan kerjasama dalam pengurangan risiko bencana	Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar <i>stakeholder</i> yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, media massa dan NGO			
	Perlunya pengembangan teknologi peralatan yang canggih dalam mendeteksi bencana	Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat			
	-	Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta sumber daya aparatur penanggulangan bencana			
Menurunnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup perkotaan	Perubahan iklim dan peningkatan gas rumah kaca	Meningkatnya frekuensi bencana	Penurunan curah hujan dan peningkatan suhu ekstrem	Mengimple-mentasikan rencana aksi terhadap pencegahan dan perubahan iklim	
		Penurunan kualitas udara secara nasional, bahkan sempat berdampak ke negara tetangga	Kebakaran hutan dan lahan		



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
		Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup (kualitas air, tanah dan udara)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta terjaganya ekosistem keanekaragaman hayati		
	Masih minimnya peran masyarakat internasional dalam mendorong Program GRK dan Proklam	Masih minimnya peraturan dari pemerintah pusat dan program untuk mendukung daerah dalam mendorong Program GRK dan Proklam	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam penanganan Program GRK dan Proklam		
	Keterbatasan sumber daya air	Penurunan Kualitas dan kuantitas Air Permukaan	Penurunan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	A. Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam pencegahan penurunan kualitas lingkungan hidup daerah B. Peningkatan akses pelayanan air bersih masyarakat (kualitas dan kontinuitas air bersih	
	Masih minimnya peran masyarakat internasional dalam mendorong pemenuhan pilar-pilar SDG's pada negara-negara yang sedang berkembang	Kurang konsistensi dan keberlanjutan program pemerintah pusat dalam pemenuhan pilar-pilar SDG's	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam pemenuhan pilar-pilar SDG's	-	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
	Kurang konsistennya pihak internasional dalam membatasi penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil	Masih kurangnya inovasi dalam pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan pembangkit listrik	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam pengurangan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan pembangkit listrik	Peningkatan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan	
	Kurang konsistennya pihak internasional dalam menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk negara-negara yang memiliki peran sebagai paru-paru dunia	Masih minimnya peraturan pemerintah pusat bagi daerah yang belum memenuhi standar RTH yang ditetapkan	Kurangnya sinkronisasi antar daerah dalam pemenuhan standart Ruang Terbuka Hijau terutama pada daerah yang berbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan program penghijauan perkotaan dengan mencapai proporsional RTH yang dianjurkan 2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 	
	Meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil	Perlunya inovasi pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk melakukan pengembangan sampah menjadi energi baru terbarukan	Perlu kolaborasi antara masing-masing Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan energi baru terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan implementasi aturan-aturan dalam konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab secara optimal 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan limbah B3 3. Pengelolaan bahan kimia dan jenis limbah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
	-	Tahun 2030 tidak diperbolehkan lagi adanya TPA (semuanya harus berubah menjadi TPST), namun jenis produk kemasan yang <i>Non Biodegradable</i> (tidak bisa diurai oleh alam) semakin berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana TPA Regional terkendala masalah lahan dan pembiayaan 2. Pengelolaan sampah dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang tinggi perlu kolaborasi peran serta masyarakat dan pemerintah 		
	Berkurangnya Keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) akibat penggunaan tata guna lahan yang tidak terkendali			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam pencegahan penurunan kualitas lingkungan hidup daerah 2. Pengelolaan Lahan Gambut secara berkelanjutan 	
Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	Pembangunan berbasis Tata Ruang yang menyeimbangkan urbanisasi dengan meminimalisasi potensi degradasi lingkungan	Perkuatan Kebijakan tata ruang dengan terbitnya UU Cipta Kerja seperti perizinan pemanfaatan ruang secara digital	Pembangunan yang berkelanjutan dengan mengacu pada RTRW kota	-	
Belum optimalnya Infrastruktur Wilayah	Urbanisasi	Deforestasi dan penyediaan rumah layak huni	Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan 2. Peningkatan penataan kawasan pemukiman kumuh 	2. Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur berkelanjutan



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
				3. Peningkatan akses pelayanan air bersih masyarakat (kualitas dan kontinuitas air bersih) 4. Peningkatan Akses Sanitasi berupa infrastruktur sanitasi berupa SPALDT dan SPALDS	
Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta kemacetan lalu lintas pada peak hour	Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat.	Belum optimalnya konektivitas, menyebabkan rendahnya kinerja logistik dan daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pasifik	Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih menghadapi beberapa tantangan	Belum terciptanya sistem manajemen transportasi public	
		Percepatan Pemanfaatan kendaraan transportasi yang menggunakan energi bersih yang didukung dengan penggunaan sistem penyimpanan energi secara massal di seluruh wilayah Indonesia dalam mewujudkan transportasi hijau	Pengembangan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan dan pembangunan serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	saling terhubung	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih terbatas	Transportasi Multimoda yang terintegrasi	Pengembangan Transportasi Perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota - kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.		
Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu pendidikan berkualitas	Peningkatan pelayanan sekolah inklusif	Masih rendahnya tingkat pendidikan terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang masih di bawah standar nasional	1. Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	3. Sumber daya manusia yang kurang berdaya saing
		Wajib PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik			
		Revitalisasi pendidikan nonformal			
		Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)			
		Adopsi STEAM dan diversifikasi layanan pendidikan berbasis digital			
Penguatan pengelolaan guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan					



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat		Penerapan sistem pembelajaran sepanjang hayat Penguatan masyarakat berkarakter ilmiah (scientific temper) Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi.			
Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan stunting	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu Kehidupan sehat dan sejahtera	Penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC, Kusta, dll) Perkuatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan Pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan Jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting Pendidikan dokter spesialis berbasis RS dan percepatan masa produksi dokter	Prevalensi Stunting masih tinggi Belum optimalnya peningkatan Umur Harapan Hidup	1. Upaya terhadap peningkatan kesehatan pada ibu dan anak 2. Peningkatan terhadap kesehatan anak terutama terhadap anak dibawah 5 tahun 3. Penanganan serius terhadap pencegahan penyakit menular dan	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
		Pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Peningkatan ketahanan keluarga		tidak menular di Masyarakat	
Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan dan pengembangan prestasi olahraga	Masih lemahnya strategi, peran dan prioritas dari stakeholder olahraga terhadap olahraga masyarakat	1. Prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar	1. Belum optimalnya peran BUMN dan Pemerintah Daerah dalam mendukung sarana olahraga serta masih kurangnya sinergitas antar organisasi keolahragaan	-	
		2. Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah	2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga untuk mencapai kebugaran		
Masih adanya penduduk miskin serta akses perlindungan sosial pada masyarakat yang belum merata	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan	1. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.	Pembangunan IKN memperbesar kesempatan kerja	1. Pengurangan Angka Kemiskinan	4. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata
		2. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP di seluruh wilayah Kalimantan terutama Kalimantan Barat		2. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat	
Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak	-	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Meningkatnya jumlah lansia	-	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI	-	-	-	Peningkatan Perekonomian Daerah	
Pemanfaatan koperasi yang belum optimal	-	Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi.	-		
Pemanfaatan destinasi wisata belum di kelola optimal serta belum sinkronnya acara acara seperti olah raga wisata, dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASEAN sebagai episentrum event (MICE) berskala internasional 2. Pengembangan Program Pariwisata Digital dengan meningkatkan jumlah start up atau perusahaan rintisan di bidang pariwisata 3. Digitalisasi nomadic tourism fenomena wisata di mana wisatawan lebih suk menjelajah dan bekunjung ke destinasi yang kurang konvensional. 4. Pengembangan Virtual Tour yang memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi destinasi melalui pengalaman virtual. 5. Kampanye staycation (tren di mana orang menghabiskan liburan mereka di daerah lokal daripada bepergian jauh). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. 2. Peningkatan pariwisata berkelanjutan serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan berorientasi ekspor. 3. Pengembangan destinasi wisata potensial seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam. 	IKN memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke ibu kota.		



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
	6. Konsep <i>Sustainable Tourism</i>				
Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak akibat ekosistem ekonomi kreatif yang belum siap	1. Fenomena perkembangan cepat Artificial Intelligent mulai merambah industri kreatif menggeser ide kreatifitas manusia.	1. Ketidakesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.	1. Belum terjalin relasi regional (antar kawasan) dalam upaya saling mendorong pembangunan ekonomi kreatif		
	2. Plagiarisme hasil karya industri kreatif semakin mudah dengan berkembangnya TIK dan Sosial Media	2. SDM kreatif eksodus ke Luar Negeri didasari motif ekonomi sehingga berdampak industri lokal kesulitan mendapatkan tenaga kerja kreatif yang berkualitas di dalam negeri	2. Kesamaan geografis dan budaya menyebabkan realtif kurangnya nilai keunikan karya kreatif		
	3. Dominasi ekonomi negara china dengan produk yang lebih murah	3. Birokrasi yang tidak efisien. 4. Besarnya biaya di luar ongkos produksi 5. Ketergantungan bahan baku dan peralatan import dalam industri kreatif 5. Kebijakan prioritas Produk Dalam Negeri dan TKDN 6. Penguatan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan negara (national branding) di mata dunia Internasional			



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
		7. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum <i>bankable, high risk high return, cash flow</i> yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible;"			
<p>Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja</p> <p>Tingginya tingkat pengangguran dan <i>underemployment</i> terutama di kalangan pemuda</p>	Adanya kesenjangan antara keterampilan yang diminta oleh pasar global dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja	Transformasi Ekonomi Nasional RPJPN seperti penyiapan tenaga kerja yang terampil	Diperlukan adanya sinkronisasi antara pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja	<p>1. Peningkatan Perekonomian Daerah</p> <p>2. Peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global</p>	5. Belum optimalnya pengembangan simpul ekonomi perdagangan dan jasa skala nasional



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Migrasi Tenaga Kerja yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di negara asal dan negara tujuan	Migrasi Tenaga Kerja Internasional. Migrasi tenaga kerja menjadi fenomena global yang signifikan, baik yang terkait dengan migrasi tingkat tinggi maupun buruh migran.	Migrasi Tenaga Kerja. Pengelolaan migrasi tenaga kerja, baik internal maupun internasional, termasuk perlindungan dan manfaat bagi pekerja migran serta integrasi mereka dalam masyarakat, adalah isu penting.	Migrasi Tenaga Kerja Regional. Pergerakan tenaga kerja antar negara atau wilayah disuatu kawasan dapat menciptakan keseimbangan anatar penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta mempengaruhi kebijakan imigrasi dan integrasi sosial.		
Kurangnya pendidikan dan Pelatihan yang Tepat karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja	Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sangat penting dalam membentuk daya saing negara di pasar kerja. Tantangan termasuk penyedia pendidikan berkualitas dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.	Transformasi Ekonomi Nasional RPJPN seperti penyiapan tenaga kerja yang terampil	Diperlukan adanya sinkronisasi antara pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja	3. Keterbukaan investasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Banyak tenaga kerja terutama dalam sektor informal menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, termasuk kontrak sementara atau kontrak tanpa jaminan keamanan pekerjaan	Ketidakpastiaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Fluktuasi ekonomi global, perubahan teknologi, dan krisis keuangan dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan pekerjaan.	Hak dan Kondisi Kerja. Perlindungan hak-hak tenaga kerja, termasuk hak untuk berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kondisi kerja yang layak, adalah aspek penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja.	-		
Banyak pekerja, terutama di sektor informal, bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, termasuk jam kerja yang panjang, gaji rendah, lingkungan kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan dan keamanan kerja yang memadai.	Ketenagakerjaan Informal. Sebagian besar tenaga kerja di negara-negara berkembang bekerja dalam sektor informal, yang ering kali tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, jaminan sosial, atau perlindungan hukum yang memadai. Meningkatkan kondisi pekerja disektor informal menjadi tantangan utama.	Ketenagakerjaan Informal. Jumlah besar pekerjaan informal adalah isu yang signifikan. Perlindungan sosial dan keamanan kerja bagi pekerja di sektor ini adalah yang perlu diperhatikan.	Kondisi Ketenagakerjaan di Perdesaan dan Perkotaan. Isu khusus terkait dengan ketenagakerjaan di daerah perdesaaan dan perkotaan, termasuk urbanisasi, akses terhadap pekerjaan dan infrastruktur, serta tingkat pengangguran di kedua konteks ini.	4. Peningkatan pengembangan potensi produktifitas	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Diskriminasi dan Ketidaksetaraan dalam pekerjaan, promosi, dan pendapatan yang adil	Persoalan Gender dan Ketenagakerjaan. Kesetaraan gender ditempat kerja, termasuk kesenjangan gaji dan partisipasi perempuan dalam sektor formal dan informal, tetap menjadi isu penting.	-	Kebijakan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial. Mendorong kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender, inklusi sosial dan akses kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat disuatu wilayah adalah isu kursorial.	masyarakat pada semua kawasan dalam mendukung aktifitas peningkatan perekonomian	
Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia	Adanya pengembangan teknologi seperti <i>Artificial Intelligence, Internet of Things</i> , dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang cepat dan transformasi ekonomi membutuhkan keterampilan baru yang relevan, dan mengatasi kesenjangan ini menjadi prioritas.	Transformasi Digital RPJPN	-	Aktif dalam pengembangan riset dan inovasi daerah terhadap pembangunan berkelanjutan	
Akses Pangan yang Tidak Merata	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu TPB 2 Tanpa Kelaparan	Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.	Konektivitas distribusi daerah sentra produksi dengan daerah pemasaran/konsumen.	Peningkatan jumlah produksi pertanian dengan luasan	
Penurunan jumlah produksi pertanian (Tanaman Pangan & Hortikultura)		Konversi lahan pertanian (59% lahan dikuasai RT dan kepemilikan < 0,5 Ha)	-Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat sebagai sentra pembangunan di semua sektor	pertanian yang minim	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Inovatif, Produktif, Lestari dan Berkelanjutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan 2. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan 3. Meningkatnya konsumsi ikan 	-		
Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk hasil peternakan 2. Meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasukan ternak 2. Adanya sarana dan prasarana khusus yang menunjang dalam proses pemasukan ternak 		
Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya, sarana dan prasarana di bidang peternakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk peternakan yang memiliki jaminan ASUH/ASU 2. Meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat 	Pembangunan rumah potong yang sesuai dengan standar		
Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif	Keuangan internasional akan mengalami pergeseran dari Dollar AS menjadi multi currencies	Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau.	-	Peningkatan Perekonomian Daerah	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Tidak adanya insentif pada calon investor dan potensi daerah yang belum dipromosikan secara optimal	Perubahan geopolitik dan geoekonomi akan merubah paradigma pembangunan global.	Pengembangan <i>green financing</i> dan penerapan <i>carbon pricing</i> untuk mendukung investasi hijau (<i>Green Investment</i>)	-		
Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relatif sangat berfluktuatif	Peran perdagangan internasional akan tumbuh 3,4 persen per tahun.	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis ekspor	-	Peningkatan ekspor non migas daerah	
Belum optimalnya pengembangan produk unggulan	1. Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;	1. Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.	Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batubara, migas, dan hasil hutan) dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals,	1. Mendukung partisipasi akses industri dan perusahaan skala kecil dengan program pengembangan	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
	2. Green Industry	2. Penerapan ekonomi sirkular, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui industri hijau.	petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik, dan bioteknologi.	2. Mengembangkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan	
Rasio Kemandirian Daerah masih berada pada kategori menuju mandiri	1. Penguatan sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. 2. Kemajuan dalam teknologi keuangan seperti blockchain, cryptocurrency dan fintech membawa perubahan pada sistem keuangan global	Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara	Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk di antaranya sektor keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Perangkat Daerah	6. Rendahnya kapasitas fiskal daerah
Pengelolaan dan pemanfaatan aset aset masih belum optimal	Aset negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan indeks daya saing infrastruktur dan global	Belum optimalnya pengelolaan aset negara baik dari segi administrasi dan pemanfaatannya yang memberi nilai tambah	Manajemen pengelolaan aset belum optimal.		
Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB nomor 16 terkait Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan TPB 17 terkait	Pembaharuan hukum kolonial dan adaptif serta penyederhanaan regulasi.	Perangkat Daerah yang lincah dan dinamis		7. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
	Kemitraan untuk mencapai tujuan;				
Kurang maksimalnya profesional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas	-	1. Pembinaan SPIP	1. Inspektorat sebagai penjamin kualitas untuk menjaga nilai indeks persepsi korupsi (IPK) kurang optimal		
		2. Pembinaan Kapabilitas APIP	2. Pemeriksaan belum berbasis risiko		
Belum optimalnya pembentukan peraturan daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat		



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Belum optimalnya pembangunan daerah Kota Pontianak di bidang perekonomian dan SDM	Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 khususnya pada prioritas nasional ketiga, yaitu pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kerjasama antarwilayah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional		
Belum dilaksanakan kerjasama daerah secara optimal	Kerjasama Daerah belum dimanfaatkan dengan optimal	Respon kebijakan berskala besar (<i>extraordinary</i>) dengan prioritas dan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi di masing-masing negara	Pemulihan diberbagai sektor pasca covid 19		
Adanya tuntutan pelayanan publik berbasis IT dan data yang <i>update</i> , namun belum dapat dilaksanakan secara optimal	Kecepatan Perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi diberbagai bidang kehidupan masyarakat	Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pemerintah digital 2. Percepatan masyarakat digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi Sistem Pendataan Penduduk 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Pemerataan Informasi dan Komunikasi Daerah 4. Pelaksanaan pengumpulan data statistik dan pengolahan data secara bertanggung jawab dan transparan 5. Penerapan keamanan bernegara yang berkelanjutan 	



Permasalahan	Isu Strategis Sesuai Konteks			Rekomendasi Isu atau Sasaran Strategis KLHS	Isu Strategis
	Internasional	Nasional	Regional		
Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu kesejahteraan gender	Memenuhkan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak	1. Peningkatan peran perempuan dalam partisipasi kelembagaan publik 2. Peningkatan program perlindungan perempuan dan anak	8. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat
		Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif			
		Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif			

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024



Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan isu strategis Kota Pontianak adalah:

1. Rendahnya ketahanan daerah dan kualitas lingkungan hidup, dengan lingkup
 - a. Mitigasi dan Penanggulangan bencana
 - b. Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Ekonomi Sirkuler
 - d. Bahan bakar ramah lingkungan
 - e. Peningkatan RTH
 - f. Ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW
2. Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur berkelanjutan, dengan lingkup:
 - a. Prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai termasuk sanitasi yang layak dan aman
 - b. Transportasi umum yang terintegrasi
 - c. Konektivitas wilayah sekaligus mengurangi kemacetan
 - d. Penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai
 - e. Penyediaan air bersih untuk air minum aman
 - f. Penyediaan listrik dari energi terbarukan
 - g. Hunian dan Perkantoran vertikal
3. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah karena belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
4. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah, dengan lingkup:
 - a. Pencegahan korupsi melalui zona integritas
 - b. Akuntabilitas kinerja
 - c. Kualitas SDM Aparatur
 - d. Kualitas pelayanan publik berbasis digital
5. Sumber daya manusia yang kurang berdaya saing, dengan lingkup:
 - a. Kualitas Mutu dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat
 - b. Kualitas dan mutu kesehatan masyarakat
 - c. Pemenuhan hak anak
 - d. Kesetaraan gender
 - e. Tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar
 - f. Kepemudaan dan olahraga
6. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata, dengan lingkup:
 - a. Pengentasan kemiskinan
 - b. Pemerataan distribusi pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah
 - c. Ketahanan pangan
 - d. Pemberdayaan lansia dan disabilitas
7. Belum optimalnya pengembangan simpul ekonomi perdagangan dan jasa skala nasional, dengan lingkup:
 - a. Peningkatan investasi
 - b. Industri dan perusahaan skala kecil dan menengah
 - c. Daya saing jasa sektor kesehatan dan pendidikan
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif
8. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan lingkup:
 - a. Perlindungan anak dan perempuan
 - b. Penegakan peraturan daerah
 - c. Kerukunan antar umat beragama



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi Daerah merupakan intisari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dan dijabarkan dalam turunan yang harus dijabarkan dalam bentuk misi serta rincian untuk mencapai tujuan yang dituju dari arah pembangunan daerah. Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

4.1 Visi Kota Pontianak

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Pontianak. Selain itu sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup yang mana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yaitu VISI INDONESIA EMAS 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat adalah “Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Dari rumusan isu strategis dan keharusan menjaga keselarasan dengan visi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, maka Visi Pembangunan Kota Pontianak tahun 2025-2045 adalah:

“KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Pengertian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pontianak Unggul artinya Kota Pontianak menjadi daerah yang memiliki kelebihan dalam bidang perdagangan dan jasa (pelayanan publik, keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata) dan didukung infrastruktur yang representatif.
2. Pontianak Sejahtera artinya masyarakat Kota Pontianak dalam keadaan aman, makmur, dan sentosa. Keadaan ini ditandai dengan tidak adanya konflik, menurunnya angka kriminalitas, meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, menurunnya tingkat pengangguran, berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
3. Pontianak Berkelanjutan artinya Kota Pontianak terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, terencana, dan berwawasan lingkungan.

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Pontianak

No	RPJPD Kota Pontianak 2025-2045	
	Sasaran Visi	Indikator
1	Pendapatan per kapita Meningkat	a. PDRB per kapita (RpJuta)
		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)
		b. Rasio gini (Indeks)
		c. Kontribusi PDRB Kota Pontianak terhadap Provinsi
		d. Laju Pertumbuhan Ekonomi
3	Meningkatkan Keunggulan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> yang didukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, 2024

*: Data belum tersedia

4.2 Misi Kota Pontianak

Perumuskan misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045 dengan memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- 8) Kesenambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1. Transformasi Sosial

IE1 Kesehatan untuk Semua

IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

IE4 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

IE5 Penerapan Ekonomi Hijau

IE6 Transformasi Digital

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

IE9 Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas, dan Kolaboratif

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomas

IE10 Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gantar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

IE12 Ketangguhan Diplomas

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

IE13 Beragam a Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE14 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender

IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Gambar 4.1 Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Dengan memperhatikan agenda pembangunan dan mendukung Visi Kota Pontianak, berikut merupakan penjabaran Misi Kota Pontianak Tahun 2025-2045:

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
Adalah masyarakat yang memiliki prinsip transformasi sosial yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata dengan tingkat pendidikan minimal lulusan sekolah menengah atas/ sederajat. Selain itu, usia harapan hidup mencapai 81,99 tahun dan masyarakat yang memiliki budi pekerti yang baik, jujur, bertanggung jawab, santun, serta menerapkan nilai-nilai luhur, dan rata-rata lama sekolah 16 tahun.
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel berbasis teknologi informasi.**
Adalah pemerintahan yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, adaptif, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan integritas dan *agile*. Kota Pontianak dalam penerapan tata kelola pemerintahan juga mengimplementasikan kolaborasi antar *stakeholders* didukung dengan teknologi informasi yang mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.
- 3. Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau**
Adalah Pemerintah Kota Pontianak mengedepankan manajemen wilayah perkotaan yang berkelanjutan melalui penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta tata ruang wilayah perkotaan sesuai kebutuhan tuntutan pertumbuhan kota dengan mempertimbangkan orientasi daya dukung, keseimbangan lingkungan hidup dan tanggap bencana.
- 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif**
Adalah Mengedepankan pembangunan ekonomi yang inklusif dan stabil dengan memperhatikan transformasi ekonomi di lingkup pemanfaatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui Transformasi Digital, Kreatif, Inovatif serta Peningkatan Produktivitas Ekonomi daerah dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- 5. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya**
Adalah masyarakat Kota Pontianak menegakkan supremasi hukum berkeadilan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan ketahanan sosial budaya, perlindungan sosial yang adaptif, penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berikut ini merupakan hubungan agenda pembangunan RPJPN dengan misi RPJPD Kota Pontianak:



Tabel 4.2 Hubungan Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dengan Nasional

Visi RPJPD Kota Pontianak	Sasaran Visi RPJPD Kota Pontianak	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025*	2029	2034	2039	Target 2045	Misi	Hubungan RPJPN/Misi RPJPD Provinsi dengan Misi Kota Pontianak
Kota Pontianak Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Pendapatan per kapita Meningkat	a. PDRB per kapita (RpJuta)	77,86	173,40-183,40	268,93-288,93	364,47-394,47	460-500	Misi 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	1. Transformasi Ekonomi 2. Transformasi Sosial
		b. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,55	13,41	12,28	11,14	10		
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,00	3,15	2,29	1,44	0,58	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,343	0,336	0,325	0,314	0,302		
		c. Kontribusi PDRB Kota Pontianak terhadap Provinsi(%)	16,63	16,23	15,82	15,41	15		
		d. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,33	5,37	5,42	5,46		
	Meningkatkan Keunggulan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,81	3,86	3,91	3,96	4,01	Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi Misi 3: Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan	1. Transformasi Tata Kelola 2. Transformasi Ekonomi 3. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Nasional



Visi RPJPD Kota Pontianak	Sasaran Visi RPJPD Kota Pontianak	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025*	2029	2034	2039	Target 2045	Misi	Hubungan RPJPN/Misi RPJPD Provinsi dengan Misi Kota Pontianak
								<p>yang Berwawasan Lingkungan melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau</p> <p>Misi 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif</p> <p>Misi 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib untuk mencapai ketahanan Sosial dan Budaya</p>	<p>5. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan</p> <p>6. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</p> <p>7. Kestinambungan pembangunan</p>
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,33	83,23	85,70	88,18	90,65	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	<p>1. Transformasi Sosial</p> <p>2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p>
		Indeks Modal Manusia (IMM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		



Visi RPJPD Kota Pontianak	Sasaran Visi RPJPD Kota Pontianak	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025*	2029	2034	2039	Target 2045	Misi	Hubungan RPJPN/Misi RPJPD Provinsi dengan Misi Kota Pontianak
	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> yang didukung	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	67,62	74,06	82,11	90,16	99,82	Misi 3: Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau	1. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 2. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,30	61,07	62,10	63,12	64,15		

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024



BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJPD dengan efektif dan efisien. Pendekatan dengan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategi tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kota Pontianak harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui adaptasi terhadap perkembangan internal maupun eksternal Kota Pontianak. Di samping itu, lingkungan internal juga menjadi hal penting karena di dalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga visi dan misi yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

Sasaran dan arah kebijakan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan penetapan sasaran dan arah kebijakan ini, dapat ditentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) untuk mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap.





Tabel 5.1 Arah Kebijakan Kota Pontianak 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Penguatan Pondasi)	2030-2034 (Akselerasi Transformasi)	2035-2039 (Ekspansi Global)	2040-2045 (Perwujudan Indonesia Emas)
KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, inklusif, serta produktif	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Riset dan Inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Maju dan Unggul
	Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	Penataan Pondasi Regulasi, Tata Kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Kelembagaan Tepat Fungsi dan Penguatan SDM ASN Berbasis Merit	Penguatan Akselerasi SDM ASN Kompeten, Agile dan Kelembagaan Kolaboratif	Penguatan tata kelola Pemerintah yang adaptif dan Peningkatan Kualitas SDM ASN yang Kompetitif	Penguatan Tata kelola Pemerintah yang berintegritas, Kolaboratif dan adaptif
	Misi 3: Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi dengan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mendukung resiliensi daerah dan pengembangan kawasan Kota Pontianak beserta hiterlandnya	Peningkatan pemerataan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur serta Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang memperkuat resiliensi daerah	Pengembangan infrastruktur hijau metropolitan area dengan tata kelembagaan yang terintegrasi dan kolaboratif menuju kota tanggap bencana	Pengelolaan infrastruktur dan energi baru terbarukan yang terintegrasi dan berkelanjutan hingga menjadi kota yang tanggap bencana
	Misi 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil,	Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar serta peningkatan inovasi pada ekosistem	Mendorongan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing serta pengembangan ekonomi hijau, ekosistem	Peningkatan ekspansi pasar secara global pada produk-produk lokal melalui pemanfaatan	Mewujudkan masyarakat perkotaan yang sejahtera



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Penguatan Pondasi)	2030-2034 (Akselerasi Transformasi)	2035-2039 (Ekspansi Global)	2040-2045 (Perwujudan Indonesia Emas)
	Produktif, Kreatif, dan Inovatif	industri digital, ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif	industri digital, pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut	infrastruktur yang telah terintegrasi	
	Misi 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial Budaya	Penataan Fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kolaborasi dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum sebagai pondasi ketahanan sosial budaya	Peningkatan kolaborasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, taat hukum, tentram dan tertib untuk penguatan ketahanan sosial budaya	Penguatan kolaborasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, taat hukum, tentram dan tertib menuju ketahanan sosial budaya	Terwujudnya masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan, taat hukum, tenteram dan tertib yang berketahanan sosial budaya

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024



Tabel 5.2 Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJPD dengan KLHS

Periode	Arah Kebijakan RPJPD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
2025-2029	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Mengedukasi masyarakat tentang pemberian vitamin gratis yang dilakukan pada faskes2. Memberikan bantuan peningkatan gizi terhadap balita yang tergolong gizi buruk3. Monitoring terhadap program yang telah diberikan untuk keberlanjutan hasil dari peningkatan gizi pada balita4. Mengedukasi masyarakat terhadap pola makan yang baik dan benar dan bahaya makanan yang mengandung gula tinggi5. Mengedukasi masyarakat terhadap pola asuh anak untuk meningkatkan empati terhadap kekurangan gizi pada anak6. Peningkatan perbaikan gizi terhadap ibu menyusui7. Mengedukasi ibu menyusui terhadap makanan yang mengandung vitamin yang tinggi dan terjangkau8. Melakukan pendataan terhadap baduta yang mengalami gizi buruk untuk dilakukan bantuan terhadap peningkatan gizi pada baduta9. Mengedukasi ibu menyusui terhadap pentingnya peran asi terhadap tumbuh kembang anak10. Sosialisasi terhadap ibu menyusui tentang makanan yang terjangkau sebagai asi <i>booster</i>11. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan khususnya yang membantu persalinan12. Peningkatan kualitas lingkungan untuk menjaga kesehatan pada bayi13. Melakukan pencegahan terhadap penyakit musiman seperti DBD, Malaria, dan lain-lain14. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di daerah
2030-2034	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, inklusif, serta produktif	
2035-2039	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Riset dan Inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	
2040-2045	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Maju dan Unggul	



Periode	Arah Kebijakan RPJPD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS
		<ol style="list-style-type: none">15. Meningkatkan jangkauan layanan kesehatan16. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan17. Penyuluhan mengenai imunisasi dan Kesehatan anak18. Mengedukasi masyarakat terhadap bahayanya penyakit darah tinggi dan bentuk pencegahan penyakit tersebut19. Peningkatan luas cakupan deteksi dini penyakit menular20. Pengendalian vektor penyebab penyakit21. Pembinaan dan pemantauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat22. Mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya kesetiaan pada 1 pasangan23. Mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya alat kontrasepsi dalam pencegahan penyakit HIV24. Mengedukasi masyarakat terhadap deteksi dini penyakit TBC25. Mengedukasi masyarakat terhadap obat gratis yang terdapat di faskes untuk penunjang kesembuhan TBC26. Mengedukasi terhadap pencegahan penyakit TBC kepada masyarakat27. Memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan28. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi		
2025-2029	Penataan Pondasi Regulasi, Tata Kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Kelembagaan Tepat Fungsi dan Penguatan SDM ASN Berbasis Merit	<ol style="list-style-type: none">1. Memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan2. Meningkatkan kapasitas pengurus partai politik perempuan3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan
2030-2034	Penguatan Akselerasi SDM ASN Kompeten, Agile dan Kelembagaan Kolaboratif	



Periode	Arah Kebijakan RPJPD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS
2035-2039	Penguatan tata kelola Pemerintah yang adaptif dan Peningkatan Kualitas SDM ASN yang Kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> 4. Konsisten dalam mempertahankan penerapan <i>affirmative action</i> dengan kuota 30% keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif 5. Peningkatan pendapatan daerah dengan membuka investasi seluas-luasnya dengan prinsip berkelanjutan. 6. Mensosialisasikan kepada para pelaku usaha terhadap pentingnya peran pajak sebagai kontribusi pembangunan daerah 7. Melakukan pendataan terhadap data undang-undang statistik 8. Melakukan pendataan terkait jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan. 9. Melakukan sensus terhadap data registrasi kelahiran dan kematian.
2040-2045	Penguatan Tata kelola Pemerintah yang berintegritas, Kolaboratif dan adaptif	
Misi 3 Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau		
2025-2029	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi dengan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mendukung resiliensi daerah dan pengembangan kawasan Kota Pontianak beserta hiterlandnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RPPLH Kota Pontianak berbasis spasial untuk mempermudah pengambilan kebijakan terhadap lokasi yang akan ditingkatkan DDDTLH tersebut 2. Melakukan Penghijauan pada wilayah yang masih memiliki ruang kosong untuk meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 3. Menggunakan pendekatan analisis spasial terhadap penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada dokumen-dokumen lingkungan 4. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang 5. Pemerataan akses telekomunikasi dan jaringan internet terhadap
2030-2034	Peningkatan pemerataan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur serta Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang memperkuat resiliensi daerah	
2035-2039	Pengembangan infrastruktur hijau metropolitan area dengan tata kelembagaan yang terintegrasi dan kolaboratif menuju kota tanggap bencana	



Periode	Arah Kebijakan RPJPD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS
2040-2045	Pengelolaan infrastruktur dan energi baru terbarukan yang terintegrasi dan berkelanjutan hingga menjadi kota yang tanggap bencana	masyarakat yang berada di pinggiran dan belum mendapatkan pelayanan internet secara luas 6. Melakukan sensus terhadap penggunaan kendaraan listrik serta kendaraan yang menggunakan energi alternatif lainnya 7. Melakukan pendataan terhadap intensitas energi primer 8. Melakukan pendataan terhadap pembangkit energi terbarukan 9. Meningkatkan pelayanan air bersih dan akses sanitasi masyarakat 10. Melakukan sensus perumahan
Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif		
2025-2029	Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar serta peningkatan inovasi pada ekosistem industri digital, ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatkan kapasitas dan daya tarik obyek wisata 2. Meningkatkan dan memperluas jangkauan promosi pariwisata 3. Peningkatan pengembangan potensi produktivitas masyarakat pada semua kawasan dalam mendukung aktivitas peningkatan perekonomian 4. Melakukan pendataan terhadap ekspor non migas
2030-2034	Mendorong produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing serta pengembangan ekonomi hijau, ekosistem industri digital, pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut	
2035-2039	Peningkatan ekspansi pasar secara global pada produk-produk lokal melalui pemanfaatan infrastruktur yang telah terintegrasi	
2040-2045	Mewujudkan masyarakat perkotaan yang sejahtera	



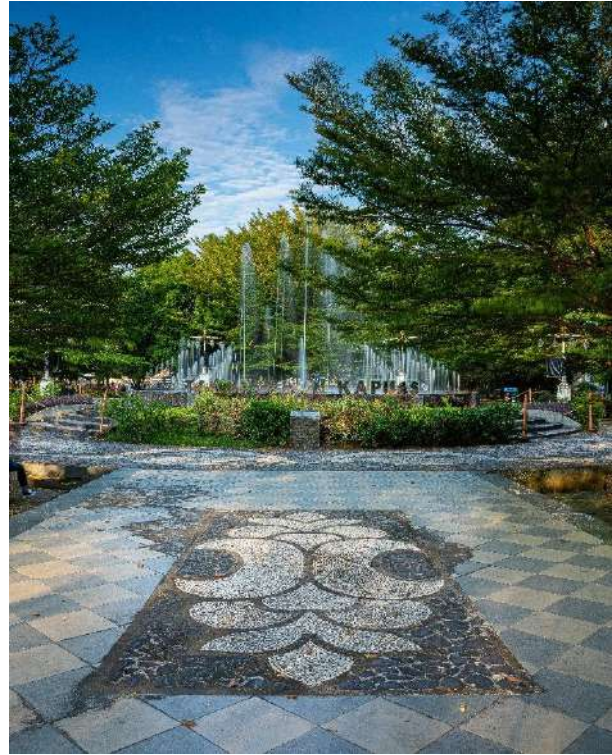
Periode	Arah Kebijakan RPJPD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS
Misi 5 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial Budaya		
2025-2029	Penataan Fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kolaborasi dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pondasi ketahanan sosial budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan program kesejahteraan masyarakat untuk memberi solusi terkait permasalahan ekonomi yang berbuntut kekerasan2. Membuat pos pengaduan terdekat (kantor camat / kantor lurah) terhadap tindak kekerasan yang diberikan)3. Mengedukasi pentingnya perilaku lemah lembut kepada pasangan muda dan solusi apabila hal tersebut terjadi
2030-2034	Peningkatan kolaborasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, taat hukum, tentram dan tertib untuk penguatan ketahanan sosial budaya	
2035-2039	Penguatan kolaborasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, taat hukum, tentram dan tertib menuju ketahanan sosial Budaya	
2040-2045	Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dalam berkehidupan, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib yang berketahanan sosial Budaya	

Sumber : BAPPEDA Kota Pontianak dan KLHS RPJPD Kota Pontianak, 2024

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) merupakan kuantifikasi dari visi dan misi dengan penargetan indikator kinerja pada akhir periode, yang berlangsung selama dua puluh tahun. Hal ini mencakup berbagai sasaran strategis untuk mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah adalah penjabaran visi dan misi pada akhir periode ke-20 (dua puluh). Sasaran menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan.



Sasaran pembangunan Kota Pontianak 2025-2045, dijelaskan dalam rangkaian misi yang mengarah pada kondisi yang diharapkan pada akhir tahun perencanaan. Berikut fokus pembangunan yang digunakan sebagai refleksi ke dalam perencanaan jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk Semua	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.					1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		2. Penuntasan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti TBC* melalui pendekatan integrasi multisektor.					
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Percepatan wajib belajar 16 tahun (1 tahun prasekolah, 12 tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Perguruan tinggi D3).					2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
		2. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara.					
		3. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.					
	IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.					3. Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
		2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.					
		3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.					



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.					4. Peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
		2. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.					
		3. Pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi					
		4. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.					
		5. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.					
		6. Peningkatan kualitas pelayanan publik					
		7. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital					
		8. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan					
		9. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital					



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
Misi 3: Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau	IE15. Lingkungan hidup berkualitas	1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana					5. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup
		2. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir					
		3. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).					
		4. Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.					
		5. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum					
		6. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.					
		7. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal					
		9. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.					



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
		10. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta pembangunan kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh					
		11. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar termasuk sistem transportasi publik.					
		12. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.					
		13. Penyediaan Infrastruktur ramah lansia dan Disabilitas					
		14. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan area yang andal dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.					
		15. Penyiapan dukungan teknis pembangunan akses jalan yang memadai di seluruh Wilayah.					
		16. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.					
		17. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.					
		18. Sosialisasi dan penegakan hukum Perda RTRW/RDTR					

MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
	IE16. Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Peningkatan Ketahanan Energi, Air dan Pangan					6. Peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
	IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.					7. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
		2. Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, khususnya bencana banjir dan kebakaran lahan.					
Misi 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.					
		1. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.				8. Pemenuhan akses perlindungan sosial	
		2. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan					
3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial dan dampak penyalahgunaan narkoba, kegiatan ekonomi, infrastruktur, pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas, serta anak terlantar.							



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
	IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	1. Pengembangan destinasi wisata potensial dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja, seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam dan budaya lokal maupun destinasi MICE dan fasilitas perkotaan.					9. Mengembangkan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
		2. Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work.					
		3. Intensifikasi dan ekstensifikasi produk unggulan daerah.					
	IE6. Transformasi digital	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.					10. Mempercepat transformasi digital
	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatkan pemasaran produk UMKM dan produk unggulan daerah ke pasar regional dan global					11. Memperkuat investasi
	IE8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Pengembangan kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan potensi sebagai kota perdagangan dan jasa, termasuk wilayah Metropolitan area, yang terintegrasi, cerdas, hijau, dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung					12. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkotaan
2. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau							
IE11. Stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.					13. Menjaga stabilitas ekonomi makro daerah	



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	2029	2034	2039	2045	SASARAN POKOK
Misi 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib untuk mencapai ketahanan sosial Budaya	IE10. keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dan peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.					14. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif
		2. Penguatan pengendalian inflasi daerah.					
	IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	1. Penguatan pendidikan agama					15. Penguatan beragama maslahat dan berkebudayaan maju
		2. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda.					
		3. Promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi					
		4. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya.					

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024

Tabel 5.4 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2025-2045

MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	PERIODE 2025-2045							
				BASELINE 2025	TARGET 2029	TARGET 2034	TARGET 2039	TARGET 2045			
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	IE1. Kesehatan untuk Semua	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,07	76,8	78,53	80,26	81,99		
			2.	Kesehatan Ibu dan Anak							
				a. Angka Kematian Ibu (per 100 ribu KH)	76,92	61,54	46,15	30,77	15,38		
				b. Prevalensi Stunting pada Balita	13,68	11,26	8,84	6,42	4		
			3.	Penanganan Tuberkulosis:							
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	93	96	100	100		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	92,9	94,99	97,09	99,6		
			4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	90	100	100	100	100		
			IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1.	Hasil Pembelajaran					
						a. Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i. Literasi Membaca	74,26				76,31	78,35	80,4	82,45		
	ii. Numerasi	69,67				76,13	82,6	89,06	95,53		
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:										
	i. Literasi Membaca	56,69				60,91	65,13	69,35	73,57		
	ii. Numerasi	35,92				41,8	47,68	53,56	59,44		
	2.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)				10,53	11,90	13,27	14,63	16	
	3.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,05	15,66	16,28	16,89	17,50				



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	PERIODE 2025-2045					
				BASELINE 2025	TARGET 2029	TARGET 2034	TARGET 2039	TARGET 2045	
	IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	3. Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2.	Indeks Pembangunan Keluarga	69,62	74,01	79,52	85,04	91,68
			3.	Indeks Ketimpangan Gender	0,42	0,34	0,24	0,14	0,03
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	4. Peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	1.	Nilai Kinerja Pengelolaan JDIH	80	84	88	92	95
			2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	3,9	4,32	4,67	5
			3.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,2	4,4	4,6	4,8	5
			4.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	79,19	83,29	87,39	91,49	95,59
Misi 3: Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau	IE15. Lingkungan hidup berkualitas	5. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup	1.	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	31,70	33,78	35,85	37,93	40
			2.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7	17,75	28,5	39,25	50
			3.	Pengelolaan Sampah					
				Persentase Pengurangan Sampah pada Sumbernya (%)	30	32,5	35	37,5	40
	IE16. Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	6. Peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	1.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) (%)	9,11	7,61	6,11	4,61	3,11
			2.	Ketahanan Air:					
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	89,28	91,96	94,64	97,32	100
IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	7. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	70,1	57,58	47,65	40,64	35,43	
		2.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca-Kumulatif (%)	25,11	32,14	41,37	50,60	59,83	



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		PERIODE 2025-2045				
					BASELINE 2025	TARGET 2029	TARGET 2034	TARGET 2039	TARGET 2045
Misi 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Pemenuhan akses perlindungan sosial	1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Pontianak (%)	54	64	74	84	94
			2.	Persentase penyandang disabilitas di sektor formal (%)	10	17,50	25,00	32,50	40
	IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	9. Mengembangkan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,17	3,41	3,64	3,88	4,11
			2.	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Pontianak	31.000	34.100	37.510	41.261	45.387
			3.	Proporsi Jumlah Usaha Mikro (%)	90	95	95	95	95
			4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,32	0,62	0,91	1,21	1,50
			5.	Rasio Kewirausahaan Daerah	4,74	5,19	5,87	5,99	6,37
			6.	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	6,15	6,25	6,35	6,45	6,55
			7.	Proporsi Penciptaan lapangan kerja formal (%)	66	67	68	69	70
			8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,10	6,90	5,70	4,50	3,30
			9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,22	48,06	48,89	49,73	50,56
			10.	Indeks Inovasi Daerah	57	62,75	68,50	74,25	80
	IE6. Transformasi digital	10. Mempercepat transformasi digital	1.	Nilai Smart City	3,4	3,8	4,2	4,6	5
	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	11. Memperkuat investasi	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31	32	33	34	35



MISI	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		PERIODE 2025-2045				
					BASELINE 2025	TARGET 2029	TARGET 2034	TARGET 2039	TARGET 2045
	IE8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	12. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkotaan	1.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	94,00	94,38	94,75	95,13	95,50
			IE11. Stabilitas ekonomi makro daerah	13. Menjaga stabilitas ekonomi makro daerah	1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,07	1,08	1,09
	2.	Indeks Kemandirian Keuangan Daerah			48	51	54	57	60
	3.	Tingkat Inflasi			2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
	4.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	85	86,25	87,5	88,75	90		
5.	Total Kredit/PDRB (%)	88	89,75	91,5	93,25	95			
Misi 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenteram dan Tertib untuk mencapai ketahanan sosial Budaya	IE10. keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	14. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	1.	Angka Kriminalitas	1.100	990	891	802	722
			2.	Angka Konflik	0	0	0	0	0
	IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	15. Penguatan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76	79,5	83	86,5	90

Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak, 2024



BAB VI PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan *stakeholders* terkait lainnya dalam menyelenggarakan pembangunan Kota Pontianak selama periode Tahun 2025-2045, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak untuk 4(empat) periode per-lima tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kota Pontianak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 berisikan kebijakan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025-2045, yang mengarahkan pembangunan untuk mewujudkan visi jangka panjang Kota Pontianak yaitu **Kota Pontianak Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif, Legislatif, dan masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan visi Kota Pontianak Tahun 2025-2045.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah ini akan tercermin dari sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan unggul, tata kelola pemerintah yang berintegritas, kolaboratif dan adaptif, infrastruktur dan energi baru terbarukan yang terintegrasi dan berkelanjutan, masyarakat perkotaan yang sejahtera, masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan, taat hukum, tenteram dan tertib yang berketahanan sosial budaya hingga menjadi kota yang tanggap bencana.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam merangkai masa depan Kota Pontianak dari tahun 2025 hingga 2045, penting untuk memandang visi ini sebagai komitmen bersama dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dokumen ini telah menegaskan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan yang adaptif dan inovatif, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta ketertiban sosial dan hukum.

Sebagai upaya mewujudkan visi yang telah digariskan, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait menjadi krusial. Semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan global, dan memperkuat kolaborasi akan menjadi fondasi utama dalam merealisasikan cita-cita luar biasa ini bagi Kota Pontianak.

Substansi perencanaan pembangunan jangka panjang ini harus dapat diselaraskan dengan kebijakan pendanaan yang diperlukan, untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan implementasinya. Kebijakan pendanaan terhadap perencanaan pembangunan akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sebagai turunan dari dokumen RPJPD ini.

6.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan jangka Panjang Kota Pontianak, serta mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan pengendalian perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan hasil implementasi dari RPJPD ini nantinya.

Pengendalian pada tahap perumusan kebijakan perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, baik rencana jangka panjang maupun rencana tata ruang wilayah.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, serta pelaporan per-periode RPJMD.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Selain itu, kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme, tata cara, dan proses pengendalian sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6.2.1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak tahun 2025-2045 melibatkan berbagai strategi dan langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Adapun beberapa langkah kunci dalam manajemen risiko untuk RPJPD Kota Pontianak tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko:
 - Analisis Lingkungan: mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim, bencana alam, dan dampak lingkungan lainnya.
 - Risiko Sosial: mempertimbangkan risiko yang berasal dari perubahan demografis, ketidakstabilan sosial, dan masalah kesehatan masyarakat.
 - Risiko Ekonomi: mengidentifikasi risiko ekonomi seperti fluktuasi pasar, inflasi, dan ketergantungan pada sumber daya tertentu.
 - Risiko Infrastruktur: mengevaluasi risiko terkait dengan infrastruktur kota, termasuk transportasi, utilitas, dan fasilitas umum.



2. Analisis Risiko:
 - Penilaian Dampak: menilai dampak potensial dari risiko yang teridentifikasi terhadap tujuan RPJPD.
 - Probabilitas Terjadi: mengevaluasi kemungkinan terjadinya setiap risiko dan sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi rencana.
 - Prioritaskan Risiko: memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas terjadinya untuk fokus pada risiko yang paling signifikan.
3. Pengembangan Strategi Mitigasi:
 - Strategi Penghindaran: menghindari risiko dengan melakukan perubahan dalam rencana atau pendekatan.
 - Strategi Pengurangan: mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko, seperti memperkuat infrastruktur atau meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
 - Strategi Transfer: memindahkan risiko ke pihak ketiga melalui asuransi atau kontrak.
 - Strategi Penerimaan: menerima risiko jika biaya mitigasi terlalu tinggi dan dampaknya dapat diterima.
4. Implementasi dan Pengawasan:
 - Pelaksanaan Rencana: menerapkan strategi mitigasi yang telah direncanakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.
 - Monitoring dan Evaluasi: memantau dan evaluasi efektivitas langkah mitigasi secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan.
 - Pelaporan: membuat laporan berkala tentang status risiko dan tindakan mitigasi untuk pemangku kepentingan.
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan:
 - Konsultasi Publik: melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi dan penilaian risiko untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.
 - Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mengelola risiko secara efektif.
6. Penyesuaian dan Perbaikan Berkelanjutan:
 - Ulasan Berkala: meninjau dan memperbarui rencana manajemen risiko secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
 - Adaptasi terhadap Perubahan: menyesuaikan strategi manajemen risiko dengan perubahan kondisi dan prioritas kota.

Dengan pendekatan yang sistematis dan proaktif, Kota Pontianak diharapkan dapat mengelola risiko secara efektif dan memastikan bahwa RPJPD untuk tahun 2025-2045 dapat dicapai dengan sukses.

6.2.2. Mekanisme Perubahan

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan pedoman penyusunan RPJPD; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar, seperti: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan nasional dan/atau keadaan kahar.

Mekanisme, tata cara, dan proses perubahan RPJPD Kota Pontianak sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6.2.3. Pembiayaan Pembangunan

Perencanaan pembiayaan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pontianak untuk periode 2025-2045 merupakan aspek penting yang memastikan bahwa berbagai program dan proyek pembangunan dapat terimplementasi dengan baik. Dokumen RPJPD ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan mencakup beberapa elemen kunci dalam perencanaan pembiayaan.

Berikut adalah gambaran umum dari perencanaan pembiayaan:

1. Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan
 - Identifikasi Kebutuhan: Menilai kebutuhan pembangunan kota dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
 - Penetapan Prioritas: Menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan mendesak, dampak ekonomi, dan manfaat sosial.
2. Sumber Pembiayaan
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sumber utama dana dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan ini disusun dalam anggaran tahunan dan jangka menengah.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana dari pemerintah pusat untuk sektor prioritas tertentu, seperti infrastruktur dan layanan dasar.
 - Pinjaman Daerah: Pemerintah daerah dapat memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan untuk proyek-proyek besar. Perencanaan harus mencakup analisis kemampuan pembayaran dan dampak utang.
 - Pendapatan Lokal: Termasuk hasil pengelolaan aset daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), CSR dan sumber pendapatan lainnya.
 - Kemitraan Publik-Swasta (PPP): Menjalinkan kerjasama dengan sektor swasta dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek. Ini termasuk skema BOT (Build-Operate-Transfer) dan skema kemitraan lainnya.
 - Hibah dan Bantuan Internasional: Dana dari donor internasional atau lembaga internasional untuk proyek-proyek khusus, seperti pembangunan infrastruktur hijau atau pengelolaan bencana.
 - Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Rencana dan Strategi Pembiayaan
 - Perencanaan Anggaran Jangka Panjang: Menyusun rencana anggaran yang mencakup periode 20 tahun, dengan penjadwalan tahunan untuk setiap proyek dan program serta penjadwalan jangka menengah.
 - Diversifikasi Sumber Dana: Memastikan keberagaman sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, seperti meningkatkan PAD serta mencari peluang kemitraan.
 - Efisiensi Penggunaan Dana: Mengimplementasikan strategi untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan efektif, termasuk perencanaan yang matang dan pengelolaan proyek yang baik.
 - Pemantauan dan Evaluasi: Menyusun mekanisme untuk memantau kemajuan proyek, mengevaluasi hasil, dan menyesuaikan perencanaan sesuai kebutuhan, termasuk pelaporan berkala dan audit.
4. Implementasi dan Pengawasan
 - Struktur Pengelolaan: Menetapkan struktur organisasi dan tim yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan proyek.
 - Regulasi dan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan rencana pembangunan, termasuk aturan tentang pengelolaan keuangan dan transparansi.
 - Komunikasi dan Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diperhatikan.
5. Estimasi dan Proyeksi Biaya
 - Estimasi Biaya Kegiatan: Menyusun estimasi biaya untuk masing-masing proyek dan program yang direncanakan dalam RKPD. Ini mencakup biaya konstruksi, operasional, dan pemeliharaan.
 - Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran: Membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan bahwa ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran selama periode RPJMD.
6. Penyesuaian dan Adaptasi
 - Fleksibilitas Anggaran: Menyediakan ruang untuk penyesuaian dalam anggaran jika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak.
 - Rencana Kontinjensi: Mengembangkan rencana darurat untuk mengatasi potensi risiko dan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
7. Dokumentasi dan Transparansi
 - Dokumentasi Rencana: Menyusun dokumentasi yang jelas dan terperinci tentang rencana pembiayaan dan alokasi anggaran.
 - Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dan memastikan akuntabilitas melalui laporan publik dan mekanisme kontrol internal.
8. Sinergisitas Pembiayaan antara Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Provisi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Kota Pontianak.